

**PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF  
PADA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI PERKOTAAN (P2KP)  
DI DESA PACUL KECAMATAN TALANG  
KABUPATEN TEGAL**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**M. FARIED WAJDY**

**D4E003036**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**2005**

**PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF  
PADA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI  
PERKOTAAN (P2KP) DI DESA PACUL KECAMATAN TALANG  
KABUPATEN TEGAL**

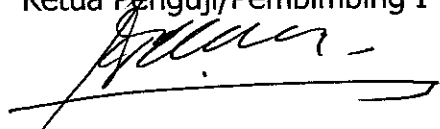
Dipersiapkan dan disusun oleh

M. FARIED WAJDY  
D4E003036

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 15 Juni 2005

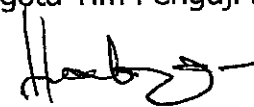
Susunan Tim Penguji :

Ketua Penguji/Pembimbing I

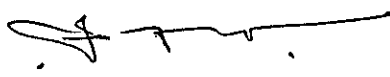
  
Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD

Anggota Tim Penguji lain :

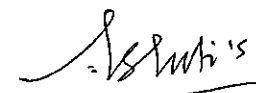
1.

  
Prof. Drs. Hartoyo

Sekretaris Penguji

  
Drs. Hardi Warsono, MTP

2.

  
Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal : ..15 JUN 2005.....

Ketua Program Studi MAP  
Universitas Diponegoro Semarang

UPT-PUSTAK-UNDP
No. Daft:..4208/I/MAP/01
Tgl. ....9/5.06.....



  
Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD

## RINGKASAN

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Untuk itu dilakukan melalui analisis yang mendalam dengan menggunakan desain penelitian deskriptik analisis dengan teknis analisis taksonomi dan pendekatan yang digunakan teknik kualitatif, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Tahunan dan Program Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) di Desa, dimana pengamatan dilihat dari dimensi program, dimensi pelaksana program dan dimensi masyarakat sasaran program.

Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa tujuan dari pelaksanaan perencanaan partisipatif yang salah satunya adalah tersusunnya Rencana Tahunan dan PJM Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal telah disepakati dan ditetapkan serta seluruh tahapan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif dilaksanakan. Namun demikian ditemukan masih ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik, yaitu pelaksanaan beberapa tahapan perencanaan partisipatif tidak sesuai dengan pedoman teknis P2KP, kemampuan anggota BKM yang masih terbatas dan sikap dari beberapa pelaksana program (BKM) yang mengindikasikan rendahnya nilai kesukarelawanan, serta kurang terlibatnya masyarakat sasaran program secara maksimal.

Hasil analisis data yang bersumber dari wawancara yang mendalam dengan *key informan* serta hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa ada kesesuaian dan juga ada ketidaksesuaian antara : (a) kebutuhan sasaran yaitu masyarakat miskin dengan hasil ketetapan perencanaan partisipatif (b) persyaratan pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan kemampuan khusus organisasi dan petugas pelaksana yaitu anggota BKM; (c) sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana. Sehingga diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun Rencana Tahunan dan PJM Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yaitu faktor program, dilihat dari pelaksanaan tahapan-tahapan perencanaan partisipatif ada yang sesuai dengan pedoman teknis, tetapi ada juga yang menyimpang; faktor pelaksana program, dilihat dari kemampuan, pada beberapa tahapan anggota BKM tidak mampu melaksanakan sesuai dengan pedoman teknis, koordinasi telah berjalan dengan baik dan sikap, pada akhir tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif terlihat rendahnya nilai kesukarelawanan; serta faktor masyarakat sasaran program, dilihat dari kurangnya keterlibatan dan rendahnya pemahamannya terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif.

Dengan pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang demikian, maka peneliti memberikan rekomendasi

antara lain : perlu dilakukan penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simple dan mudah dipahami baik oleh organisasi pelaksana maupun masyarakat sasaran program dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip perencanaan partisipatif selain itu juga perlu ada peninjauan kebijakan non-insentif bagi BKM, karena pada prakteknya di lapangan sangat mempengaruhi sikap dari pelaksana program dalam melaksanakan tugas-tugas yang nilai tanggungjawabnya cukup besar. Rekomendasi lainnya untuk pelaksana program adalah perlu ada peningkatan kapasitas BKM dalam bentuk pelatihan atau penambahan wawasan dan juga perlu terus dilakukan penyadaran terhadap BKM tentang norma-norma dan prinsip-prinsip P2KP yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, sehingga timbul sikap kesukarelawanan dan keikhlasan dari para anggota BKM demi tercapainya tujuan penanggulangan kemiskinan di Desa serta perlu terus dijalin dan dipelihara komunikasi yang baik antara BKM dengan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat lain yang ada di Desa, agar pelaksanaan tugas dalam merealisasikan hasil kesepakatan Loakakarya dapat berjalan dengan baik. Sedangkan rekomendasi untuk masyarakat sasaran program adalah pemberian informasi dan sosialisasi tentang PJM dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, harus terus dilaksanakan dalam berbagai kesempatan kepada masyarakat agar terus terlibat, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasannya dan Kehadiran sebanyak-banyaknya masyarakat sasaran program dalam berbagai kegiatan P2KP atau kegiatan pembangunan lain yang ada di Desa harus dijadikan target utama oleh BKM atau Pemerintah Desa.

## **ABSTRAKSI**

Peneliti M. Faried Wajdy, Semarang 2005 : **Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal**

Kata Kunci : partisipatif, perencanaan, kemiskinan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan perencanaan partisipatif dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Tahunan dan PJM Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa, dimana pengamatan dilihat dari dimensi program, dimensi pelaksana program dan dimensi masyarakat sasaran program. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa tujuan dari pelaksanaan perencanaan partisipatif yang salah satunya adalah tersusunnya Rencana Tahunan dan PJM Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal telah disepakati dan ditetapkan serta seluruh tahapan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif telah dilaksanakan. Namun demikian ditemukan masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan beberapa tahapan perencanaan partisipatif tidak sesuai dengan pedoman teknis P2KP, kemampuan anggota BKM yang masih terbatas dan sikap dari beberapa pelaksana program (BKM) yang mengindikasikan rendahnya nilai kesukarelawanan, serta kurang terlibatnya masyarakat sasaran program secara maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun Rencana Tahunan dan PJM Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yaitu faktor program, dilihat dari pelaksanaan tahapan-tahapan perencanaan partisipatif ada yang sesuai dengan pedoman teknis, tetapi ada juga yang menyimpang; faktor pelaksana program, dilihat dari kemampuan, pada beberapa tahapan anggota BKM tidak mampu melaksanakan sesuai dengan pedoman teknis, koordinasi telah berjalan dengan baik dan sikap, pada akhir tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif terlihat rendahnya nilai kesukarelawanan; serta faktor masyarakat sasaran program, dilihat dari kurangnya keterlibatan dan rendahnya pemahamannya terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif.

## **ABSTRACT**

Peneliti M. Faried Wajdy, Semarang 2005 : **Implementation of participative planning at P2KP in Pacul Village, Talang Sub District, Tegal Regency.**

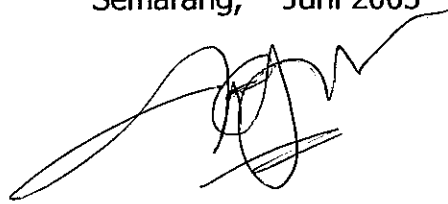
Key words : participative, planning, poverty

This research was carried out to describe implementation participative program and to know the factors influencing the program P2KP in Pacul Village, Talang Sub District, Tegal Regency. The implementation participative program at P2KP was done in order to make PJM annually program. Observation was focused on program definition, implementation definition, and the object societies' definition. The fact shows that aim of implementation participative program that once is the structured of annually program and PJM Pronangkis in Pacul Village, Talang Sub District, Tegal Regency was already agreed and being stated, the whole steps were being done. Nevertheless, there were several lackness in their implementation, there were several steps of implementation participative program did not mix with the technical pattern of P2KP, the restricted capability of the member of BKM and the attitude of several person whose did the activity themselves those indicating that there were still low value of dedicated person, and also the participation of the society aimed the program is still not maximum. So the influencing factors for the successfulness or the fulfillment the implementation participative program, although the coordination went well, its also depends on the whole steps of implementation participative program, the mixing with the technical pattern of P2KP, the capability of the member of BKM and the attitude of several person whose did the activity themselves those indicating and the value of the dedicated person, and also the maximum of participation of the society aimed the program themselves.

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan

Semarang, Juni 2005



**M. FARIED WAJDY**

D4E003036

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta berkat taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **"PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF PADA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI DESA PACUL KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL"**. Penulisan ini adalah dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-2 di bidang Ilmu Administrasi pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu baik berupa data dan informasi, serta berbagai dukungan moril lainnya maupun materil khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah memberi izin kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan BAPPENAS yang telah memberikan bea siswa kepada penulis sehingga dapat mengikuti pendidikan Magister Administrasi Publi di Universitas Diponegoro.

Ucapan terima kasih kami sampaikan terutama kepada Bapak Prof. Drs. Y. WARELLA, MPA, PhD. dan Bapak Drs. Hardi Warsono MTP yang dengan segala kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan dan koreksi selama masa bimbingan, serta nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Segenap Dosen pengajar program Pasca Sarjana MAP Undip, yang telah memberikan bekal ilmu baik secara teoritis maupun praktis kepada penulis.
2. Bapak Kepala Bagian Pemerintahan dan Bapak Kasubag Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Tegal, beserta seluruh staf, yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama mengikuti studi.



3. Rekan-rekan studiuwan Program Studi Magister Administrasi Publik Angkatan X yang telah memberikan dukungan moral.
4. Istri, anak-anakku dan keluarga besar H. Chumaidi ZA, SH, M.Hum serta keluarga besar M. Nugraha yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh selama studi.

Dengan penuh kesadaran penulis meyakini penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait yang membutuhkannya, khususnya kepada penulis untuk terus dapat berkarya sebagai bakti kepada orang tua, keluarga dan ibu pertiwi.

Jakarta, Juni 2005

Penulis

M. Faried Wajdy

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
ABSTRAKSI .....	v
ABSTRACT .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR SKEMA DAN DIAGRAM .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Perencanaan Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat .....	13
B. Perencanaan Partisipatif .....	20
1. Konsep Perencanaan Partisipatif .....	20
2. Perencanaan Partisipatif pada P2KP .....	26
C. Dimensi-dimensi yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif .....	35
1. Kemampuan Pelaksana .....	47
2. Sikap .....	50
3. Koordinasi .....	57

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	64
B. Fokus Penelitian .....	65
C. Pemilihan Informan .....	69
D. Instrumen Penelitian .....	70
E. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	71
1. Jenis Data .....	71
2. Sumber Data .....	71
3. Teknik Pengumpulan Data .....	72
4. Teknik Pengolahan Data .....	72
F. Analisa Data .....	73
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
<b>DAN GAMBARAN UMUM P2KP .....</b>	<b>76</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	76
1. Kabupaten Tegal .....	76
2. Kecamatan Talang .....	84
3. Desa Pacul .....	89
B. Gambaran Umum P2KP .....	98
1. Struktur Pelaksana P2KP .....	98
2. Tahapan Pelaksanaan P2KP .....	103
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>127</b>
A. Hasil Penelitian Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif	
Pada P2KP di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal .....	127
1. Sosialisasi Perencanaan Partisipatif .....	129
2. Review Pemetaan Swadaya .....	143
3. Rembug Warga .....	163
4. Lokakarya PJM Pronangkis Tingkat Desa .....	181
5. Penyebaran Hasil Lokakarya .....	194

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif Pada P2KP di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal .....	203
C. Diskusi .....	216
<b>BAB VI P E N U T U P .....</b>	<b>220</b>
A. Kesimpulan .....	220
B. Saran .....	225
DAFTAR PUSTAKA .....	228
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	232

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Daftar Anggota BKM Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	6
Tabel 2 Skala Prioritas Prasarana Lingkungan	7
Tabel 3. Permasalahan Pelaksanaan P2KP di Desa Pacul	8
Tabel 4 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Tegal	78
Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tegal	79
Tabel 6 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tegal	80
Tabel 7 Banyaknya Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal	82
Tabel 8 Jumlah Keluarga Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal	83
Tabel 9 Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Talang	85
Tabel 10 Luas Wilayah Kecamatan Talang menurut Jenis Penggunaan Tanahnya	86
Tabel 11 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Talang	87
Tabel 12 Jumlah Penduduk Miskin dan Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Talang	88

Tabel 13	Pembagian RW dan RT di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	91
Tabel 14	Jumlah Penduduk Dilihat Dari Tingkatan Umur	92
Tabel 15	Jumlah Penduduk Dilihat Dari Tingkatan Pendidikan	92
Tabel 16	Sarana Dan Prasarana di Desa Pacul	94
Tabel 17	Jumlah Keluarga Miskin di Desa Pacul	96
Tabel 18	Pelaksanaan Sosialisasi Perencanaan Partisipatif di Desa Pacul	130
Tabel 19	Skala Prioritas dan Pembobotan	150
Tabel 20	Pelaksanaan Rembug Warga di Desa Pacul	165
Tabel 21	Contoh Masalah Yang Dibahas Dalam Rembug Warga	177
Tabel 22	Hasil Rembug Warga RW 6 dan RW 7 Tentang Biaya Kegiatan Komponen Sarana dan Prasarana	179
Tabel 23	Hasil Rembug Warga RW 6 dan RW 7 Tentang Jumlah Sasaran Komponen Sosial dan Permodalan	180
Tabel 24	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif	200
Tabel 25	Komponen yang Berkaitan dengan Rencana Pengembangan Sosial	205

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Proses Pemberdayaan Masyarakat	21
Gambar 2 Daur Kegiatan Pelaksanaan P2KP	31
Gambar 3 Pendekatan Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif	35
Gambar 4 Persyaratan Relay Akan Program	38
Gambar 5 Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III	42
Gambar 6 Fokus Penelitian Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada P2KP Di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	68
Gambar 7 Proses Pengumpulan Data dan Analisis Data	75
Gambar 8 Peta Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	90
Gambar 9 Bagan Struktur Organisasi P2KP	102
Gambar 10 Foto Suasana Rapat BKM	138
Gambar 11 Foto Rumah Bapak Sumarno (Sasaran Program)	152
Gambar 12 Foto Salah Satu Ruangan di Balai Desa yang Digunakan Untuk Kegiatan BKM	161
Gambar 13 Foto Kemampuan BKM dalam Memimpin Rapat Lokakarya PJM Pronangkis	184

Gambar 14 Foto Rencana Tempat Pembangunan MCK di RW 1	192
Gambar 15 Kesesuaian Program, Pelaksana dan Sasaran	203
Gambar 16 Foto Penyampaian Santunan dari P2KP	211
Gambar 17 Foto Hasil Perbaikan Saluran Air di RW 6	215



## DAFTAR SKEMA DAN DIAGRAM

	Halaman
Skema 1 : Skema Sosialisasi Perencanaan Partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	131
Skema 2 : Skema Review Pemetaan Swadaya	144
Skema 3 : Skema Rembug Warga Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	163
Skema 4 : Skema Lokakarya PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis	182
Diagram 1 Tingkat Kehadiran Sasaran Program pada Sosialisasi Perencanaan Partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	140
Diagram 2 Tingkat Kehadiran Sasaran Program pada Rembug Warga di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	174

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Program pemberdayaan masyarakat miskin pada dasarnya dirancang berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Secara umum, terdapat dua macam program bantuan bagi masyarakat miskin, yaitu; program penyelamatan (*rescue*) dan program pemulihan (*recovery*). Program penyelamatan bertujuan membantu masyarakat miskin dari kondisi krisis berat, seperti kehilangan pekerjaan yang berlanjut dengan dijualnya alat-alat kerja ("alat produksi") yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam jangka panjang mereka terancam kelaparan dan kekurangan gizi (*mal nutrition*). Di Indonesia program penyelamatan tergabung dalam skema program JPS (Jaring Pengaman Sosial). Inti program JPS bernuansakan "*charity*" dengan pendekatan pemberian bantuan yang cepat (*quick disbursement*) dan tepat sasaran. Tujuannya adalah penyelamatan bagi sekelompok masyarakat agar terhindar dari bencana kelaparan, atau bahkan dari ancaman hilangnya generasi bangsa karena anak-anaknya tidak bisa makan dan belajar (sekolah).

Sementara itu, program pemulihan sangat kental dengan nuansa pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Program pemulihan pada umumnya merupakan kelanjutan dari program penyelamatan. Inti program pemulihan adalah pendampingan kepada masyarakat ("khususnya masyarakat miskin") dengan

menata dan mengaktifkan kembali kelembagaan masyarakat, yang selama ini kurang berfungsi (*idle capacity*), agar potensi (energi sosial) mereka teraktualisasikan untuk dapat memecahkan persoalan kemiskinan mereka sendiri.

Dasar pemikiran yang dijadikan acuan adalah bahwa persoalan kemiskinan sesungguhnya merupakan persoalan yang kompleks, melibatkan berbagai dimensi untuk memahami dan mengatasinya. Persoalan kemiskinan umumnya sudah berlangsung untuk kurun waktu yang cukup lama. Apalagi untuk konteks Indonesia, tekanan krisis yang sampai saat ini masih terasa akibatnya, semakin memperparah kemiskinan terutama di masyarakat marginal. Logikanya, dana bantuan tidak mungkin dapat mengatasi persoalan kemiskinan yang sudah sedemikian akutnya. Hanya masyarakatlah yang sesungguhnya paham dengan persoalan yang mereka hadapi, serta mempunyai potensi terpendam untuk mengatasi persoalan kemiskinannya sendiri. Untuk itu, potensi atau aset yang dimiliki masyarakat harus dibangun dan didayagunakan secara optimal, agar terjadi peningkatan nilai aset masyarakat.

Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan di perkotaan, maka dilaksanakan sebuah program yang dinamakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP telah dilaksanakan sebanyak 2 tahap, yaitu tahap 1, periode Tahun 1999 s/d 2001 dan tahap 2, periode Tahun 2002 s/d 2004, dimana penelitian ini akan melihat pelaksanaan P2KP pada Tahap 2. P2KP bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di perkotaan dalam mengatasi masalah kemiskinannya sendiri, serta mengokohkan kembali

kelembagaan masyarakat sebagai wahana peningkatan kapasitas warganya dalam menanggulangi masalah-masalah kemiskinan yang ada di dalam komunitas yang bersangkutan secara mandiri dan berkelanjutan.

P2KP menempatkan masyarakat -khususnya masyarakat miskin- sebagai "Pelaku Utama" atau "Subjek" dalam mengelola proyek, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengawasinya. Peran pihak lain seperti; aparat pemerintah, para tokoh, termasuk juga konsultan sebagai fasilitator saja. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan akan dirasakan sebagai milik masyarakat itu sendiri, sehingga akan mendorong tumbuhnya motivasi dan tanggungjawab untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya.

Dalam kaitan dengan P2KP, pemenuhan persyaratan ini dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Masyarakat. Kelembagaan Masyarakat ini diproses dan dibentuk atas inisiatif masyarakat sendiri melalui fasilitasi P2KP, dengan nama generik Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Latar belakang dibentuknya kelembagaan masyarakat yaitu BKM adalah dengan melihat fokus perhatian kegiatan P2KP yang diarahkan untuk menuju tumbuh dan berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap persoalan-persoalan penyebab kemiskinan, penyebab masalah lingkungan, dan penyebab permasalahan sosial. Kesadaran kritis masyarakat terhadap realitas dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan dapat kiranya dianggap sebagai sebuah fondasi bagi tegaknya sebuah kelembagaan yang berakar ditengah masyarakat. Pada tahap awal melalui Rembug-rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), adanya kegiatan

Refleksi Kemiskinan (RK) dan Pemetaan Swadaya (PS), P2KP telah mulai melakukan upaya tersebut.

Dalam konsep dasar P2KP dinyatakan bahwa BKM terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili warga dalam berbagai kepentingan. BKM menjadi unsur strategis dalam himpunan masyarakat warga yang selalu peka terhadap berbagai perubahan khususnya yang terkait dengan kemiskinan dan merumuskan jawaban-jawabannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dilandasi nilai-nilai luhur dan merencanakan perbuatan-perbuatan baik yang murni untuk dilaksanakan Unit Pengelola (UP). Salah satu tugas dari BKM dalam proses pembuatan kebijakan adalah melaksanakan perencanaan partisipatif dalam menyusun Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) di Desa.

Perencanaan partisipatif dalam P2KP dilakukan sebagai alat pembelajaran agar masyarakat lebih mampu dalam menganalisis keadaannya sendiri, mengidentifikasi potensinya, merumuskan kebutuhan riilnya dan menyepakati rencana-rencana kegiatan secara sistematis, strategis, jelas dan terarah untuk memperbaiki kehidupannya. Dengan demikian kegiatan-kegiatan P2KP maupun penanggulangan kemiskinan lainnya, dibuat dan direncanakan tidak sekesar "daftar keinginan" sekelompok orang atau pihak tertentu, melainkan benar-benar berbasis kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat.

Penanggungjawab penyusunan program perencanaan partisipatif pada P2KP adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan melibatkan kader masyarakat, tima pemetaan swadaya dan segenap masyarakat. BKM dan pelaku P2KP lain, harus senantiasa mendorong tumbuhnya interaksi, kebersamaan, keterbukaan dan solidaritas sosial di Desa berdasarkan prinsip dan nilai P2KP.

Dari hasil pengamatan dan informasi sementara yang didapat peneliti tentang pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, dimana BKM Desa Pacul sebagai pelaksananya, terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :

BKM Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal beranggotakan sebanyak 11 orang, jika dilihat dari latar belakang pendidikan cukup beragam mulai dari tamatan SLTP sampai dengan sarjana. Namun demikian koordinator BKM yang ditunjuk oleh anggota adalah seorang tamatan SLTP walaupun ada anggota lain yang tamatan SLTA bahkan Sarjana. Alasan yang dikemukakan oleh para anggota pada saat pemilihan adalah karena senioritas sehingga mereka berasumsi koordinator yang ditunjuk lebih berpengalaman. Berdasarkan informasi dari Fasilitator, pada saat dilakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap BKM Desa Pacul, seringkali terjadi kesalahan penerimaan persepsi dan pemahaman atas informasi-informasi yang disampaikan tentang pelaksanaan P2KP. Keterbatasan kemampuan pemahaman atas berbagai saran, bimbingan dan informasi tentu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Berikut daftar Anggota BKM Desa

Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan data-data pendidikan terakhir dan pekerjaan :

**Tabel 1**  
**Daftar Anggota BKM Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal**

No	Nama	L/P	Pekerjaan	Pendidikan	Usia
1	Darno *)	L	Petani	SMP	54
2	Alfudin	L	Swasta	SMA	31
3	Turimah, S.Ag.	P	Swasta	S-1	33
4	Muamalah	P	Guru	SMK	35
5	Suhadi S.Ag.	L	Guru	S-1	48
6	Catim	L	Swasta	SMP	37
7	Siswanto	L	Pgw. Koperasi	STM	58
8	Nurcholis	L	Swasta	SMA	43
9	Wahidin	L	Guru	S-1	36
10	Karso	L	Swasta	SMP	49
11	Imron	L	Swasta	SMA	40

Sumber : BKM Mandiri Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Dari tabel 1 di atas dapat terlihat bahwa dari 11 Anggota BKM yang berpendidikan terakhir SLTP sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 5 orang dan Sarjana 2 orang. Sedangkan pekerjaan dari Anggota BKM Desa Pacul cukup beragam, yaitu petani 1 orang, Guru 3 orang, Pegawai Koperasi 1 orang dan lainnya swasta sebanyak 6 orang.

Permasalahan lain yang ada pada BKM Desa Pacul dalam melaksanakan P2KP adalah dalam hal pengambilan keputusan seringkali nilai pribadi dan kelompok yang ditonjolkan misalnya memberikan bantuan kepada saudara atau orang dekatnya walaupun orang tersebut tidak sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditentukan. Contoh lain, keputusan yang diambil dalam pelaksanaan program perbaikan prasarana lingkungan lebih mengutamakan lokasi tempat tinggalnya,

meskipun pemanfaatnya bukanlah obyek sasaran yaitu kaum miskin sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan melalui pemetaan swadaya.

Berikut Daftar Skala Prioritas jenis kegiatan prasarana lingkungan yang telah dilaksanakan oleh BKM pada Tahun 2004 :

**Tabel 2**  
**Skala Prioritas Prasarana Lingkungan**

No	Jenis Kegiatan	Volume	Biaya		Lokasi
			Swadaya	BLM	
1.	Jalan	300 m	3.500.000	2.500.000	Rt 22 *)
		200 m	2.000.000	2.000.000	Rt 24 *)
2.	Saluran	150 m	1.650.000	1.350.000	Rt 11
		11,25 m	200.000	150.000	Rt 26 *)
		45 m	500.000	500.000	Rt 31
3.	Ipal	45 m <sup>2</sup>	3.000.000	2.000.000	Rt 27 *)
4.	Lampu Jalan	1 unit	150.000	200.000	Rt 2 *)
		1 unit	150.000	200.000	Rt 5 *)
		2 unit	300.000	400.000	Rt 7 *)
		2 unit	300.000	400.000	Rt 8 *)
		2 unit	300.000	400.000	Rt 19 *)
5.	Jembatan	1 unit	350.000	350.000	Rt 16 *)
		6 m <sup>2</sup>	600.000	650.000	Rt 6
		2 m <sup>2</sup>	200.000	300.000	Rt 14 *)

Sumber : PJM Pronangkis BKM Mandiri Desa Pacul

Pada data tabel 2 di atas terlihat bahwa lokasi pelaksanaan perbaikan prasarana lingkungan yang mendapatkan dana BLM dari 14 lokasi sebanyak 11 lokasi yang penulis beri tanda \*) adalah lingkungan dimana anggota BKM tinggal. Fakta dan data tersebut menguatkan dugaan bahwa BKM dalam mengambil keputusan yang



berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan di Desa masih menonjolkan nilai pribadi dan kelompoknya.

Sedangkan permasalahan-permasalahan lain yang didapat oleh penulis dari pengamatan dan informasi awal di lokasi penelitian tentang pelaksanaan P2KP di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dapat terlihat pada tabel I.3 dengan bukti masalah dan sumber data atau informasinya, sebagai berikut :

**Tabel 3.**  
**Permasalahan Pelaksanaan P2KP di Desa Pacul**

No	Masalah	Bukti Masalah	Sumber Data/ Informasi
1	2	3	4
1.	Ada perbedaan kepatuhan BKM terhadap pelaksanaan proses, tahapan dan aturan pada masa pendampingan dengan masa pasca pendampingan.	Pada masa pendampingan setiap langkah dan keputusan diupayakan sesuai dengan pedoman umum dan pedoman teknis P2KP, namun pada saat pasca pendampingan, banyak tahap kegiatan yang tidak dilakukan, seperti verifikasi kelayakan pengajuan proposal kegiatan KSM, seringkali tidak dilakukan secara prosedural. (Tidak memperhatikan proses, lebih mementingkan hasil)	Laporan Kegiatan BKM
2.	BKM menentukan biaya operasional untuk anggota BKM yang bertentangan dengan nilai-nilai kerelawanan.	BKM membuat kebijakan pemberian uang jasa dengan dalih sebagai pengganti transport	Laporan Keuangan Bulanan BKM
3.	Kurangannya pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif	Sosialisasi perencanaan partisipatif hanya dilaksanakan di tiga tempat	Laporan kegiatan Faskel
4.	Rendahnya keterlibatan masyarakat miskin pada perencanaan partisipatif	Pada saat rapat-rapat FGD Kelompok Miskin, tingkat kehadiran rendah.	Informasi Faskel
5.	Rapat koordinasi BKM hanya dilaksanakan satu kali dalam satu bulan, tidak seimbang dengan materi yang harus dibahas dan diputuskan.	Banyak permasalahan yang harus segera diputuskan, diluar waktu rapat rutin bulanan, sehingga seringkali diputuskan secara sepihak oleh beberapa anggota tanpa melibatkan anggota lainnya dengan alasan keterdesakan waktu.	Informasi dari salah seorang Anggota BKM

1	2	3	4
6.	Karena koordinasi yang kurang, akibatnya komunikasi antar Anggota BKM menjadi kurang baik, sehingga seringkali timbul konflik antar Anggota.	Sering timbul salah paham antar anggota, sampai ada pengunduran diri 2 orang anggota BKM.	Surat pengunduran diri Anggota BKM
7.	Ada beberapa anggota BKM yang tidak aktif dengan alasan kesibukan atau lebih mengutamakan kepentingan pribadi.	Setiap diadakan rapat, tingkat kehadiran rendah, dari 11 Anggota BKM dan 6 orang pengelola (UPK, UPL, UPS) yang hadir rata-rata 5-7 orang.	Buku Daftar Hadir BKM
8.	Keputusan yang diambil oleh BKM seringkali hanya diputuskan oleh beberapa orang yang dominan.	Karena tingkat koordinasi rendah dan tingkat kehadiran juga rendah, maka memberi peluang kepada anggota yang aktif untuk lebih dominan dalam mengambil keputusan.	Informasi dari seorang Anggota BKM

Dengan latar belakang permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

## **B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH**

Masalah adalah kesenjangan antara teori dan praktek, atau dengan kata lain adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pengertian masalah dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo (1971 ; 6) yaitu suatu penyimpangan atau deviasi secara tidak diduga sebelumnya dari apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.

Peneliti mengidentifikasi permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada P2KP, sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan pelaksana.
2. Koordinator ditunjuk berdasarkan senioritas bukan kemampuan.
3. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif.
4. Rendahnya keterlibatan masyarakat miskin pada pelaksanaan proses perencanaan partisipatif.
5. Ada perbedaan kepatuhan terhadap pelaksanaan proses, tahapan dan aturan pada masa pendampingan dengan masa pasca pendampingan.
6. Seringkali nilai pribadi dan kelompok yang lebih ditonjolkan dalam mengambil keputusan.
7. BKM menentukan biaya operasional untuk anggota BKM yang bertentangan dengan nilai-nilai kerelawanan.
8. Rapat koordinasi hanya dilaksanakan satu kali dalam satu bulan, tidak seimbang dengan materi yang harus dibahas dan diputuskan.
9. Karena koordinasi yang kurang, akibatnya komunikasi antar Anggota BKM menjadi kurang baik, sehingga seringkali timbul konflik antar Anggota.
10. Ada beberapa anggota BKM yang tidak aktif dengan alasan kesibukan atau lebih mengutamakan kepentingan pribadi.
11. Keputusan yang diambil seringkali hanya diputuskan oleh beberapa orang yang dominan.

Dari latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan yang ada, maka peneliti membuat perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian tentang implementasi Program P2KP ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan :

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Administrasi Negara kaitannya dengan perencanaan sosial untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Memberi masukan untuk perbaikan kebijakan Pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan.
3. Bagi peneliti sendiri, diharapkan dapat bermanfaat sebagai ajang melatih memecahkan masalah kebijakan penanggulangan kemiskinan secara ilmiah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kerangka pikir teoritis diperlukan dalam setiap pelaksanaan penelitian, karena dapat menjadi pedoman yang berpijak pada konsep-konsep yang berhubungan dengan arah penelitian dan menjadi landasan teoritis dalam penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Masri Singarimbun : MPS-LP3ES, 1989:37).

Sedangkan dalam penelitian kualitatif, teori-teori yang dikemukakan pada tinjauan pustaka ini digunakan sebagai diskursus atas fenomena-fenomena yang terjadi pada obyek penelitian, dalam hal ini masyarakat. Karena penelitian ini memfokuskan pada studi Perencanaan Partisipatif, maka teori, proposisi atau konsep akan diuraikan yang berkaitan dengan fenomena perencanaan partisipatif pada P2KP.

#### **A. PERENCANAAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan) dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993 : 95) adalah "memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan".

Definisi lain diungkapkan oleh Kunarjo (2002 : 14) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan "proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu".

Lebih lanjut perencanaan menurut LAN (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004 : 4) berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus.

Menurut Waterston (dalam Diana Conyers, 1994;4) pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan J. Nehru (dalam Diana Conyers, 1994;4) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelektual guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan juga mencari jalan keluar guna memecahkan masalah. Kemudian Beenhakker (dalam Diana Conyers, 1994;4) menyatakan bahwa perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan.

Dari beberapa pengertian tentang perencanaan, penulis mensintesisakan bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan.

Menurut Diana Conyers (1994;5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasa dipakai pemerintah atau badan-badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. Perencanaan ini dikenal sebagai perencanaan pembangunan.

Pada saat ini pembangunan ditinjau dari berbagai aspek yang luas, yaitu melibatkan faktor-faktor yang lebih kompleks, misalnya faktor sosial, politik, lingkungan dan juga faktor ekonomi. Konsekuensinya perencanaan pembangunan berubah menjadi suatu proses yang lebih rumit dengan lingkup yang semakin luas berdasarkan tujuan dan sasaran yang ada. Pembangunan yang dilihat dari faktor sosial akan memunculkan berbagai solusi atas permasalahan sosial dalam bentuk perencanaan sosial. Timbulnya perencanaan sosial di Dunia Ketiga menurut Diana Conyers (1994;19) menyebabkan penggeseran yang lebih luas dari perencanaan pembangunan dengan lebih memberi tekanan pada perubahan sosial dan pencapaian tujuan sosial itu sendiri.



Untuk menjaga dinamika sistem sosial dalam perencanaan sosial perlu didukung dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan manusia sebagai individu. Manusia dalam pembangunan nasional hendaknya ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan, ketrampilan dan sekaligus perilaku membangun. Pembangunan yang berbasis pada manusia mencakup pembangunan masyarakat (*community based development*) dan pembangunan manusia (*people centered developmen*). Bertolak dari model pembangunan yang *humanize* tersebut, maka dibutuhkan program-program pembangunan yang memberikan prioritas pada upaya memberdayakan masyarakat.

Konsep pemberdayaan memiliki perspektif yang luas dan cukup banyak ditelaah dari berbagai sudut pandang. Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dengan daya, hanya saja satu dengan yang lainnya berbeda dan sangat dipengaruhi oleh *interlinking factors* antara lain pengetahuan, kemampuan status, harta, kedudukan dan jenis kelamin. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai). Pola hubungan seperti inilah yang akan diperbaiki dalam proses pemberdayaan.

Prijono (1996) melihat proses pembangunan memiliki kecenderungan :

1. Menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian, melalui organisasi dan biasa disebut kecenderungan primer.

2. Sebagai proses stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan. Untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog dan diskusi dalam organisasi/kelompok secara bersama. Disini terjadi proses konsientisasi dengan cara menganalisis secara kritis situasi total mereka, termasuk melihat dimensi politiknya dan berusaha memperoleh kembali daya untuk mengubah situasi tersebut melalui aksi kolektif. Artinya kaum miskin mulai belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisisnya dan merancang solusi untuk memecahkan masalah tersebut dan biasa disebut kecenderungan sekunder.

Sementara Moeljarto (1993), menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai proses pematihan (*break down*) dari hubungan atau relasi subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Mubyarto (1994) lebih menekankan pada diri masyarakat itu sendiri sebagai hakekat pemberdayaan. Selanjutnya Moeljarto menjelaskan bahwa pemberian kuasa atau kebebasan dan pengakuan dari subyek ke obyek dengan memakai sumber yang ada merupakan salah satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut. Sedangkan Mubyarto menyatakan bahwa hakekat atau inti dari pemberdayaan berada pada diri manusia atau rakyat, sedangkan faktor luar hanyalah berfungsi sebagai perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan, mengendalikan, mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :  
(Priyono dan Pranarka, 1996)

1. Inisial, dari pemerintah, oleh pemerintah untuk rakyat;
2. Partisipatoris, dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat.
3. Emansipatoris, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pada tahapan ketiga emansipatoris : masyarakat sudah dapat menemukan eksistensi diri sehingga dapat melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam mengaktualisasikan dirinya, untuk dapat mewujudkannya dibutuhkan 2 (dua) persyaratan pokok, yaitu :

1. Perencanaan pembangunan
2. Pelaksanaan program pembangunan

Pelaksanaan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat menurut Kartasmita (1996) harus memiliki ciri antara lain :

1. Kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat yang lemah.
2. Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang akan dilakukan.
3. Karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat dari ketidakberdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (*cooperatif*) dalam kelompok yang dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal.
4. Menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, termasuk keikutsertaan orang-orang

setempat yang telah maju dan anggota masyarakat mampu lainnya, organisasi kemasyarakatan termasuk LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya.

Sejak bergulirnya reformasi di Negara kita, telah terjadi berbagai perubahan dan tuntutan dari berbagai pihak sebagai wujud dari proses pelaksanaan pembangunan, hal ini ditandai dengan tuntutan dari masyarakat untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena tuntutan itulah maka disetiap tingkatan pemerintahan baik di Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai Kelurahan/Desa terjadi berbagai upaya dan tindakan untuk menuju proses tersebut. Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah telah berupaya secara serius untuk melaksanakan demokratisasi apalagi dengan nuansa otonomi daerah yang menuntut setiap daerah untuk bersaing dalam mendayagunakan potensi yang dimilikinya.

Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat terhadap pembangunan daerah, maka masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan termasuk pada tahapan perencanaan pembangunan diberbagai tingkatan. Dengan demikian diharapkan akan timbul suatu rasa memiliki dan rasa tanggungjawab bersama seluruh masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya. Pembangunan yang mendapatkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat dapat kita sebut pembangunan partisipatif.

Dalam aplikasinya, pembangunan partisipatif seringkali diidentikan sebagai pemberdayaan masyarakat. Salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah adanya keharusan untuk membiarkan struktur-struktur dan proses-proses untuk membangun itu secara organic berasal dari komunitas itu

sendiri. Hal ini sama dengan prinsip keanekaragaman dalam ekologi, sehingga segala sesuatu dilaksanakan secara berbeda pada komunitas yang berbeda-beda tergantung kepada budaya local yang dianut, ekonomi, sosial dan faktor-faktor politik.

## **B. PERENCANAAN PARTISIPATIF**

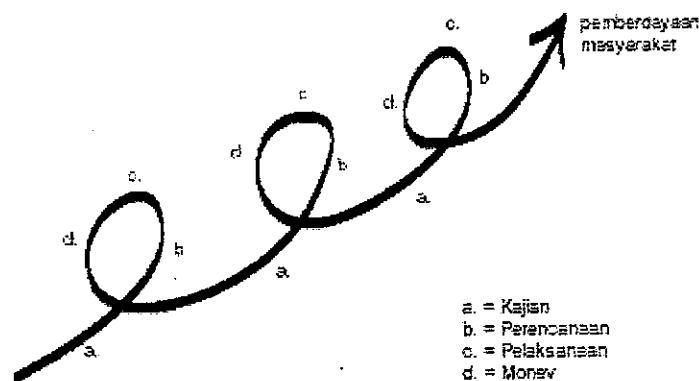
### **1. Konsep Perencanaan Partisipatif**

Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerap kali dilakukan dari atas ke bawah (*top-down*). Rencana program pengembangan masyarakat biasanya dibuat di tingkat pusat (atas) dan dilaksanakan oleh Instansi Propinsi dan Kabupaten. Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan atau peranan. Hal ini disebabkan ada anggapan bahwa untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan bagi masyarakat, masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam visi ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat kurang terlibat sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya.

Dari kondisi ini, pendekatan dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan tersebut

lebih bersifat memberdayakan masyarakat, yaitu model 'Pemberdayaan Masyarakat' (PM). Dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berikut gambar proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diadaptasi dari *DELIVERI* :

**Gambar 1**  
**Proses Pemberdayaan Masyarakat**



Sumber : [www.deliveri.org/Guidelines](http://www.deliveri.org/Guidelines)

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang berjalan terus menerus dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya.
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian
- c. Menerapkan rencana tersebut

d. Secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (Monitoring dan Evaluasi - M&E)

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan yang muncul, (butir 'a'), menyesuaikan rencana (butir 'b'), lalu menerapkan rencana baru (butir 'c') di atas dan seterusnya. PM kerap kali dilakukan melalui pendekatan kelompok dimana anggota kelompok bekerjasama dan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Untuk pengembangan kelompok ada kegiatan-kegiatan khusus yang berjalan sambil kegiatan lain dilaksanakan.

Perencanaan partisipatif adalah satu tahap proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahap kajian keadaan pedesaan secara partisipatif yang didapat dari informasi yang dikumpulkan. Perencanaan partisipatif bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program mereka dan juga untuk mengukur keberhasilan kegiatan atau program tersebut (monitoring dan evaluasi). Kalau masyarakat sendiri berpartisipasi dalam melaksanakan proses perencanaan secara partisipatif, maka kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan atas kemauan masyarakat sendiri sehingga akan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaannya.

Perencanaan partisipatif menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah "perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan

(*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan *stakeholders* ini adalah untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki”.

Senada dengan pengertian perencanaan partisipatif menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Abe (2005:85) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut :

”Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat”.

Lebih lanjut Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2003:16) mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah ”usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri”.

Dari pengertian perencanaan partisipatif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua pihak (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki.

Diana Conyers (1994;154) menyebutkan (3) tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting, yaitu :

Alasan pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang-tanpa kehadirannya, program-program pembangunan akan gagal.



Alasan kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.

Alasan ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Masyarakat mempunyai hak untuk turut *urun rembug* (memberi saran) dalam menentukan dan merencanakan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2001:25), lebih lanjut mengemukakan ciri – ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut :

(1). Terfokus pada kepentingan masyarakat

- a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
- b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya, dan terbuka.

(2). Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.

(3). Dinamis

- a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.
- b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.

#### (4). Sinergitas

- a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak.
- b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi.
- c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun.
- d. Memperhatikan interaksi yang terjadi diantara *stakeholders*.

#### (5). Legalitas

- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

#### (6). Fisibilitas (Realistis)

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

Senada dengan ciri-ciri tersebut di atas, Samsura (2003:2) mengemukakan kriteria - kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Adanya pelibatan seluruh *stakeholders*.
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.
3. Adanya proses politik melalui upaya negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*).

4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.

Berdasarkan ciri – ciri dan kriteria perencanaan partisipatif di atas, lebih lanjut Abe (2005 : 90) mengemukakan bahwa dengan adanya pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, maka akan mempunyai dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif ini yaitu :

- a. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat.
- b. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.
- c. Meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Prinsip dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan 'melibatkan kepentingan masyarakat' hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar.

Alexander Abe (2005;91-92) menyatakan bahwa ada dua bentuk perencanaan partisipatif, yaitu :

Pertama, perencanaan yang langsung disusun bersama masyarakat, perencanaan ini bisa merupakan :

- a. perencanaan lokasi – setempat, yakni perencanaan yang menyangkut daerah dimana masyarakat berada;

- b. perencanaan wilayah yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara perwakilan.

Kedua, perencanaan yang disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal formal), seperti parlemen. Untuk yang kedua ini, masyarakat sebaiknya masih tetap terbuka dalam memberikan masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Perencanaan yang disusun bersama masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat bisa langsung ikut ambil bagian. Menurut Alexander Abe (2005;82-83) untuk mengorganisasi perencanaan model ini perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan, yakni :

- a. Dalam perencanaan bersama rakyat, yang melibatkan banyak orang, maka harus dipastikan bahwa diantara para peserta memiliki rasa saling percaya, saling mengenal dan bisa saling bekerja sama.
- b. Agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair dan bebas, maka di antara peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi dalam kedudukan, Kesetaraan menjadi penting.
- c. Perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat (mereka peserta perumusan) bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu maupun setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, di mana mereka yang berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat.

- d. Suatu keputusan yang baik, tentu tidak boleh didasarkan pada dusta atau kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya persoalan yang sedang dihadapi.
- e. Berproses dengan berdasarkan kepada fakta, dengan sendirinya menuntut cara berfikir yang objektif.
- f. Prinsip partisipasi hanya akan mungkin terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat.

Agar proses perencanaan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dalam konteks perencanaan partisipatif ada tahapan umum yang bisa dikembangkan menjadi tahap-tahap berikut :

- a. Melakukan identifikasi peserta. Proses ini adalah tahap awal yang harus dilewati. Maksud dasar tahap ini adalah adanya penganalan yang lebih seksama terhadap mereka yang ingin dilibatkan dalam proses perencanaan.
- b. Setelah identifikasi para peserta, dimulai dengan melakukan identifikasi persoalan-persoalan desa, potensi dan masa depan yang hendak dicapai. Sebaiknya tim awal telah mempersiapkan suatu penyelidikan.
- c. Setelah bahan terkumpul dan dipilah-pilah, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis kritis, secara bersama, apa yang menjadi masalah, terutama untuk keperluan menemukan sebab dasar dan kaitan antara satu dengan masalah lain.
- d. Melakukan analisis tujuan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam proses ini, dilakukan penggalian mengenai apa sebetulnya yang hendak dituju, dengan

menggunakan pohon masalah mengembangkan pohon tujuan. Tujuan bisa bermakna penyelesaian masalah atau rumusan yang ingin dicapai.

- e. Memilih tujuan-persoalan desa yang kompleks, tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan jangka panjang, agar tujuan besar bisa dicapai. Memilih tujuan mengandung maksud menetapkan apa yang paling mungkin dilakukan, dengan mempertimbangkan sumber daya.
- f. Menganalisis kekuatan dan kelemahan. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis lebih teliti mengenai apa sebetulnya kekuatan dan kelemahan desa. Kekuatan berarti sesuatu yang bersifat positif, di dalam (yang dimiliki), dan kelemahan berarti sesuatu yang negatif, di dalam (yang dimiliki).
- g. Melakukan perumusan hasil-hasil dalam sebuah matrik program. Dalam matriks telah disusun dengan lebih seksama, yakni tujuan, target, jenis aktivitas, waktu, tahap kerja, penanggungjawab, sampai pada biaya yang dibutuhkan. Semakin detail matriks akan semakin baik.
- h. Menyiapkan organisasi kerja. Bagaimanapun rumusan perencanaan hanya akan menjadi sekedar rencana bila tidak diikuti dengan kejelasan mengenai organisasi kerja. Untuk itu, semua potensi yang terlibat diharapkan bisa ikut ambil bagian menjadi bagian dari organisasi kerja. Kemampuan menyiapkan organisasi kerja, akan menentukan tingkat keberhasilan realisasi rencana.

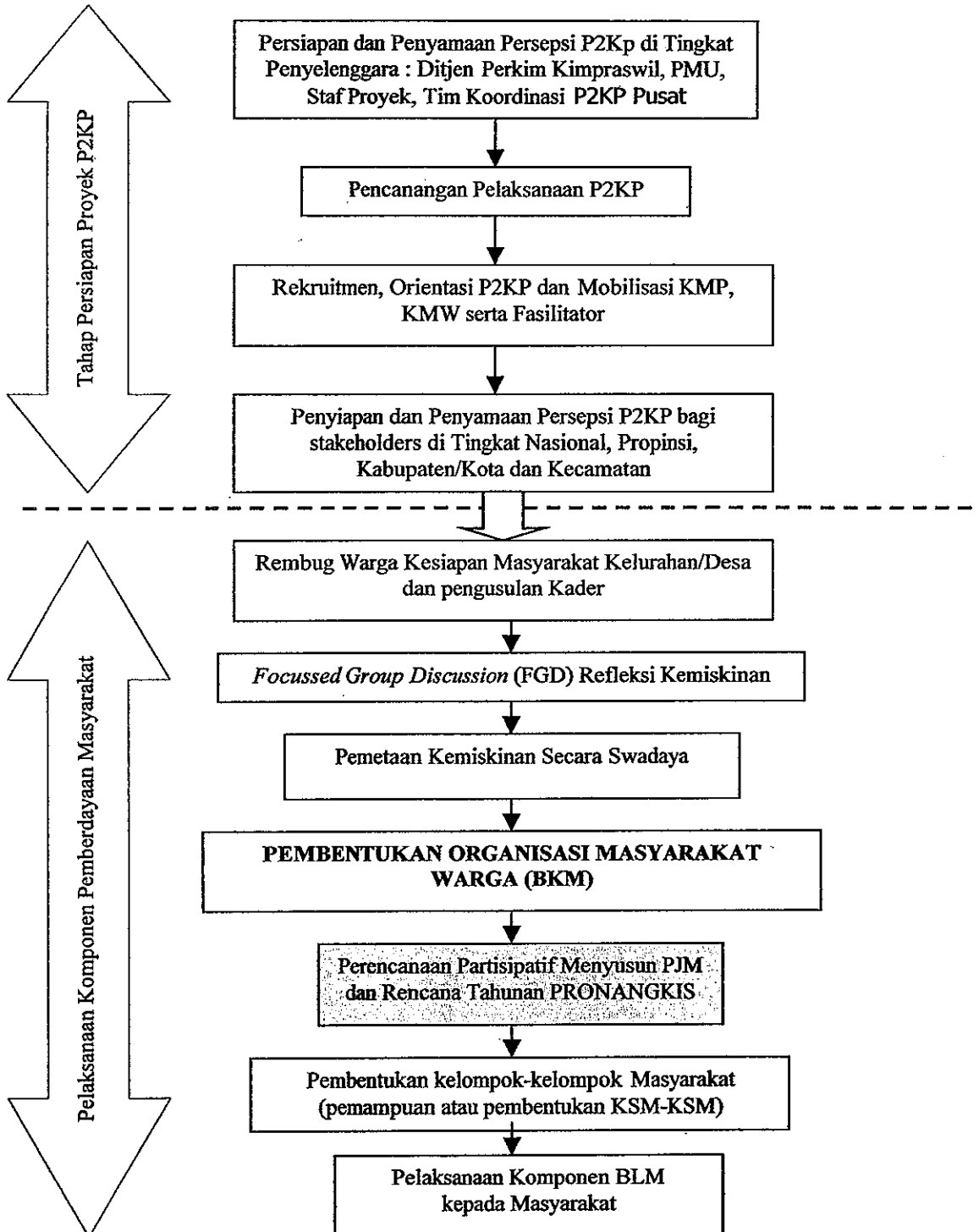
## **2. Perencanaan Partisipatif pada P2KP**

Proses penanganan P2KP diawali dengan serangkaian kegiatan orientasi pemahaman substansi P2KP kepada semua pihak pelaksana P2KP mulai tingkat pusat hingga Kelurahan/Desa. Setelah para pelaksana memahami dan memiliki persepsi yang sama, maka pada tahap berikutnya proses penyiapan masyarakat dan pemerintah daerah agar mampu berperan dalam P2KP, melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan atau pengembangan masyarakat di lokasi sasaran P2KP.

Tahap berikutnya adalah pengorganisasian masyarakat untuk menggalang kekuatan dan membangun lembaga dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara sistematis dan terorganisasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan segala potensi yang ada termasuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Agar ada ikhtiar sungguh-sungguh dari masyarakat untuk memperkuat dan memanfaatkan segenap potensi yang ada melalui proses pengorganisasian yang mengakar yaitu dengan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Berikut bagan daur kegiatan pelaksanaan P2KP sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Teknis P2KP :

Gambar 2  
Daur Kegiatan Pelaksanaan P2KP





Dari Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa dari beberapa tahapan-tahapan atau prosedur dalam pelaksanaan P2KP, maka fokus dalam penelitian tentang perencanaan partisipatif pada pelaksanaan P2KP di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari BKM yaitu menyusun Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Tahunan Program penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS).

Perencanaan partisipatif dalam P2KP dilakukan sebagai alat pembelajaran agar masyarakat lebih mampu dalam menganalisis keadaannya sendiri, mengidentifikasi potensinya, merumuskan kebutuhan riilnya dan menyepakati rencana-rencana kegiatan secara sistematis, strategis, jelas dan terarah untuk memperbaiki kehidupannya. Dengan demikian kegiatan-kegiatan P2KP maupun penanggulangan kemiskinan lainnya, dibuat dan direncanakan tidak sekesar "daftar keinginan" sekelompok orang atau pihak tertentu, melainkan benar-benar berbasis kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat.

Penanggungjawab penyusunan program perencanaan partisipatif pada P2KP adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan melibatkan kader masyarakat, tima pemetaan swadaya dan segenap masyarakat. BKM dan pelaku P2KP lain, harus senantiasa mendorong tumbuhnya interaksi, kebersamaan, keterbukaan dan solidaritas sosial di Desa berdasarkan prinsip dan nilai P2KP.

Dalam perencanaan partisipatif, terdapat dua jenis rencana yang perlu dirumuskan, yakni rencana strategis dan rencana tindak. Rencana strategis pada prinsipnya merupakan rencana jangka menengah program penanggulangan

kemiskinan (3 tahun), yakni indikasi program untuk menanggulangi kemiskinan dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan rencana aksi masyarakat adalah rencana penanggulangan kemiskinan tahunan. Kegiatan untuk jangka waktu satu tahun pertama diklasifikasikan ke dalam : (1) jenis-jenis kegiatan swadaya murni masyarakat; (2) jenis-jenis kegiatan melalui bantuan dana BLM dan swadaya masyarakat; serta (3) jenis-jenis kegiatan dengan bantuan APBD dan sumber lainnya.

Maksud kegiatan perencanaan partisipatif pada P2KP adalah :

- a. Masyarakat mengidentifikasi permasalahan/kelemahan, potensi/kekuatan dan menyusun usulan rencana kegiatan atau program sesuai dengan kebutuhan riilnya.
- b. Masyarakat di suatu desa/kelurahan secara bersama menentukan arah dan tujuan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- c. Rencana program penanggulangan kemiskinan menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat dan mendapat dukungan baik dari masyarakat, pemerintah maupun pihak-pihak peduli lainnya.

Sedangkan tujuan kegiatan perencanaan partisipatif pada P2KP adalah :

- a. Tersusunnya PJM Pronangkis dan Rencana Kegiatan Tahunan.
- b. PJM Pronangkis dan Rencana Kegiatan Tahunan mendapat dukungan baik dari masyarakat, pemerintah maupun pihak-pihak peduli.
- c. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berrjalan sesuai dengan rencana dan jumlah penduduk miskin di masing-masing wilayah berkurang.

- d. BKM sebagai lembaga pimpinan kolektif dapat menjalankan peran dan fungsinya yang ditandaio dengan meningkatnya solidaritas sosial, sinergi antar program.

Perencanaan partisipatif dalam P2KP dilaksanakan dalam rangka penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis), dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

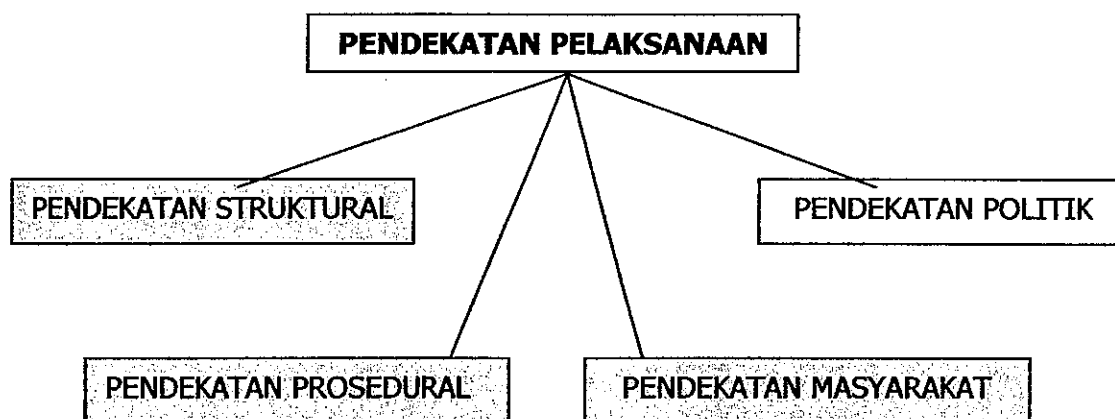
1. Sosialisasi Perencanaan Partisipatif.
2. Review Pemetaan Swadaya untuk perumusan masalah, potensi dan kebutuhan tingkat Rt/Rw.
3. Rembug warga pembahasan masalah, potensi dan kebutuhan penanggulangan kemiskinan tingkat Rt/Rw (penyepekatan gagasan).
4. Lokakarya PJM Pronangkis tingkat Desa.
5. Penyebarluasan hasil lokakarya tingkat Desa.

### C. DIMENSI-DIMENSI YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF

Proses pelaksanaan program umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas ke bawah. Apa yang dilaksanakan adalah apa yang sudah diputuskan. Demikian pula dalam proses perencanaan, selama ini *bottom up* hanya di atas kertas saja, namun pada prakteknya seluruh perencanaan telah dirancang terlebih dahulu oleh pusat. Sehubungan dengan kecenderungan dari pelaksanaan yang bersifat sentralistis, menurut Said Zainal Abidin (2004;203-206) pelaksanaan program dapat dilihat dari empat pendekatan sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut :

GAMBAR 3

#### PENDEKATAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF



Sumber : Diadaptasi dari Buku Kebijakan Publik (Said Zainal Abidin, 2004;203-206)

Keterangan :   pendekatan penelitian yang dipilih

Dari gambar di atas terlihat bahwa ada 4 (empat) pendekatan pelaksanaan perencanaan partisipatif, masing-masing pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan Struktural; pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi pelaksana sebagai sesuatu yang amat menentukan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif.
2. Pendekatan Prosedural; pendekatan ini melihat pelaksanaan dalam bentuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif.
3. Pendekatan Masyarakat; pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan dalam bentuk keterlibatan masyarakat atas pelaksanaan perencanaan partisipatif.
4. Pendekatan Politik; pendekatan ini melihat bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif tidak terlepas dari politik.

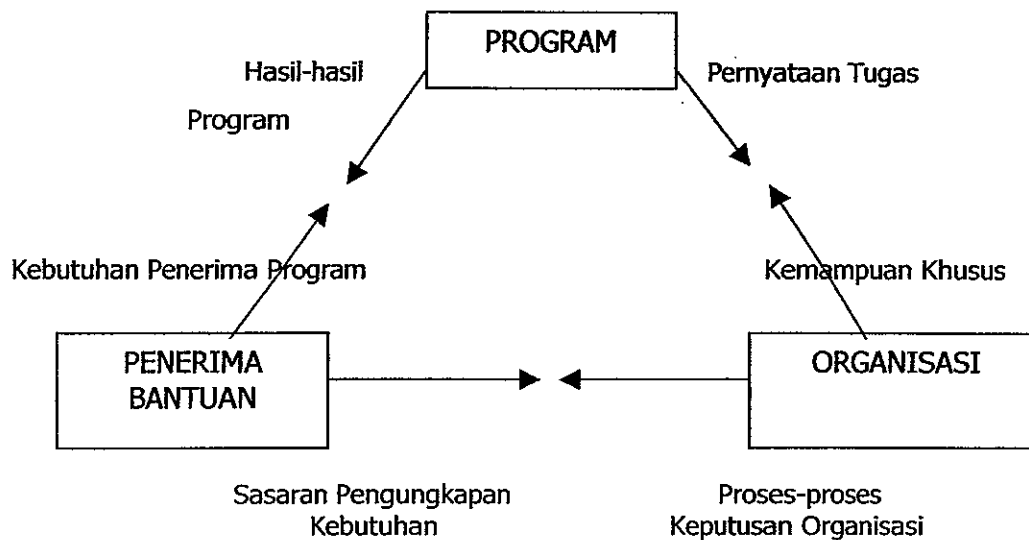
Dari empat pendekatan tersebut, penelitian ini akan mengamati pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP dilihat dari pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan pendekatan masyarakat. Pendekatan struktural yaitu bagaimana organisasi pelaksana memahami dan melaksanakan proses perencanaan partisipatif. Organisasi pelaksana dalam penelitian ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis.

Pendekatan prosedural yaitu proses atau mekanisme dan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh organisasi pelaksana yaitu BKM. Proses atau mekanisme dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah sosialisasi Perencanaan Partisipatif; review Pemetaan Swadaya untuk perumusan masalah, potensi dan kebutuhan tingkat Rt/Rw; rebug warga pembahasan masalah, potensi dan kebutuhan penanggulangan kemiskinan tingkat Rt/Rw (penyepekatan gagasan); lokakarya PJM Pronangkis tingkat Desa. Dan penyebarluasan hasil lokakarya tingkat Desa.

Pendekatan masyarakat yaitu bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif, apakah menerima atau menolak, dilihat dari pemahaman dan keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan partisipatif. Yang dimaksud masyarakat disini adalah masyarakat miskin yang menjadi sasaran program. Keikutsertaan masyarakat miskin dalam proses pelaksanaan perencanaan partisipatif sangat menentukan keberhasilan penyusunan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis yang benar-benar tepat sasaran.

David C. Korten (1984;181) mengemukakan teori pelembagaan program dengan menganalisis keberhasilan suatu program dari tiap elemen untuk meningkatkan adaptabilitas dan akseptabilitas program. Daya kerja suatu program dikemukakannya sebagai fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu dengan kemanfaatan yang dirasakan (beneficiaries), program itu sendiri dan organisasi yang melaksanakan program.

**GAMBAR 4**  
**PERSYARATAN RELAY AKAN PROGRAM**



Sumber : Diadaptasi dari Buku *People Centered Development* (Korten, 1984;181)

Menurut Korten (1984;181), program pembangunan akan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila tidak ada hubungan erat/sinergis antara :

1. Kebutuhan pihak penerima dengan hasil-hasil program.
2. Persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana
3. Kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan dengan proses pengambilan keputusan oleh organisasi pelaksana.

Jadi untuk keberhasilan pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP diperlukan, pertama adanya kesesuaian antara kebutuhan sasaran yaitu masyarakat miskin dengan hasil pelaksanaan perencanaan partisipatif, kedua adanya kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan kemampuan khusus organisasi dan petugas pelaksana yaitu anggota BKM, ketiga kesesuaian

antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana.

Pendapat lain tentang determinan keberhasilan pelaksanaan suatu program dalam hal ini pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP, antara lain dikemukakan oleh Grindle (1980;22), menurutnya ada sembilan variabel bebas, yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yang dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup : (1) kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe manfaat yang akan dihasilkan, (3) tingkat perubahan yang diharapkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program, dan (6) sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi meliputi : (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (3) kepatuhan dan daya tanggap

Sedangkan menurut Wiliam N. Dunn (2000), bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Kebijakan pada hakekatnya berada pada suatu sistem, dimana kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik antara ketiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Dunn bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diformulasikan ke dalam berbagai masalah yang timbul, sedangkan pelaku kebijakan adalah para individu atau kelompok yang mempunyai peran dalam kebijakan

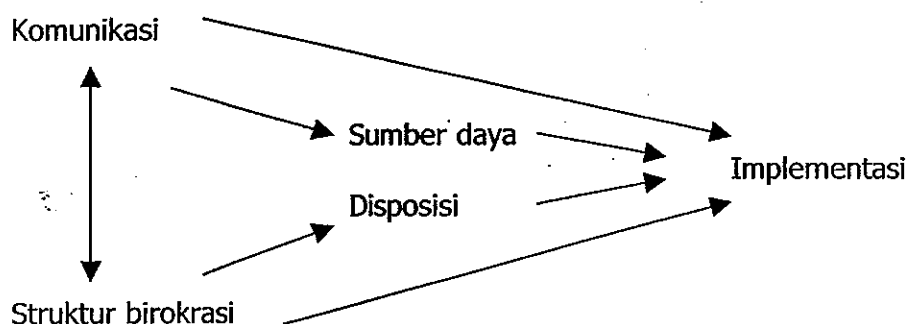


tersebut dan lingkungan kebijakan adalah *policy environment* yaitu kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa Implementasi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor dan dikembangkan dalam model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel yang dipercaya membentuk hubungan antara kebijakan dengan performance kebijakan, yaitu : (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya kebijakan (dana dan insentif yang lain), (3) komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas, (4) karakteristik badan pelaksana (seperti ukuran staf, tingkat pengawasan hierarki, vitalitas organisasi), (5) kondisi sosial ekonomi dan politik, dan (6) sikap implementor.

Keberhasilan pelaksanaan program menurut George Edwards III (1980) dipengaruhi oleh empat variabel yaitu : komunikasi, sumber-sumber daya, disposisi-disposisi atau sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1982 : 9). Keempat variabel ini berperan penuh untuk membantu atau menghambat penerapan suatu kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing saling berhubungan seperti tampak dalam gambar berikut :

**Gambar 5**  
**MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**  
**MENURUT GEORGE C. EDWARD III**



Sumber : Edward, G.C.III, 1980

Dapat dijelaskan dari gambar di atas bahwa keberhasilan pelaksanaan program dipengaruhi oleh komunikasi, yaitu berjalannya informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksana tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat bawahnya. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pembagian tugas-tugas yang ada dan koordinasi yang terjalin diantara bagian-bagian tersebut. Sedangkan variabel sumber daya menurut Edward mencakup kemampuan staf (manusianya), informasi, sarana-sarana (fasilitas) yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan. Variabel disposisi atau sikap aparat pelaksana terhadap kebijakan juga dikatakan turut menentukan pelaksanaan suatu kebijakan mencakup staffing dilihat dari sistem perekrutan atau pengangkatan pelaksana program dan pemberian insentif.

Dengan pertimbangan pendekatan pelaksanaan perencanaan partisipatif yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan pendekatan kejiwaan, maka penelitian ini akan menggunakan

pendapat David C. Korten dan George C. Edwards sebagai alat untuk menganalisis penelitian tentang pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Penelitian tentang perencanaan partisipatif akan dilihat dari sisi proses atau tahapan-tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif, juga dilihat dari kemampuan organisasi pelaksana melaksanakan proses perencanaan partisipatif dan dilihat dari keterlibatan masyarakat miskin sebagai sasaran program terhadap proses perencanaan partisipatif.

Pendapat George C. Edwards III tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis penelitian khususnya yang berkaitan dengan fenomena permasalahan yang ada pada organisasi pelaksana (BKM) dalam melaksanakan perencanaan partisipatif pada P2KP di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Dari empat variabel yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan partisipatif menurut Edwards; komunikasi, sumber-sumber daya, disposisi-disposisi atau sikap dan struktur birokrasi, penulis hanya menggunakan tiga variabel yang menjadi pedoman analisis yaitu sumber-sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Dari tiga variabel tersebut penulis lebih memfokuskan pada variabel sikap dan dua sub variabel turunan yaitu kemampuan pelaksana yang diturunkan dari variabel sumber-sumber daya dan koordinasi yang diturunkan dari variabel struktur birokrasi.

Dasar atau alasan penulis menggunakan variabel sikap, kemampuan (dari variabel sumber-sumber daya) dan koordinasi (dari variabel struktur birokrasi) sebagai fokus dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dengan deskripsi ini :

Kemampuan Pelaksana, Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada P2KP membutuhkan sumber daya yang memadai. Menurut Edwards kemampuan pelaksana adalah sumberdaya yang paling esensial dalam mengimplementasikan program. Sumberdaya lainnya seperti informasi, kewenangan dan fasilitas-fasilitas oleh penulis diasumsikan sudah cukup memadai dalam pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada P2KP, sehingga fokus penelitian dalam variabel sumberdaya hanya pada kemampuan pelaksana. Hal ini didasarkan pada kondisi riil di lapangan, dimana tingkat kemampuan pelaksana yang dinilai masih rendah, dilihat dari tingkat pendidikan anggota BKM, pemahaman terhadap proses, tahapan dan aturan P2KP dan tingkat keaktifan pelaksana dalam setiap rapat-rapat koordinasi.

Sikap, Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada P2KP sangat memerlukan para pelaksana yang mempunyai kehendak untuk melaksanakan seluruh proses, tahapan dan aturan dalam P2KP sehingga tujuan dan sasaran program dapat berjalan dengan baik. Ketika para pelaksana tidak mempunyai perasaan yang kuat untuk melaksanakan proses, tahapan dan aturan program, maka dimungkinkan program tidak akan terlaksana sesuai dengan harapan. Menurut Edwards, proses seleksi perekrutan pelaksana dan pemberian insentif sangat mempengaruhi kehendak atau perasaan yang kuat dari pelaksana untuk menjalankan program dengan baik. Dalam Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada P2KP, proses pemilihan anggota BKM sebagai pelaksana P2KP penting untuk diketahui mengingat sumber daya yang ada dinilai oleh Fasilitator Kelurahan masih memiliki kemampuan yang rendah dalam memahami proses, tahapan dan aturan dalam P2KP. Selain itu juga konsep P2KP

yang menetapkan bahwa pelaksana program P2KP di Desa yaitu BKM merupakan kumpulan relawan-relawan yang bekerja dengan sukarela tanpa honor layak untuk dicermati dalam pelaksanaannya di lapangan.

Koordinasi, Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada P2KP membutuhkan koordinasi untuk menciptakan adanya kesatuan, keterpaduan dan kerjasama yang erat. Pada kenyataannya di lapangan, BKM sebagai pelaksana P2KP di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal hanya melaksanakan rapat koordinasi sebanyak sekali dalam waktu sebulan. Mengingat begitu banyaknya hal yang harus dibicarakan dan yang harus diputuskan dalam setiap rapat, pelaksanaan rapat koordinasi yang hanya sekali dalam sebulan sangat kurang. Belum lagi tingkat kehadiran anggota BKM yang sangat rendah, dari 11 anggota BKM hanya 7 yang aktif dalam berbagai kegiatan BKM. Penulis juga mengasumsikan sub variabel koordinasi juga meliputi aspek komunikasi, karena rendahnya pelaksanaan koordinasi akan menyebabkan permasalahan dalam hal penyampaian keputusan-keputusan BKM kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) akan dilihat dari : pertama, dimensi proses atau mekanisme perencanaan partisipatif yang harus dilaksanakan oleh BKM sebagai organisasi pelaksana sesuai dengan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis P2KP; kedua, dimensi masyarakat dalam memahami dan keikutsertaan serta keterlibatan pada pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP; ketiga, dimensi organisasi pelaksana, yaitu bagaimana kemampuan BKM

dalam memahami dan melaksanakan proses atau mekanisme perencanaan partisipatif yang harus dilaksanakan.

Dimensi proses atau mekanisme perencanaan partisipatif yang harus dilaksanakan oleh BKM sebagai organisasi pelaksana P2KP di Desa sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Teknis P2KP adalah :

1. Sosialisasi Perencanaan Partisipatif.
2. Review Pemetaan Swadaya untuk perumusan masalah, potensi dan kebutuhan tingkat Rt/Rw.
3. Rembug warga pembahasan masalah, potensi dan kebutuhan penanggulangan kemiskinan tingkat Rt/Rw (penyepekatan gagasan).
4. Lokakarya PJM Pronangkis tingkat Desa.
5. Penyebarluasan hasil lokakarya tingkat Desa.

Dimensi masyarakat dilihat melalui tingkat pemahaman dan keikutsertaan serta keterlibatan dalam proses pelaksanaan perencanaan partisipatif. Masyarakat miskin sebagai sasaran P2KP selalu diikutsertakan dalam setiap proses pelaksanaan Program P2KP, mulai tahap sosialisasi awal program, yaitu pada saat diadakan rembug warga akan kesiapan masyarakat dalam menerima Program P2Kp di Desa. Kemudian masyarakat miskin juga dilibatkan pada *Focussed Group Discussion (FGD)* tentang refleksi kemiskinan, pemetaan kemiskinan secara swadaya dan juga pada saat pembentukan organisasi masyarakat warga yaitu BKM. Proses dan tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan dan difasilitasi oleh pelaksana proyek yaitu KMW melalui Fasilitator Kelurahan yang ada di lokasi Desa/Kelurahan sasaran.

Pada penelitian ini, masyarakat miskin sebagai sasaran program akan dilihat dari keterlibatannya dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP yang dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai organisasi pelaksana P2KP di Desa. Tahapan penyusunan Program Jangka Menengah dan Rencana Tahunan PRONANGKIS yang dilaksanakan tentu harus melibatkan masyarakat miskin sebagai sasaran program. Keikutsertaan masyarakat miskin secara aktif dalam proses penyusunan Pronangkis menjadi sebuah kemutlakan karena semua program-program yang akan dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami oleh sasaran program. Tanpa keterlibatan masyarakat miskin dalam proses penyusunan PRONANGKIS dimungkinkan program akan salah sasaran atau salah cara penanggulangan yang digunakan karena tidak adanya informasi yang valid tentang permasalahan kemiskinan yang dialami oleh sasaran.

Dimensi pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP selanjutnya adalah dimensi organisasi pelaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP dilihat dari sisi organisasi pelaksana program dalam penelitian ini akan mengacu pada pendapat dari George C. Edwards III. Fokus yang akan dijadikan analisis adalah kemampuan pelaksana (diturunkan dari sumber-sumber daya), sikap dan koordinasi (diturunkan dari struktur birokrasi). Berikut uraian dari masing-masing faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

## 1. Kemampuan Pelaksana

Siagian (1983:111) menyatakan pendapatnya bahwa tenaga manusia atau sumber daya insani merupakan sumber terpenting yang mungkin dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan demikian maka kemampuan orang-orang yang terlibat dalam suatu program atau kebijakan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program tersebut di lapangan.

Dalam sebuah organisasi publik era global dituntut adanya pelaksana yang memiliki kapabilitas yang tinggi, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kreasi dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Karena hal ini akan mendorong tercapainya tujuan dengan lebih cepat, efektif dan efisien. Kemampuan pelaksana program atau kebijakan yang dihubungkan dengan pekerjaan dapat diartikan sebagai berikut :

Suatu keadaan pada diri seseorang yang secara penuh bersungguh-sungguh bekerja, berdaya guna untuk melaksanakan pekerjaan sehingga memungkinkan sesuatu tujuan yang akan tercapai (Kae H. Chung dan Leon C. Meginson, 1981 : 21)

Dari pengertian di atas ada tiga hal penting yang berkaitan dengan kemampuan pelaksana program yaitu kecakapan, fisik dan mental, dimana ketiganya harus diperankan secara terpadu. Dalam kerangka susunan organisasi kemampuan selalu diidentifikasi dengan kedudukan seseorang sehingga dalam proses pengembangan organisasi dan sumberdaya manusia, baik tahap seleksi maupun pembinaan karir, prinsipnya adalah penempatan seseorang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing personal.



Menurut Miftah Thoha (1993:154) kemampuan pelaksana didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengetahuan.

Gibson (1990:55) menganalisis bahwa sebagai variabel individu, kemampuan tidak bisa dipisahkan dengan konsep ketrampilan. Dalam hal ini kemampuan merupakan sifat (bawaan lahir atau dipelajari) yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat mental atau fisik, maka ketrampilan dinyatakan sebagai kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan dalam tugas.

Apabila kita membahas tentang kemampuan seseorang maka kita tidak bisa lepas dari konsep ketrampilan. Seberapa besar kontribusi yang akan diberikan seorang individu kepada organisasi akan bergantung pada kemampuan individu yang dimiliki, sehingga dalam pengembangan sumber daya organisasi masalah kemampuan perlu mendapat perhatian.

Menurut Gibson (1990:21) bahwa kemampuan staf untuk dapat mencapai hasil atau kinerja organisasi secara efisien dan efektif adalah :

1. Kemampuan interaksi (*interactional ability*), yang meliputi unsur-unsur :
  - a. kemampuan untuk menciptakan dan menjaga hubungan-hubungan pribadi (*interpersonal*)
  - b. kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif
  - c. kemampuan untuk menangani pertentangan-pertentangan baik dengan orang lain maupun teman sekerja.
  - d. Kemampuan untuk meningkatkan atau mempertahankan rasa keadilan dan persamaan kedudukan dalam suatu sistem imbalan
2. Kemampuan konseptual (*conceptual ability*) yang meliputi unsur-unsur :

- a. kemampuan untuk menerima dan menganalisis informasi baik dari dalam maupun dari luar organisasi
  - b. kemampuan untuk memahami arti perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja/organisasi
  - c. kemampuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
  - d. kemampuan untuk melakukan perubahan dalam pekerjaannya yang perlu dalam organisasi
3. Kemampuan administrasi (*administrative ability*) yang meliputi unsur-unsur :
- a. kemampuan untuk mengembangkan dan mengikuti rencana-rencana dan kebijakan serta prosedur yang efektif
  - b. kemampuan untuk memproses kertas kerja dengan baik, teratur serta tepat waktu
  - c. kemampuan untuk mengelola pengeluaran atas suatu anggaran
  - d. kemampuan untuk menggunakan pengetahuannya (*knowledge*), peralatan-peralatan (*tools*), pengalaman (*experience*) dan teknik-teknik dari disiplin ilmu tertentu seperti akuntansi, mesin, hukum, produksi atau psikologi dalam menangani masalah.

Menurut Katz Reesenzweig (dikutip dari Gibson, 1991:123) dikatakan bahwa kemampuan seorang pelaksana yang cocok dimiliki setiap organisasi modern adalah :

1. Kemampuan teknis (*technical ability*), mempunyai arti cakap dan pakar dalam bidang pekerjaan tertentu, berupa metode-metode, proses-proses, prosedur-prosedur, atau teknik-teknik pelaksanaan yang disebut kemampuan secara efektif sebagai anggota kelompok yang harus dimiliki seorang pelaksana kebijakan.
2. Ketrampilan kemanusiaan (*human skill*), kemampuan yang didalamnya mencerminkan berbagai ketrampilan seperti :
  - a. ketrampilan bekerjasama dengan orang lain;
  - b. ketrampilan menciptakan rasa kesadaran dan rasa kebersamaan ;
  - c. ketrampilan menciptakan suasana kerja yang kondusif
3. kemampuan konseptual (*conceptual skill*) adalah kemampuan pengelolaan, yang berkaitan dengan kemampuan melihat segala sesuatu secara makro, secara sistem atau secara lebih sektoral.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dirumuskan bahwa kemampuan yang dimaksud adalah kecakapan,

ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai pelaksana kebijakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan dalam penelitian ini adalah semua potensi yang dimiliki oleh pelaksana program P2KP untuk melaksanakan tugas yang dibebankan berdasarkan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman serta pendidikan yang dimiliki.

## 2. Sikap

George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa jika para pelaksana memperhatikan suatu kebijakan, maka dimungkinkan bagi pelaksana untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat kebijakan. Namun ketika sikap para pelaksana ini berbeda dari pengambil kebijakan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi lebih rumit.

Sikap menurut George Edwards adalah kehendak atau perasaan kuat yang dimiliki oleh para pelaksana program untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Sikap seseorang dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajiban atau tugasnya, tidak dapat dipisahkan dari kepribadian dan mentalitasnya.

Pendapat tentang peranan sentral kepribadian manusia dalam pembangunan juga menjadi keyakinan sejumlah negarawan. Negarawan Park Chung Hee (dalam Moeljarto, 1996;49) misalnya melalui program *Semaul Undong* (Pembangunan Komunitas Baru) berupaya membentuk tipe kualitas manusia Korea Selatan, yaitu :

- a. *diligence*, sikap rajin bekerja, dapat menghargai penunaian kerja yang paling sederhana tetapi dengan sempurna;
- b. *thrifty*, sikap hemat yang timbul sebagai konsekuensi dikap diligence tadi;
- c. *self help*, atau sikap mandiri
- d. *cooperation*, cara untuk mencapai tujuan secara efektif dan rasional dengan mempersatukan individu dengan masyarakatnya.

Negarawan lain, Dr. Mahathir Muhammad (dalam Moeljarto, 1996;50) mantan Perdana menteri Malaysia menyadari suku etnis Melayu tak mungkin mengejar ketertinggalannya, kecuali membangun sumberdayanya, mencanangkan kebijaksanaan *Look East Policy*, berkiblat ke Timur ke Jepang, dan mengambil langkah-langkah bagaimana mereka dapat menginternalisasikan ethos kerja dan kualitas kepribadian dari bangsa Jepang.

Sedangkan mengenai sosok kepribadian bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program pembangunan telah diperkenalkan sejak masa Orde Baru dalam GBHN yaitu Kualitas Manusia Indonesia Seutuhnya. Dalam GBHN yang dimaksud dengan karakteristik Manusia Indonesia Seutuhnya adalah "*serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan bangsa-bangsa lain dan dengan alam lingkungannya*".

Interpretasi dari Manusia Indonesia Seutuhnya dikemukakan oleh M. Alwi Dahlan (dalam Moeljarto, 1996;51-52), dengan membagi kualitas Manusia Indonesia Seutuhnya menjadi dua kategori karakteristik, yaitu kualitas fisik (KF)

dan kualitas non fisik (KNF). Kualitas fisik terdiri dari kesegaran jasmani, kesehatan, daya tahan fisik dan sebagainya. Sedangkan kualitas non fisik (KNF) terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

- a. Kualitas *kepribadian*, KNF pokok yang perlu ada pada setiap individu pembangunan (kecerdasan, kemandirian, kreativitas, ketahanan mental, keseimbangan antara emosi dan ratio);
- b. Kualitas *bermasyarakat*, keselarasan hubungan dengan sesama manusia.
- c. Kualitas *berbangsa*, tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara; kesadaran bahwa martabat Negara dan bangsanya sama dengan martabat dan bangsa dan Negara lain.
- d. Kualitas *spritual*, religiousitas dan moralitas.
- e. *Wawasan lingkungan*, kualitas yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dan
- f. Kualitas *kekaryaannya*, kemampuan mewujudkan aspirasi dan potensi diri dalam bentuk kerja nyata guna menghasilkan sesuatu dengan mutu sebaik-baiknya.

Kualitas sebagaimana digambarkan diatas kait mengkait dengan kualitas masyarakatnya. Kualitas manusia terbentuk di dalam konteks struktur masyarakatnya. Di dalam konsepsualisasi Alwi Dahlan, pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya menyangkut pembangunan berbagai dimensi kualitas yaitu :

- g. kehidupan bermasyarakat keserasian social, kesetiakawanan social, disiplin social, kualitas komunikasi social;
- h. kualitas kehidupan social politik; pelaksanaan kehidupan berdemokrasi; persamaan dan keterbukaan akses untuk memasuki jalur kehidupan politik; mekanisme kepemimpinan yang terbuka; sarana dan prasarana komunikasi politik yang terbuka dan berkualitas; media massa yang bebas dan bertanggung jawab;
- i. kualitas kehidupan berkelompok, kualitas yang menyangkut sub system dari system social;
- j. kualitas lembaga dan pranata kemasyarakatan; kemutakhiran dan keberlanjutan pranata; kemampuan institusi menumbuhkan

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan betapa para ahli / cendekiawan dan para negarawan melihat korelasi antara kualitas sumber daya manusia khususnya nilai-nilai kepribadian yang dimiliki dengan derajat keberhasilan pembangunan.

Koentjaraningrat (1981 ; 37-40) membedakan tentang kelemahan-kelemahan dalam mentalitas masyarakat Indonesia antara dua hal, yaitu :

- a. Konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita, yang sudah lama mengendap dalam pikiran alam pikiran kita, karena terpengaruh atau bersumber kepada system nilai budaya kita sejak beberapa generasi yang lalu.

- b. Konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita, yang baru timbul sejak zaman revolusi, dan yang sebenarnya tidak bersumber pada system nilai budaya kita.

Konsepsi *pertama* tentang mentalitas yang bersumber kepada system nilai budaya kita adalah :

- a. Manusia itu bekerja untuk dapat makan; konsep tersebut merupakan suatu hal yang tidak cocok dengan jiwa pembangunan, karena tidak bersumber kepada suatu nilai-budaya yang berorientasi terhadap hasil karya manusia itu sendiri (tidak *achievement oriented*), tetapi hanya mengejar amal dari karya (ibarat orang sekolah yang tidak mengejar ketrampilan yang diajarkan, tetapi hanya ijazahnya saja).
- b. Mempunyai persepsi waktu yang terbatas yang banyak ditentukan oleh masa lampau; orientasi yang terlampau banyak terarah ke zaman yang lampau akan melemahkan kemampuan seseorang untuk melihat ke masa depan. Hal ini sebaliknya melemahkan motivasi untuk menabung dan hidup hemat.
- c. Konsep mengenai pengaruh nasib yang amat kuat; mentalitas yang terlampau banyak menggantungkan diri pada nasib tidak cocok dengan jiwa pembangunan.
- d. Menilai tinggi konsep sama-rata-sama-rasa; segi negatifnya adalah konsep itu juga mewajibkan suatu sikap konformisme yang besar (artinya, orang

sebaiknya jangan dengan sengaja berusaha untuk menonjol di atas yang lain).

Sedangkan yang *kedua*, konsepsi, pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita, yang baru timbul sejak zaman revolusi, dan yang sebenarnya tidak bersumber pada system nilai budaya kita adalah :

- e. Sifat mentalitas yang meremehkan mutu; hal ini merupakan akibat hebat dari kemiskinan, sehingga kita tidak sempat memikirkan mengenai mutu dari pekerjaan yang dihasilkan dan mutu dari barang atau jasa yang kita konsumsi.
- f. Mentalitas yang suka menerabas; mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuan secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan secara langkah demi selangkah.
- g. Sifat tak percaya pada diri sendiri; merupakan suatu konsekuensi dari serangkaian kegagalan, terutama dalam bidang usaha pembangunan, yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam zaman post revolusi, sejak saat tercapainya kemerdekaan hingga sekarang.
- h. Sifat tak berdisiplin murni; hal ini disebabkan karena terlampau banyak berorientasi vertical kepada tokoh-tokoh atasan dan senior, akibatnya banyak orang yang berdisiplin karena takut akan pengawasan dari atas, pada saat pengawasan itu kendor atau tidak ada, maka hilanglah juga hasrat murni dalam jiwanya untuk secara ketat menaati peraturan atau berdisiplin.



- i. Sifat tak bertanggungjawab; sifat ini semakin memburuk terutama dalam hal perjanjian-perjanjian yang bersifat ekonomis. Sikap tak bertanggungjawab disebabkan kesukaran hidup, kemiskinan dan juga karena kurangnya kematangan watak.

Mengapa banyak pelaksana program / kebijakan memandang dan melaksanakan kebijakan berbeda dengan pembuat kebijakan ? Edward menyampaikan beberapa hal yang mempengaruhi sikap dari pelaksana program, yaitu staffing dan insentif. Staffing dilihat dari sistem perekrutan atau pengangkatan pelaksana program. Bagaimanakah orang-orang diangkat untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan, apakah telah diseleksi sehingga pelaksana terdiri dari individu-individu yang berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Karena seringkali pengangkatan pelaksana program adalah hasil dari BUGAT (*bunch of guys around the table*/ sekelompok pria disepular meja) bukan melalui suatu mekanisme yang mampu menghasilkan individu-individu yang berkompeten.

Apabila ditemukan sikap pelaksana program yang melaksanakan kebijakan berbeda dengan pembuat kebijakan, maka dilakukan transfer personalia, pensiun dini, dan mengesampingkan pelaksana yang berbeda pandangan tentang sebuah kebijakan namun seringkali ditemukan pelaksana program yang menentang keputusan tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Teknik potensial lain menurut Edwards hubungannya dengan masalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah dengan

pemberian atau peningkatan insentif. Karena orang pada umumnya bertindak dalam kepentingannya, dengan pemberian atau peningkatan insentif oleh pembuat kebijakan mungkin akan mempengaruhi berbagai sikap dari pelaksana. Pemberian penghargaan merupakan sisi lain dari insentif, dapat berupa promosi jabatan ataupun bonus khusus.

Dari uraian di atas, pada penelitian ini sikap dari pelaksana program akan dilihat dari keaktifan, dukungan dan kerelaan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pelaksana dalam berbagai tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif.

### **3. Koordinasi**

Dalam penelitian ini, koordinasi diturunkan dari variabel struktur birokrasi, dimana harus dapat diukur atau memiliki suatu variasi nilai tertentu untuk memenuhi tuntutan sebagai suatu variabel penelitian, oleh karena itu konsep ini dimaknai sebagai tingkat dukungan struktur birokrasi khususnya yang berkaitan dengan sub variabel koordinasi.

Unsur-unsur utama struktur birokrasi dikemukakan oleh Edward (1980;143) bahwa ada dua karakteristik penting dari variabel struktur birokrasi, yaitu (a) *Standart Operating Procedures (SOP's)* dan (b) *fragmentasi*. Dapat disebutkan bahwa SOP's berkaitan dengan unsur formalisasi sedangkan fragmentasi berkaitan koordinasi.

SOP's diadakan sebagai tanggapan atas keterbatasan waktu dan sumber daya serta keinginan akan keseragaman operasi dalam organisasi pelaksanaan yang sangat kompleks dan menyebar. Pelaksanaan suatu kebijakan publik sangat tergantung pada kejelasan dari standar prosedur tindakannya, yang bisa berwujud petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atau bentuk yang lain; karena dalam SOP's ini terdapat urutan tahapan pelaksanaan program sejak awal hingga akhir sehingga kegiatan implementasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, terutama dalam pemanfaatan sumber daya yang sangat terbatas.

Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab atas suatu area kebijakan. Tanggung jawab di pusat hanya terbatas pada pembinaan dan penyaluran bantuan pada daerah. Semakin banyak aktor dan lembaga yang terlibat dalam suatu kebijakan, dan semakin tinggi tingkat ketergantungan mereka dalam mengambil keputusan, maka semakin rendah kemungkinan implementasi kebijakan akan berlangsung dengan efektif. Sebagai suatu bagian dari fragmentasi organisasi, koordinasi di antara para pelaksana harus ada sebagai konsekuensi logis dari pemencaran wilayah tanggung jawab kebijakan di antara beberapa unit organisasi atau pelaksana.

R.H.P.W Kottman (dalam Hoogerwerf, 1983;52) mendefinisikan koordinasi sebagai penyesuaian satu sama lain dari berbagai kesatuan sehubungan dengan aktifitas-aktifitas masing-masing di suatu bidang tertentu. Dann Suganda (1988;12-13) menyatakan bahwa koordinasi juga dapat

diartikan sebagai penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau unit organisasi yang berbeda fungsinya agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian dengan efisien. Berdasarkan pembatasan koordinasi di atas maka dapat ditegaskan bahwa koordinasi merupakan proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari berbagai unit yang terpisah untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien.

Koordinasi mempunyai peranan yang penting dalam suatu organisasi, apabila organisasi dipandang sebagai suatu sistem atau suatu kesatuan yang bulat dari bagian-bagian (sub-sub sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang dan bergantung agar organisasi berjalan dengan lancar dalam mencapai tujuannya. Setiap unit dalam sistem walaupun mempunyai tugas dan sasaran, namun tiap unit tidak dapat melepaskan diri dari unit lainnya. Demikian halnya karena suatu unit tidak mungkin akan berfungsi dengan baik tanpa dibantu unit yang lain, dan tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan mendukung pelaksanaan fungsi unit lainnya bila seluruh unit organisasi ingin bergerak dengan lancar dan efektif melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuannya. Disinilah pentingnya prinsip-prinsip koordinasi untuk diterapkan dan diwujudkan dalam suatu usaha organisasi.

Koordinasi dapat juga diartikan sebagai penyatuan gerak yang menuntut adanya sikap dan perilaku tertentu dari orang-orang, kepala-kepala unit maupun kepala-kepala instansi tertentu yang terlibat dalam hubungan

kerjasama, baik sikap yang mengarahkan maupun sikap yang diarahkan atau dikoordinasikan. Inilah sebenarnya aspek penting sebagai syarat koordinasi. Sikap di atas hanya mungkin ada apabila setiap pihak benar-benar mengerti serta menghayati kedudukan dan fungsi koordinator. Dalam hal ini komunikasi yang efektif sangat penting diperlukan untuk membuka jalan ke arah saling pengertian. Menurut Panglaykim (1982;89-90) koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Koordinasi ialah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin. Berkaitan dengan hal ini, perlu diketahui tujuan diadakannya koordinasi menurut Siagian (1983;110), yaitu untuk :

1. Pencegahan konflik dan kontradiksi.
2. Pencegahan persaingan yang tidak sehat;
3. Pencegahan pemborosan;
4. Pencegahan kekosongan waktu;
5. Pencegahan terjadinya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan.

Jadi jelas bahwa koordinasi diperlukan sebagai alat untuk menyusun dan menetapkan rencana dan tindakan apa yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalankannya, sebagai mekanisme pengawasan.

Dalam rangka untuk lebih mengefektifkan fungsi dari koordinasi, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan menurut Sutarto, yaitu (1987;93):

1. Pembagian kerja yang jelas;
2. Pengembangan semangat kerjasama;

3. Tersedianya fasilitas kontak dan tata hubungan bagi semua pihak dalam organisasi;
4. Menciptakan tahap-tahap kegiatan dan kemudian mempertahankan sebagai suatu proses yang kontinyu.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas tentang koordinasi, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi sehingga dapat tersusun dan ditetapkan rencana dan tindakan apa yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalankannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka hendaknya dalam usaha untuk lebih mengefektifkan koordinasi diusahakan agar anggota kelompok mengajukan saran-saran melalui komunikasi langsung. Dengan jalan demikian dapat diharapkan bahwa setiap anggota dapat mengetahui pendirian serta masalah-masalah di antara mereka, sewaktu mereka menyumbangkan tenaga ke arah usaha mencapai tujuan. Setiap anggota akan mengetahui apa-apa yang dilakukan orang kepada bagian yang lain.

Dann Sugandha mengajukan beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam upaya menciptakan koordinasi yang baik, yaitu sebagai berikut (1988;47-48) :

1. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai;
2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya;
3. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan;

4. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya;
5. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama;
6. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator;
7. Adanya saling hormat-menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, Sugandha mengajukan beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menganalisa koordinasi antar unit dalam suatu organisasi, maupun antar instansi dalam administrasi pemerintahan yaitu struktur organisasi, rencana prosedur dan pengawasan (1988;83). Pendapat Sugandha tentang prinsip dan aspek koordinasi di atas dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan koordinasi dalam suatu kelompok kerja.

Secara khusus, Sugandha mengajukan beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui adanya koordinasi yang baik dalam suatu organisasi, yaitu sebagai berikut (1988;62):

1. Adanya komunikasi antara pimpinan dan bawahan;
2. Adanya partisipasi dari anggota-anggota organisasi;
3. Adanya tanggung jawab dari masing-masing individu terhadap tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa usaha koordinasi akan berhasil baik apabila ada suatu komunikasi yang jelas dan terbuka di antara para pelaksana, yang pada akhirnya akan mendorong mereka untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab pada pencapaian tujuan bersama.

Menurut Siagian, ada beberapa cara praktis atau operasional yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk menetapkan langkah-langkah

agar suatu rencana dan tindakan dapat terkoordinasikan dengan baik, yaitu (1983;111) :

1. Melakukan briefing staf untuk memberitahukan kebijaksanaan pimpinan organisasi kepada staf, yang dalam waktu sesingkat mungkin harus diketahui dan mendapat perumusan;
2. Rapat staf untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan atau sedang dilaksanakan oleh staf serta mengadakan kegiatan integrasi daripada hasil-hasil pekerjaan staf;
3. Mengumpulkan laporan-laporan mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi;
4. Mengadakan kunjungan serta inspeksi mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi serta memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi;
5. Pemeliharaan hubungan dalam berbagai bentuk demi meningkatkan keserasian kerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa koordinasi merupakan alat utama bagi organisasi untuk mempercepat proses pencapaian tujuan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi sehingga dapat tersusun dan ditetapkan rencana dan tindakan apa yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalankannya. Fokus penelitian diarahkan terhadap kerjasama antar Anggota BKM dan sarana koordinasi yang ada.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Perspektif Pendekatan Penelitian**

Strauss dan Corbin (1997) menyatakan bahwa minimal ada dua alasan perlunya melakukan penelitian kualitatif, yaitu *pertama*, karena sifat masalah itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian kualitatif dan *kedua*, karena penelitian ini yang dilakukan bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk menemukan sifat atau pengalaman seseorang dengan suatu fenomena yaitu pelaksanaan perencanaan partisipatif pada suatu program pemerintah yaitu P2KP, dimana keberhasilannya sangat tergantung pada adanya pengaruh dari kemampuan pelaksana, sikap dan koordinasi dari pelaksana itu sendiri yaitu para Anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai sebuah Kelembagaan Masyarakat yang bertanggungjawab secara langsung dalam pelaksanaan P2KP di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi, karena menurut Collin (1997 ; 111) fenomenologi mampu mengungkap obyek secara meyakinkan, meskipun obyek itu berupa kognitif,

maupun tindakan ataupun ucapan. Fenomenologi mampu melakukan itu karena segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang selalu melibatkan mental.

Sedangkan metode yang digunakan adalah *deskriptif*, menurut Nazir (1985 ; 65) adalah suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, set kondisi, sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Sementara Surakhmad (1994 ; 68) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang sifatnya menyelidiki permasalahan masa sekarang.

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Nasution, 1992 ; 31) dalam menentukan fokus penelitian kualitatif pada awalnya masalah yang akan diteliti masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah peneliti berada dalam lapangan. Fokus itu masih mungkin mengalami perubahan selama berlangsungnya penelitian itu.

Dengan perumusan fokus penelitian yang baik maka peneliti akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian serta untuk menghindari agar peneliti tidak terjebak pada bidang yang umum dan luas atau kurang relevan. Pada penelitian ini, fokus penelitiannya adalah menganalisis proses pelaksanaan perencanaan partisipatif

pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, dilihat dari pelaksanaan proses atau mekanisme perencanaan partisipatif dalam menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis, pemahaman dan keterlibatan masyarakat sasaran untuk mengikuti proses perencanaan partisipatif dan kemampuan organisasi pelaksana dalam melaksanakan perencanaan partisipatif dalam menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis.

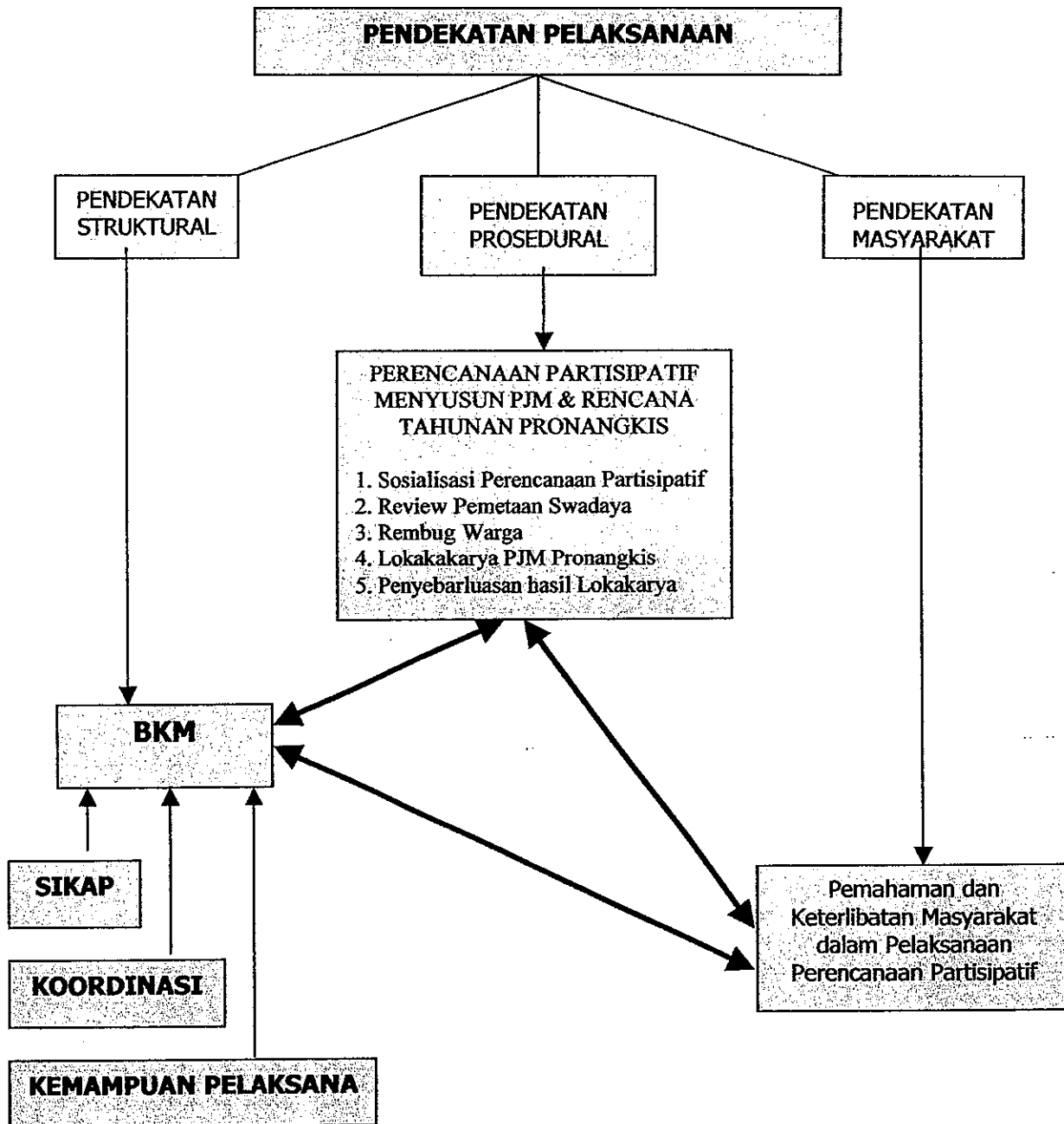
Fokus pada penelitian Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada P2KP sebagai berikut :

1. Dimensi Proses atau Mekanisme Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, yaitu dilihat melalui :
  - a. Sosialisasi Perencanaan Partisipatif.
  - b. Review Pemetaan Swadaya untuk perumusan masalah, potensi dan kebutuhan tingkat Rt/Rw.
  - c. Rembug warga pembahasan masalah, potensi dan kebutuhan penanggulangan kemiskinan tingkat Rt/Rw (penyepekatan gagasan).
  - d. Lokakarya PJM Pronangkis tingkat Desa.
  - e. Penyebarluasan hasil lokakarya tingkat Desa.
2. Dimensi Masyarakat Sasaran Program, yaitu dilihat dari :
  - a. Pemahaman terhadap Proses Perencanaan Partisipatif
  - b. Keterlibatan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif
3. Dimensi Organisasi Pelaksana, yaitu dilihat dari :

- a. Kemampuan pelaksana (Anggota BKM)
- b. Sikap
- c. Koordinasi

Gambar 6

FOKUS PENELITIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF PADA P2KP  
DI DESA PACUL KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL



### **C. Pemilihan Informan**

Rusidi (1993) mengemukakan bahwa responden adalah sejumlah orang yang dapat menerangkan tentang hal dirinya sendiri, sedangkan informan adalah sejumlah orang yang mampu menerangkan tentang diri orang lain atau keadaan tertentu. Informan adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian.

Informan dalam penelitian ini dipilih karena banyak mengetahui tentang pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan sehingga peneliti dapat merangkum informasi tentang domain-domain yang tercakup dalam fokus penelitian.

Dengan memperhatikan karakter informan tersebut, maka dalam proposal penelitian ini belum dapat diketahui jumlah informan yang dibutuhkan karena sangat tergantung pada proses perkembangan di lapangan. Namun demikian pada awal penelitian telah ditetapkan beberapa informan yang menurut peneliti merupakan orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui banyak tentang pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP, yaitu antara lain : Fasilitator Kelurahan, Kepala Desa, Anggota BKM, Staf Unit Pengelola, Tokoh Masyarakat dan Anggota Masyarakat.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Menurut Nasution (1992 ; 29) instrumen penelitian tidak bersifat eksternal atau obyektif, akan tetapi internal, subyektif yaitu peneliti sendiri tanpa menggunakan test, angket atau eksperimen. Instrumen dengan sendirinya tidak menggunakan definisi operasional.

Instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth-interview*), sedangkan untuk memandu dalam wawancara, peneliti menyiapkan panduan pertanyaan tentang hal-hal pokok yang ingin diketahui. Panduan ini untuk mempermudah peneliti dalam mengarahkan pembicaraan atau wawancara. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara tersebut semakin berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan seperti bola salju (*snow ball*). Alat bantu yang digunakan dalam metode wawancara ini adalah tape recorder dan catatan-catatan wawancara.

Pada awal penelitian hanya penelitalah alat satu-satunya. Ada kemungkinan hanya penelitalah merupakan instrumen atau alat sampai akhir penelitian. Namun setelah penelitian berlangsung selama waktu tertentu, dan apabila nanti diperoleh fokus yang lebih jelas, maka ada kemungkinan untuk mengadakan angket dan wawancara yang lebih berstruktur untuk memperoleh data yang lebih spesifik.

## **E. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

### **1. Jenis Data**

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, baik dari dokumen maupun publikasi yang menunjang pokok pembahasan penelitian.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif, menurut Nasution (1992 ; 32) yang dijadikan sampel sebagai sumber data hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Sampel dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Sumber data dari masing-masing jenis data yang akan dikumpulkan berasal dari informan, angket dan kepustakaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

1. Data primer berasal dari informan. Informan yang dipilih adalah Fasilitator Kelurahan, Anggota BKM dan Anggota Masyarakat yang pernah dan atau yang terlibat dalam penanganan obyek penelitian.
2. Data sekunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi terkait, hasil penelitian sejenis maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan penelitian.



### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Seperti telah disinggung dalam instrumen penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Sedangkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara maka sebelumnya peneliti menyiapkan panduan wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu ditanyakan atau diketahui peneliti. Selain teknik wawancara tersebut, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan mencari dokumen-dokumen atau data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian sebagai data sekunder.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mencatat ringkasan interpretasi peneliti atas hasil wawancara dan pengamatan serta catatan-catatan yang masih menjadi pertanyaan peneliti yang nantinya akan dikumpulkan atau diverifikasi dari informan lainnya.
- b. Mencatat dokumen-dokumen yang terkait dengan implementasi P2KP.
- c. Pencatatan data wawancara pada awal penelitian dilakukan dengan mencatat langsung pada daftar isian pedoman wawancara, namun selanjutnya menggunakan alat perekam (tape recorder).

- d. Pencatatan data sekunder dilakukan dengan meminjam data dimaksud selanjutnya dibuat ringkasannya di rumah peneliti.
- e. Mengelompokkan data yang telah terkumpul sesuai dengan kemanfaatannya dalam analisis data.
- f. Menganalisis data secara induktif analitik lebih lanjut dalam Teknik Analisis Data.

## **F. Analisa Data**

Penelitian kualitatif tidak memisahkan secara tegas antara pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu analisis data yang cocok digunakan adalah induksi analitik. Proses analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang terkumpul kemudian dilakukan pengumpulan data kembali, analisis dan seterusnya dilakukan secara berulang guna mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap fenomena.

Bogdan (dalam Muhadjiir, 2000;136) menyebutkan bahwa induksi analitik merupakan suatu pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang bertolak dari permasalahan, pertanyaan atau isu yang menjadi fokus penelitian. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengembangkan deskripsi penelitian. Analisis data harus segera dilaksanakan setelah dikumpulkan kemudian mengumpulkan data kembali sesuai dengan hasil analisis yang didapatkan.

Teknik analisis penelitian yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah analisis taksonomi. Menurut Bungin (2003;89) analisis taksonomi terfokus atau terbatas pada kategori tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena/fokus yang menjadi sasaran semula penelitian.

Menurut Usman dan Akbar (2001;86-87), langkah-langkah umum yang dilakukan dalam pengolahan dan analisis data adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu tahapan analisis data yang segera dilaksanakan setelah pengumpulan data dengan memilih hal-hal pokok yang terkait dengan fokus penelitian kemudian dicari tema atau kategori data dimaksud. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengumpulan data.

2. Display Data

Display data adalah penyajian data yang lebih sistematis seperti dalam bentuk *Network*, grafik, diagram alur dan sebagainya yang mempermudah peneliti memahami pola umum dari data atau informasi yang diperoleh.

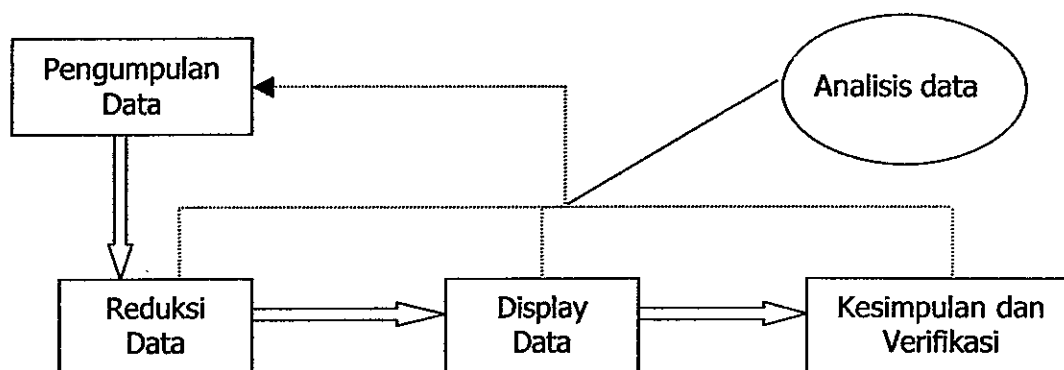
3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah memberi pemaknaan dari data yang diperoleh. Untuk ini sejak pengumpulan data awal, peneliti berusaha mencari makna data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal lain yang sering muncul. Pada

awalnya kesimpulan itu masih kabur tetapi semakin lama kesimpulan akan semakin jelas setelah dalam proses selanjutnya didukung oleh data yang semakin banyak. Verifikasi bertujuan untuk memperjelas kesimpulan dengan cara mengumpulkan data baru. Langkah-langkah pengumpulan dan analisis data dilaksanakan sebagaimana Gambar berikut :

**Gambar 7**

**Proses Pengumpulan Data dan Analisis Data**



Sumber : Diadaptasikan dari Usman dan Akbar, 2001

**BAB IV**

**GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

**DAN GAMBARAN UMUM P2KP**

**A. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

**1. KABUPATEN TEGAL**

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Letak geografisnya  $108^{\circ}57'6''$  sampai dengan  $109^{\circ}21'30''$  Bujur Timur dan antara  $6^{\circ}50'41''$  sampai dengan  $7^{\circ}15'30''$  Lintang Selatan, terletak di pesisir utara bagian barat Propinsi Jawa Tengah, dalam posisi strategis pada jalan perkembangan Semarang-Tegal-Cirebon serta Semarang-Tegal-Purwokerto-Cilacap dan perairan pantai utara laut Jawa dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebelah utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Pemalang, sebelah barat Kabupaten Brebes, sebelah selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu :

1. Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warurejo;

2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
3. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Wilayah Kabupaten Tegal beriklim tropis dengan dua musim bergantian sepanjang tahun yaitu musim penghujan dan kemarau. Dalam setahun curah hujan tertinggi berkisar pada bulan Februari sebesar 537,40 mm dan terendah sebesar 0 mm pada sekitar bulan Juli. Kelembaban udara rata-rata berkisar 77 persen, tertinggi terjadi pada bulan Februari dan yang terendah pada bulan Agustus dan September, tekanan udara minimum 1.009,10 Mb terjadi pada bulan April dan September sedangkan maximum sebesar 1.011,20 Mb terjadi pada bulan Juli dengan rata-rata 1.010,00 Mb.

Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.879 hektar yang berupa tanah sawah dan tanah kering. Luas tanah sawah pada tahun 2004 dengan menggunakan sistem pengairan sawah teknis seluas 29.198 hektar, irigasi ½ teknis seluas 1.704 hektar, irigasi sederhana seluas 3.790 hektar dan tadah hujan seluas 6.512 hektar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, jo PP Nomor 2 Tahun 1984 dan PP Nomor 7 Tahun 1986, pembagian wilayah administrasi dan bidang pemerintahan Kabupaten Tegal dibagi menjadi 18 Kecamatan

meliputi 281 Desa dan 6 Kelurahan, dari wilayah tersebut meliputi 931 Dusun, 1.343 RW dan 6.414 RT. Untuk lebih jelas pembagian jumlah desa dan kelurahan, berikut ditampilkan Tabel IV.1 tentang Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Tegal :

**Tabel 4**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Tegal**

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1.	Margasari	13	-
2.	Bumijawa	18	-
3.	Bojong	17	-
4.	Balapulang	20	-
5.	Pagerbarang	13	-
6.	Lebaksiu	15	-
7.	Jatinegara	17	-
8.	Kedungbanteng	10	-
9.	Pangkah	23	-
10.	Slawi	5	5
11.	Dukuhwaru	10	-
12.	Adiwerna	21	-
13.	Dukuhturi	18	-
14.	Talang	19	-
15.	Tarub	20	-
16.	Kramat	19	1
17.	Suradadi	11	-
18.	Warureja	12	-
	<b>JUMLAH : 18 Kecamatan</b>	<b>281 Desa</b>	<b>6 Kelurahan</b>

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2004

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Kecamatan Pangkah memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 23 Desa dan Kecamatan Slawi memiliki jumlah desa paling sedikit yaitu 5 Desa. Sedangkan sebanyak 6 kelurahan hanya terdapat pada dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Slawi sebanyak 5 kelurahan dan Kecamatan Kramat sebanyak 1 kelurahan.

Pada tahun 2004 penduduk Kabupaten Tegal telah mencapai 1.423.346 jiwa. Dari 18 Kecamatan di Kabupaten Tegal, Kecamatan Adiwerna merupakan kecamatan terbanyak jumlah penduduknya yaitu 121.138 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Margasari 99.615 jiwa dan Kecamatan Pangkah 99.146 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Kedungbanteng dengan jumlah penduduk sebanyak 41.560 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.2. tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Tegal, sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tegal**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Margasari	49.503	50.112	99.615
2.	Bumijawa	41.947	42.947	84.894
3.	Bojong	32.533	32.879	65.412
4.	Balapulang	42.458	42.426	84.884
5.	Pagerbarang	28.773	28.337	57.110
6.	Lebaksiu	40.412	42.691	83.103
7.	Jatinegara	28.164	28.332	56.496
8.	Kedungbanteng	20.571	20.989	41.560
9.	Pangkah	49.853	49.293	99.146
10.	Slawi	31.709	32.994	64.703
11.	Dukuhwaru	28.890	29.139	58.029
12.	Adiwerna	60.402	60.736	121.138
13.	Dukuhturi	47.199	46.468	93.667
14.	Talang	45.742	45.822	91.564
15.	Tarub	37.571	36.963	74.534
16.	Kramat	47.251	47.718	94.969
17.	Suradadi	43.559	46.216	89.775
18.	Warureja	31.412	31.335	62.747
	<b>JUMLAH</b>	<b>707.919</b>	<b>715.397</b>	<b>1.423.346</b>

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2004



Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki dengan sex ratio 98,96 persen, yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 98,96 penduduk laki-laki.

Peningkatan jumlah penduduk pada setiap tahunnya sudah secara pasti akan menyebabkan bertambahnya kepadatan penduduk. Berikut ditampilkan Tabel IV.3. tentang Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tegal :

**Tabel 6**  
**Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tegal**

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (km <sup>2</sup> / jiwa)
1.	Margasari	86,83	99.615	1.147
2.	Bumijawa	88,56	84.894	959
3.	Bojong	58,52	65.412	1.118
4.	Balapulang	74,91	84.884	1.133
5.	Pagerbarang	43,00	57.110	1.328
6.	Lebaksiu	40,95	83.103	2.029
7.	Jatinegara	79,62	56.496	710
8.	Kedungbanteng	87,62	41.560	474
9.	Pangkajene	35,51	99.146	2.792
10.	Slawi	13,89	64.703	4.658
11.	Dukuhwaru	26,30	58.029	2.206
12.	Adiwerna	23,89	121.138	5.077
13.	Dukuhturi	17,48	93.667	5.359
14.	Talang	18,39	91.564	4.979
15.	Tarub	26,82	74.534	2.779
16.	Kramat	38,94	94.969	2.467
17.	Suradadi	55,73	89.775	1.611
18.	Warureja	62,31	62.747	1.007
	<b>JUMLAH</b>	<b>879,79</b>	<b>1.423.346</b>	<b>1.620</b>

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2004

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Dukuhturi yaitu 5.359 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah pada Kecamatan Kedungbanteng dengan kepadatan sebesar 474 jiwa/km<sup>2</sup>.

Aspek pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan semakin cerdas yang selanjutnya akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk memenuhi segala fasilitas/sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di seluruh Kecamatan. Sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) beberapa kecamatan masih belum ada saranya yaitu Kecamatan Bumijawa, Pangerbarang dan Kedungbanteng.

Sarana pendidikan di Kabupaten Tegal, dapat terlihat pada tabel 7 berikut ini :

**Tabel 7**  
**Banyaknya Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal**

NO	KECAMATAN	TK		SD		SLTP		SMU / SMK	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Margasari	-	14	48	2	3	3	1	2
2.	Bumijawa	-	4	51	-	3	2	-	-
3.	Bojong	-	2	51	-	2	-	1	-
4.	Balapulang	-	8	52	-	2	3	1	1
5.	Pagerbarang	-	3	35	-	2	-	-	-
6.	Lebaksiu	-	12	42	-	2	2	-	4
7.	Jatinegara	-	4	34	-	2	2	-	1
8.	Kedungbanteng	-	4	25	-	1	1	-	-
9.	Pangkajene	-	19	58	-	2	2	1	2
10.	Slawi	1	18	45	1	2	2	5	6
11.	Dukuhwaru	-	3	35	-	1	1	1	2
12.	Adiwerna	-	23	40	1	2	2	2	5
13.	Dukuhturi	-	16	37	3	3	3	1	-
14.	Talang	-	20	47	8	4	4	-	3
15.	Tarub	-	13	45	-	2	2	-	2
16.	Kramat	-	22	47	3	2	2	1	-
17.	Suradadi	-	10	33	-	2	2	-	2
18.	Warureja	-	4	31	-	1	1	-	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>199</b>	<b>736</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>31</b>

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2004

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara umum sarana pendidikan di Kabupaten Tegal telah merata, hanya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang belum secara merata ada di wilayah Kabupaten Tegal, sedangkan di Ibu Kota Slawi jumlah SLTA terbanyak, yaitu SLTA Negeri 6 buah dan SLTA Swasta 5 buah.

Data lain dari gambaran umum Kabupaten Tegal adalah mengenai jumlah keluarga miskin yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 8**  
**Jumlah Keluarga Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal**

NO	KECAMATAN	KELUARGA MISKIN	STATUS KEMISKINAN	
			MISKIN SEKALI	MISKIN
1.	Margasari	6.655	3.224	3.431
2.	Bumijawa	10.648	8.878	1.770
3.	Bojong	6.348	5.498	850
4.	Balapulang	9.037	5.213	3.824
5.	Pagerbarang	6.328	2.657	3.671
6.	Lebaksiu	7.740	3.881	3.859
7.	Jatinegara	7.896	6.915	981
8.	Kedungbanteng	3.071	2.436	635
9.	Pangkah	5.414	2.301	3.113
10.	Slawi	2.685	600	2.085
11.	Dukuhwaru	2.930	1.176	1.154
12.	Adiwerna	4.313	2.218	2.096
13.	Dukuhturi	4.618	1.315	3.303
14.	Talang	4.384	2.175	2.209
15.	Tarub	3.226	2.352	874
16.	Kramat	3.915	2.051	1.864
17.	Suradadi	5.764	3.129	2.635
18.	Warureja	9.588	8.453	1.135
	<b>JUMLAH</b>	<b>104.561</b>	<b>65.072</b>	<b>39.489</b>

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2004

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah keluarga miskin yang terbanyak berada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bumijawa sebanyak 10.648 keluarga, kemudian Kecamatan Warureja sebanyak 9.588 keluarga dan Kecamatan Balapulang 9.038 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga miskin yang paling sedikit berada di Kecamatan Slawi yaitu 2.685 keluarga.

## **2. KECAMATAN TALANG**

Kecamatan Lebaksiu yang menjadi lokasi penelitian terletak di dataran rendah dengan ketinggian tanah 675 m diatas permukaan laut. Temperatur suhu udara maksimal 31,3°C dan minimal 23,7° C. Lokasi Kecamatan Lebaksiu berbatasan dengan wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kramat
- Sebelah Timur : Kecamatan Suradadi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tarub dan Dukuhturi
- Sebelah Barat : Kecamatan Dukuhturi

Kecamatan Lebaksiu berdasarkan rencana strategis Kabupaten Tegal tahun 2004-2009 termasuk dalam sub wilayah pembangunan I yang berpusat di Kecamatan Adiwerna dengan potensi meliputi pertanian, perdagangan industri menengah dan industri kecil.

Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Talang terbagi menjadi 19 Desa, 46 Dukuh, 357 RT, dan 76 RW. Untuk lebih jelasnya, berikut ditampilkan data tentang nama dan jumlah Desa, Dukuh, RT dan RW serta dilengkapi dengan jumlah Kepala Keluarga pada masing-masing desa yang ada di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

**Tabel 9**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Talang**

NO	DESA	DUKUH	RT	RW	JUMLAH KK
1.	Pegirikan		18	4	1.190
2.	Pekiringan		13	2	957
3.	Gembong Kulon	2	13	5	683
4.	Pasangan	4	14	4	851
5.	Langgen		14	3	552
6.	Bengle	3	24	3	844
7.	Dukuhmalang		11	2	583
8.	Pesayangan	5	18	2	1.199
9.	Kajen	8	20	5	735
10.	Kebasen	2	13	2	817
11.	Tegalwangi	7	25	7	1.179
12.	Talang	4	11	2	563
13.	Kaligayam	4	23	6	1.086
14.	Kaladawa	3	21	4	1.093
15.	Cangkring	3	20	4	877
16.	Dawuhan		24	6	882
17.	Getaskerep		20	4	749
18.	Pacul		32	7	1.277
19.	Wangandawa	1	22	5	1.010
	<b>Jumlah : 19 Desa</b>	<b>46</b>	<b>357</b>	<b>76</b>	<b>17.127</b>

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2004

Dari tabel 9 di atas, dapat terlihat bahwa tidak semua desa di Kecamatan Talang memiliki Dukuh, dari 19 Desa ada 7 Desa yang tidak memiliki Dukuh. Desa Tegalwangi mempunyai Dukuh yang paling banyak yaitu 7 Dukuh. Pembagian RW yang paling banyak 7 RW yaitu di Desa Pacul dan Desa Tegalwangi. Sedangkan jumlah RT dan Kepala Keluarga yang paling banyak di Desa Pacul yaitu sebanyak 32 RT dengan Kepala Keluarga sebanyak 1.277 KK.

Kecamatan Talang sebagian besar wilayahnya mempunyai potensi pertanian antara lain di Desa Wangandawa, Desa Getaskerep, Desa Cangkring dan Desa Kaladawa. Sedangkan jenis produk pertanian yang dikembangkan antara lain, padi, jagung, sayur mayur, kacang tanah dan tebu. Adapun secara keseluruhan penggunaan tanah di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal terbagi atas tanah sawah dan tanah kering, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 10**  
**Luas Wilayah Kecamatan Talang menurut Jenis Penggunaan Tanahnya**

NO	JENIS TANAH	LUAS TANAH (Ha)
1.	TANAH SAWAH	
	a. Irigasi Teknis	957
	b. Irigasi ½ Teknis	72
	c. Irigasi Sederhana	-
	d. Tadah Hujan	36
	Jumlah	1.065
2.	TANAH KERING	
	a. Pekarangan / Bangunan	651
	b. Tegalan / Huma	16
	c. Padang Rumput	-
	d. Tambak	-
	e. Kolam / Empang	-
	f. Tidak diusahakan	-
	g. Hutan Rakyat	-
	h. Hutan Negara	-
	i. Perkebunan	-
	j. Tanah Lainnya	107
	Jumlah	774
	Jumlah Tanah Sawah + Tanah Kering	1.839

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2004

Pada data tabel di atas, terlihat bahwa dari keseluruhan tanah yang ada di Kecamatan Talang seluas 1.839 hektar, penggunaan tanah sawah lebih banyak daripada tanah kering, yaitu 1.065 hektar untuk tanah

sawah dan 774 hektar untuk tanah kering. Untuk tanah sawah paling banyak menggunakan irigasi teknis yaitu seluas 957 hektar. Sedangkan untuk tanah kering, yang paling banyak digunakan untuk pekarangan/bangunan yaitu 651 hektar.

Untuk mengetahui lebih jauh karakteristik penduduk Kecamatan Talang pada masing-masing Desa dilihat dari komposisi jumlah penduduk dan jenis kelamin, dapat dilihat pada data dalam tabel berikut :

**Tabel 11**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Talang**

NO	DESA	PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pegirikan	3644	3388	7032
2.	Pekiringan	2560	2512	5072
3.	Gembong Kulon	1932	1863	3795
4.	Pasangan	1963	1897	3860
5.	Langgen	1588	1678	3266
6.	Bengle	2391	2452	4843
7.	Dukuhmalang	1742	1652	3394
8.	Pesayangan	3124	3351	6475
9.	Kajen	2214	2256	4470
10.	Kebasen	2034	2110	4144
11.	Tegalwangi	3287	3321	6608
12.	Talang	1754	1748	3502
13.	Kaligayam	2705	2694	5399
14.	Kaladawa	2814	2932	5746
15.	Cangkring	2471	2503	4974
16.	Dawuhan	2475	2466	4941
17.	Getaskerep	1932	1974	3906
18.	Pacul	2906	3057	5963
19.	Wangandawa	2674	2699	5373
	JUMLAH	46210	46553	92763

Sumber : Kecamatan Talang Dalam Angka Tahun 2004

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Pegirikan yaitu sebanyak 7.032 jiwa,



demikian pula untuk jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Pegirikan yang paling banyak yaitu masing-masing sebanyak 3644 laki-laki dan 3388 perempuan. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Desa Langgen yaitu sebanyak 3.266 jiwa, begitu pula untuk jumlah laki-laki dan perempuan yang paling sedikit berada di Desa Langgen, yaitu masing-masing 1.588 laki-laki dan 1.678 perempuan.

**Tabel 12**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Talang**

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	JUMLAH KEPALA KELUARGA MISKIN
1.	Pegirikan	1962	385
2.	Pekiringan	2322	452
3.	Gembong Kulon	3578	456
4.	Pasangan	254	82
5.	Langgen	396	98
6.	Bengle	3652	587
7.	Dukuhmalang	2254	257
8.	Pesayangan	236	74
9.	Kajen	257	93
10.	Kebasen	195	68
11.	Tegalwangi	2578	357
12.	Talang	236	98
13.	Kaligayam	204	72
14.	Kaladawa	257	532
15.	Cangkring	214	76
16.	Dawuhan	168	67
17.	Getaskerep	1024	224
18.	Pacul	1245	338
19.	Wangandawa	235	68
	<b>JUMLAH</b>	<b>22267</b>	<b>4384</b>

Sumber : Kecamatan Talang Dalam Angka Tahun 2004

Pada tabel 12 terlihat data tentang penduduk miskin dan kepala keluarga miskin pada masing-masing desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Jumlah penduduk miskin dan kepala keluarga miskin yang palig

banyak berada di Desa Benge, penduduk miskin sebanyak 3.652 jiwa dan kepala keluarga miskin sebanyak 587 KK. Sedangkan jumlah penduduk miskin dan kepala keluarga miskin yang paling sedikit berada di Desa Dawuhan yaitu sebanyak 168 jiwa dan 67 KK.

Dari 19 Desa di Kecamatan Talang yang mendapatkan dana bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebanyak 8 Desa yaitu Desa Pacul, Kaladawa, Kaligayam, Pesayangan, Tegalwangi, Benge, Gembongkulon, dan Pegirikan.

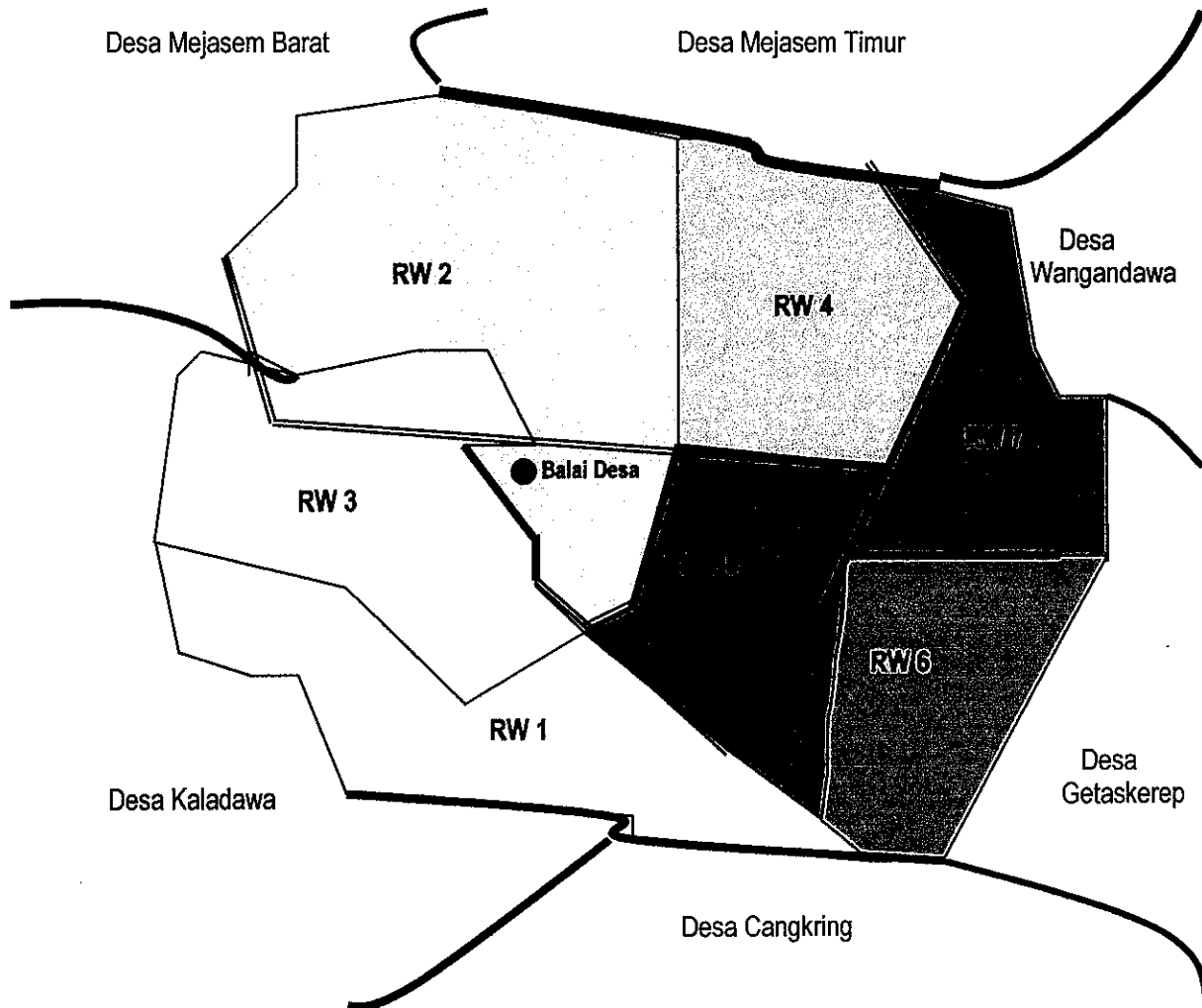
### **3. DESA PACUL**

Desa Pacul Kecamatan Talang, merupakan salah satu desa dari 8 (delapan) desa yang mendapatkan alokasi dana P2KP I Tahap II, atau 1 (satu) dari 40 desa di Kabupaten Tegal, dengan jumlah penduduk 5963 Jiwa yang terdiri dari 2906 laki-laki dan 3057 perempuan dengan luas wilayah 150.108 ha, sebelah utara perbatasan dengan desa Mejasem, sebelah barat desa Kademangaran sebelah selatan desa Getaskerep dan sebelah Timur dengan desa Wangandawa.

Bersumber dari data monografi desa tahun 2004, pemanfaatan lahan kering desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal antara lain : Pemukiman 37,747 Ha, Tegalan /Sawah 107.403 ha., fasilitas umum 4.600 Ha, lain lain : 0 ha.

Adapun lokasi masing-masing RW dapat dilihat pada peta Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal berikut ini :

**GAMBAR 8**  
**PETA DESA PACUL KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL**



Sumber : Kantor Pemerintah Desa Pacul

Desa Pacul terbagi dalam 7 RW 32 RT dengan rata rata penduduk 35 KK. Adapun pembagian RW dan RT di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 13**  
**Pembagian RW dan RT di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal**

RW	RT	RW	RT
RW 1	RT 1 RT 2 RT 3 RT 4	RW 5	RT 13 RT 18 RT 19 RT 20 RT 21
RW 2	RT 5 RT 6 RT 7 RT 8	RW 6	RT 22 RT 23 RT 24 RT 25 RT 26 RT 27
RW 3	RT 9 RT 10 RT 11 RT 12	RW 7	RT 28 RT 29 RT 30 RT 31 RT 32
RW 4	RT 14 RT 15 RT 16 RT 17		

Sumber : Kantor Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pada RW 1, RW 2, RW 3 dan RW 4 masing-masing memiliki 4 RT, sedangkan RW 5 dan RW 7 memiliki 5 RT dan RW 6 memiliki 6 RT.

Untuk mengetahui banyaknya jumlah penduduk usia produktif, maka dapat dilihat pada data dalam Tabel 14 berikut ini :

**Tabel 14**  
**Jumlah Penduduk Dilihat Dari Tingkatan Umur**

No	U s i a	Jumlah Penduduk	
		Jiwa	Persen (%)
1	01 - 06	1837	31
2	07 - 12	467	8
3	13 - 18	916	15
4	19 - 24	474	8
5	25 - 50	1365	23
6	51 - 75	654	11
7	75 Th ke atas	250	4
	Jumlah	5963	100

Sumber : Data Monografi Desa Pacul

Dengan melihat tabel diatas maka bisa kita lihat bahwa 46 % dari jumlah penduduk desa Pacul usia produktif atau angkatan kerja sehingga banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan asli desa jika pemerintahan desa dapat melihat bahwa banyak potensi yang bisa dimanfaatkan.

Karakteristik penduduk Desa Pacul yang mendukung perkembangan Desa selain dilihat dari usia produktif, dapat pula dilihat dari tingkat pendidikannya. Pada tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk Desa Pacul dilihat dari tingkatan pendidikannya :

**Tabel 15**  
**Jumlah Penduduk Dilihat Dari Tingkatan Pendidikan**

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak tamat SD	796	17,70
2	Sekolah dasar	3.182	70,73
3	Sekolah lanjutan Pertama	369	8,20
4	Sekolah lanjutan atas	119	2,64
5	Akademi/ Perguruan	3	0,07
6	Strata I	30	0,67
	Jumlah	4.499	100

Sumber : Data Monografi Desa Pacul

Jika dilihat dari tabel diatas maka 99,26% penduduk usia angkatan kerja berpendidikan SLTA kebawah sedangkan 0,74% lainnya untuk Akademi dan S I, dan belum ada penduduk yang berpendidikan S II, S III. Meskipun ada beberapa persen berpendidikan akademi dan S-1 yang seharusnya sebagai motor penggerak, tetapi keaktifan serta kepedulian mereka terhadap kegiatan-kegiatan desa sangat terbatas, ditambah dengan keberadaan mereka lebih senang diluar daerah.

Rumah tempat tinggal sejumlah 1084 buah dengan rincian sebagai berikut : Permanen 1074 unit, Tidak permanen : 10 Unit, sedangkan rumah yang mempunyai sambungan listrik 837 unit, serta yang memiliki sambungan air bersih 1 Unit, dan rata-rata satu rumah tinggal dihuni oleh 4 Jiwa.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

a. Sosial

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak organisasi-organisasi sosial (Ikatan Remaja Masjid, Karangtaruna, Jami'ahan, Olah Raga dll)</li> <li>- Organisasi-organisasi sosial yang ada cukup hidup dan banyak warga yang terlibat didalamnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembelian togel</li> <li>- Banyaknya Pengangguran</li> <li>- Banyaknya anak yatim</li> <li>- Janda dan jompo yang kurang mendapatkan perhatian</li> </ul>

b. Ekonomi

Kekuatan	Kelemahan
<p>Aneka ragam home industri ada di Desa Pacul (yang utama adalah bordir dan konveksi serta usaha meuble, Makanan, dan alat-alat besi atau bengkel las) Letak desa Pacul yang hampir berbatasan dengan Kota Tegal yang memudahkan mobilitas dan pemasaran produk Memiliki lahan sawah yang luas (130 Ha)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi Home Industri khususnya makanan kurang mampu mengakses modal</li> <li>2. Kualitas produk dari besi kurang</li> </ol>

Kegiatan sosial keagamaan di Desa Pacul berjalan sangat baik, hampir 100% warga Desa Pacul beragama Islam dengan komposisi keikutsertaan pada organisasi keagamaan Desa Pacul bagian barat sebagian besar penduduknya aktif pada organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan Desa Pacul bagian timur sebagian besar penduduknya aktif pada organisasi keagamaan Muhammadiyah.

Fasilitas umum yang ada di Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut :

- a. Masjid dan Mushola 10 buah, masjid 3 buah
- b. Lapangan olah raga ( badminton, 1 tempat, volley 1 tempat )
- c. Pendidikan ( SD 4 unit, MI 2 unit, TK 3 unit, TPA 2 unit )
- d. Posyandu 2 Tempat

Di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, sarana dan prasarana yang ada masih belum lengkap dan beberapa yang ada kondisinya sudah tidak baik. Berikut tabel 16 tentang data sarana dan prasarana di Desa Pacul dan dengan kondisinya sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Sarana Dan Prasarana di Desa Pacul**

No	Sarana dan Prasaran	Kondisi	
		Baik	Tidak Baik
1	Jalan Lingkungan	4.000 meter	0
2	Jalan Setapak	0	2.000 meter
3	Kran Umum Air Bersih	1 unit	0
4	Saluran Drainase	150 meter	150 meter
5	Gerobak Sampah	0	0
6	MCK Umum	0	0

Sumber : Base Line Data Tim 2 P2KP Kabupaten Tegal

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal memiliki jalan lingkungan sepanjang 4.000 meter masih dalam kondisi baik dan memiliki jalan setapak sepanjang 2.000 meter dalam kondisi tidak baik. Desa Pacul hanya memiliki 1 unit kran umum air bersih. Saluran drainase ada 300 meter dimana yang 150 meter dalam kondisi masih baik sedangkan 150 meter lain dalam kondisi tidak baik. Sarana dan prasarana yang belum tersedia di Desa Pacul adalah Gerobak sampah dan MCK Umum.

Desa Pacul merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), hal tersebut dapat diartikan bahwa penduduk di Desa Pacul masih banyak yang berada dalam kondisi yang miskin. Berdasarkan hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh Tim pemetaan swadaya, bersama-sama kader, dan para relawan, ditemukan bahwa jumlah penduduk miskin desa Pacul kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah : 338 KK yang tersebar dalam 7 RW 32 RT. Secara rinci bisa dilihat pada rekap hasil pemetaan swadaya Desa Pacul terlampir. Pada data dalam tabel 17 berikut akan terlihat jumlah kepala keluarga miskin yang tersebar pada masing-masing RW di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.



**Tabel 17**  
**Jumlah Keluarga Miskin di Desa Pacul**

No	RW	RT	Jumlah KK Miskin
1	RW 1	RT 1	13
		RT 2	15
		RT 3	4
		RT 4	7
		<i>Jumlah</i>	49
2	RW 2	RT 5	9
		RT 6	4
		RT 7	10
		RT 8	10
		<i>Jumlah</i>	33
3	RW 3	RT 9	6
		RT 10	5
		RT 11	5
		RT 12	9
		<i>Jumlah</i>	25
4	RW 4	RT 14	12
		RT 15	16
		RT 16	23
		RT 17	8
		<i>Jumlah</i>	59
5	RW 5	RT 13	4
		RT 18	5
		RT 19	4
		RT 20	4
		RT 21	1
		<i>Jumlah</i>	18
6	RW 6	RT 22	21
		RT 23	7
		RT 24	18
		RT 25	17
		RT 26	14
		RT 27	12
		<i>Jumlah</i>	89
7	RW 7	RT 28	12
		RT 29	10
		RT 30	11
		RT 31	18
		RT 32	14
		<i>Jumlah</i>	65
<b>Jumlah seluruhnya</b>			<b>338</b>

Sumber : Hasil Tim Pemetaan Swadaya Desa Pacul

Pada tabel 17 tersebut, dapat terlihat data yang menggambarkan jumlah kepala keluarga miskin pada masing-masing RT di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Rumah tinggal keluarga miskin tersebut pada umumnya semi permanen dan ada pula yang kondisinya tidak layak. Keluarga miskin di Desa Pacul cukup merata, karena di semua RT dan RW selalu ada kepala keluarga miskin.

Jumlah kepala keluarga miskin yang terbanyak berada di RW 6 yaitu sebanyak 89 KK, sedangkan yang paling sedikit berada di RW 5 yaitu sebanyak 18 KK. Untuk tingkat RT, jumlah kepala keluarga miskin yang paling banyak berada di RT 16 RW 4 yaitu sebanyak 16 KK, sedangkan yang paling sedikit berada di RT 21 RW 5 yaitu hanya 1 KK.

Kepala keluarga miskin sebanyak 338 di Desa Pacul, rata-rata sudah pernah terlibat dalam program pengentasan kemiskinan lain, seperti raskin dan IDT, tetapi ada beberapa yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan.

## **B. GAMBARAN UMUM P2KP**

Proses penanganan P2KP diawali dengan serangkaian kegiatan orientasi pemahaman substansi P2KP kepada pihak pelaksana P2KP mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan, baik pemerintah, konsultan maupun fasilitator. Hal ini dimaksudkan agar semua komponen pelaku maupun pihak yang terkait dapat terlebih dahulu memahami secara utuh dan memiliki persepsi yang sama mengenai visi, misi, tujuan, strategi, prinsip dan nilai serta mekanisme pelaksanaan P2KP, sebelum proyek P2KP benar-benar direalisasikan di lapangan atau di masyarakat.

### **1. Struktur Pelaksana P2KP**

Struktur Organisasi P2KP menggambarkan pola penanganan proyek secara menyeluruh dari pusat sampai daerah, terdiri unsur-unsur :

#### **a. Pemerintah**

##### **1) Tingkat Pusat**

Secara nasional lembaga penyelenggara proyek P2KP adalah Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, untuk kelancaran tugas membentuk PMU (Project Management Unit). PMU didukung oleh Tim Pengarah Inter Departemen, yang terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain Bappenas, DepKimpraswil, Depdagri, Depkeu dan Kantor Menko Kesra/Komite Penanggulangan Kemiskinan.

## 2) Tingkat Propinsi

Pemerintah Propinsi berperan memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya. Penanggungjawab pelaksanaan P2KP di Tingkat Propinsi adalah Bappeda Propinsi, yang untuk kelancaran tugasnya membentuk tim koordinasi antar instansi terkait di tingkat propinsi.

## 3) Tingkat Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota berperan menjamin kelancaran P2KP di wilayah kerjanya. Penanggungjawab pelaksanaan P2KP di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bappeda Kabupaten/Kota, yang untuk kelancaran tugasnya membentuk tim koordinasi antar instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota.

## 4) Tingkat Kecamatan

Di Tingkat Kecamatan, unsur yang masuk dalam pelaksanaan P2KP adalah Camat dan perangkatnya serta Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

## 5) Tingkat Kelurahan/Desa

Secara umum peran utama Kepala Kelurahan dan Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui P2KP dapat tercapai dengan baik. Untuk itu Lurah/Kepala Desa dapat

mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing.

b. Konsultan Pelaksana

1) Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

KMP berkedudukan di pusat dengan tugas utama melaksanakan tugas-tugas PMU dalam pelaksanaan P2KP utamanya dalam pengendalian mutu yang menyangkut substansi. KMP bertanggungjawab kepada PMU mengenai keseluruhan pelaksanaan P2KP. KMP melakukan perencanaan, koordinasi, supervisi dan monitoring (pengendalian) terhadap tugas yang dilaksanakan oleh seluruh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW).

2) Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)

Tugas utama KMW adalah melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan koordinasi, monitoring, supervisi dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan P2KP di Satuan Wilayah Kerja (SWK).

3) Tim Fasilitator

Tugas utama Tim Fasilitator adalah melaksanakan tugas KMW di tingkat komunitas/masyarakat, yaitu :

(a) Sebagai pelaksana proyek termasuk mencatat setiap perkembangan proyek dan melaporkannya ke KMW.

(b) Sebagai pemberdaya masyarakat termasuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang P2KP, melakukan intervensi dalam

rangka pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

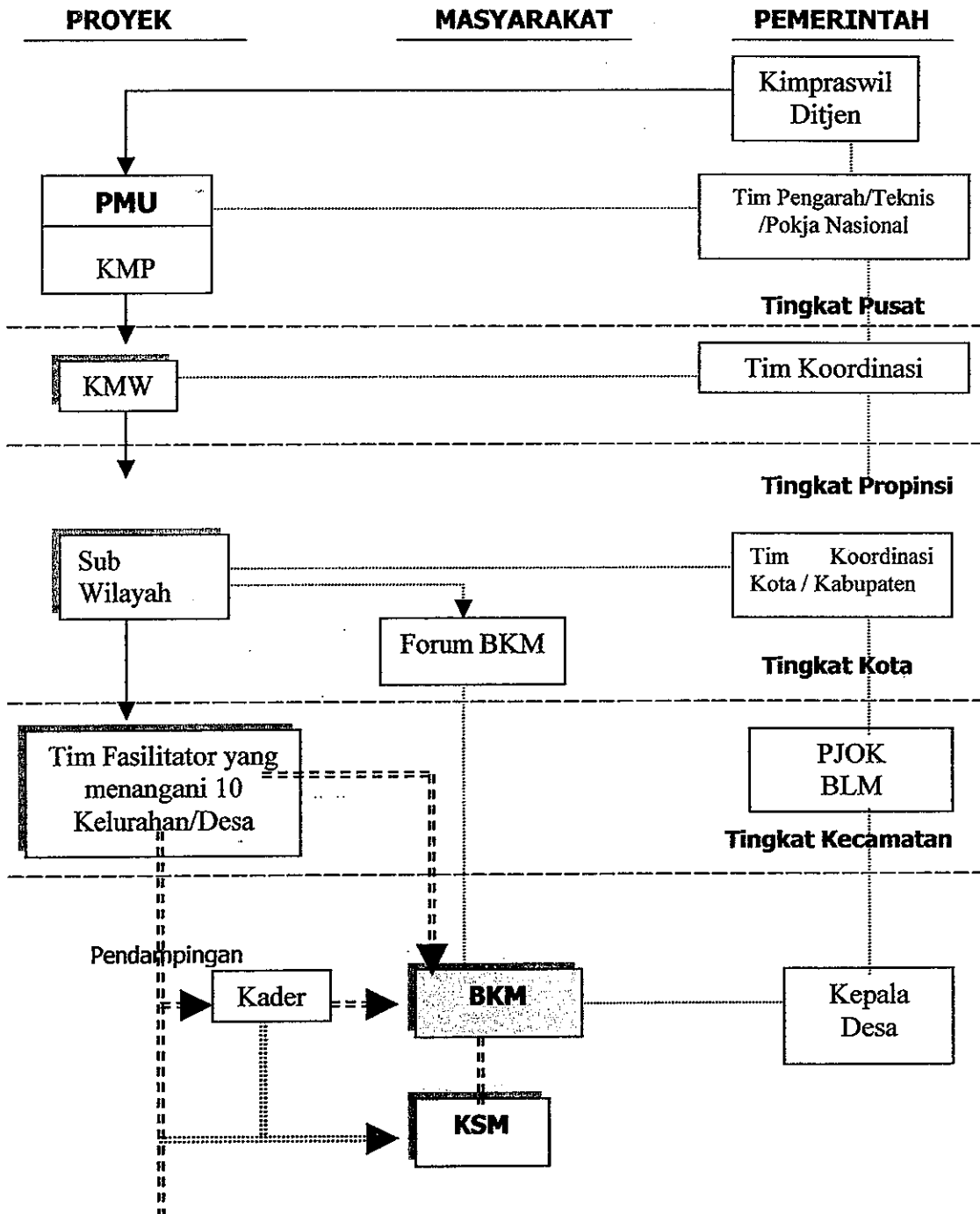
c. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

BKM adalah organisasi masyarakat warga yang dibangun dalam P2KP yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga. Peranan yang harus dilakukan oleh BKM dalam kerangka pelaksanaan P2KP di masyarakat adalah :

- 1) Mengorganisasi warga secara partisipatif untuk merumuskan Perencanaan Jangka Menengah (3 tahun) Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis).
- 2) Bertindak sebagai forum pengambilan keputusan masyarakat untuk hal-hal yang menyangkut penanggulangan kemiskinan.
- 3) Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 4) Mengembangkan jaringan BKM di tingkat Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya.
- 5) Mengawasi proses pemanfaatan dana masyarakat (BLM) yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

Berikut Bagan Struktur Organisasi P2KP sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Umum P2KP :

Gambar 9  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI P2KP



## **2. Tahapan Pelaksanaan P2KP**

Pelaksanaan komponen pengembangan masyarakat ini pada dasarnya mencakup beberapa kegiatan utama yaitu : Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM); Refleksi Kemiskinan (RK); Pemetaan Swadaya (PS); Pengorganisasian Masyarakat (Pembentukan BKM); Perencanaan Partisipatif (PP) dan Pengorganisasian Kelompok (Pembentukan KSM).

Keenam kegiatan utama tersebut secara rinci diuraikan berikut ini.

### **a. Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)**

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) adalah serangkaian rembug/rapat warga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan/desa bekerjasama dengan Tim Fasilitator mulai di tingkat RT atau RW sampai dengan tingkat kelurahan/desa, dengan mengundang semua warga kelurahan secara terbuka. Rembug warga ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari proses partisipatif dalam rangka membangun kesepakatan masyarakat di calon lokasi kelurahan sasaran untuk menetapkan kesiapan atau ketidaksiapan warga melaksanakan P2KP yang menjadi niat masyarakat itu sendiri dan memilih para calon Kader Masyarakat.

Hal ini dimaksudkan agar keputusan tentang kesiapan masyarakat di kelurahan sasaran tidak hanya ditetapkan oleh



perangkat kelurahan atau tokoh-tokoh masyarakat, namun melibatkan representasi sebagian besar masyarakat. Proses membangun kesiapan masyarakat dilakukan melalui serangkaian rembug-rembug warga di calon kelurahan sasaran, mulai dari tingkat masyarakat akar rumput hingga tingkat kelurahan yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator. Sebelum rembug warga dilaksanakan, Tim Fasilitator harus terlebih dahulu melakukan persiapan sosial dengan mengadakan pendekatan ke para pelaku kunci di kelurahan yang bersangkutan yang diperkirakan dapat membantu keberhasilan rembug warga tersebut.

Pada saat pelaksanaan rembug-rembug warga tersebut, Fasilitator disampaikan penjelasan tentang prinsip, substansi, serta ketentuan P2KP kepada masyarakat, sehingga keputusan yang ditetapkan masyarakat didasarkan pada pemahaman P2KP yang memadai. Fasilitator juga wajib memfasilitasi masyarakat setempat untuk menetapkan kriteria dan melakukan pemilihan relawan-relawan yang akan diusulkan menjadi kader masyarakat. Dalam memfasilitasi masyarakat menetapkan kriteria dan memilih kader masyarakat maka Fasilitator harus mampu menekankan kriteria yang menjadi perwujudan dari sifat baik manusia.

Di tingkat kelurahan rembug warga sudah harus memutuskan kesiapan atau ketidaksiapan untuk berpartisipasi

aktif dalam P2KP. Apabila masyarakat tidak siap, maka Fasilitator (cq. KMW) sesegera mungkin melaporkan ke PMU P2KP untuk membatalkan kelurahan/desa bersangkutan sebagai lokasi sasaran P2KP. Sedangkan bila masyarakat menyatakan kesiapannya, maka warga masyarakat melalui Lurah/Kades masing-masing menyampaikan :

- \* Surat Pernyataan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam proyek P2KP
- \* Surat Pengusulan calon kader masyarakat yang telah dipilih sebanyak 3-5 orang, yang diharapkan bahwa sepertiga dari jumlah tersebut adalah wanita.
- \* Surat Permohonan bantuan teknis kepada KMW.

Secara umum, tujuan diadakannya proses persiapan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat sadar perlunya proyek ini, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan serta berkelanjutan. Selain itu diharapkan pula melalui rembug warga ini akan meningkatkan pemahaman peran dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku P2KP, baik ditataran pemerintah, konsultan dan masyarakat di tingkat kelurahan.

Adapun secara rinci tujuan tersebut adalah:

- Internalisasi substansi P2KP sejak dini kepada masyarakat bahwa dalam pelaksanaan P2KP akan senantiasa bertumpu pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan masyarakat sendiri secara demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel;
- Menumbuhkan "Rasa Memiliki" ( *Sense of Ownership*), karena Masyarakat memutuskan sendiri secara sadar untuk terlibat dalam pelaksanaan P2KP;
- Mencegah adanya pihak-pihak tertentu yang "mengklaim" paling berjasa atas ditetapkannya Desa/Kelurahan tertentu sebagai lokasi sasaran P2KP;
- Terpilihnya kader-kader masyarakat yang berasal dari relawan-relawan terbaik dari kelurahan bersangkutan yang dipilih langsung oleh masyarakat.
- Masyarakat paham dan bersedia memenuhi proses, ketentuan, prinsip dan nilai P2KP.

#### **b. Refleksi Kemiskinan (RK)**

Refleksi Kemiskinan adalah suatu bentuk pendalaman mengenai suatu topik dengan melibatkan mental, rasa dan karsa secara terstruktur untuk membangun kesadaran kritis peserta refleksi (masyarakat) mengenai kemiskinan dan kaitannya dengan pola perilaku dan pola pikir sehari-hari masyarakat setempat.

Kesadaran kritis ini penting sebelum akhirnya masyarakat menyepakati bagaimana sebaiknya P2KP dilaksanakan, serta menyepakati bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat miskin dan termiskin bersama komponen masyarakat lainnya dalam memanfaatkan akses peluang yang ada di P2KP untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang akan mereka lakukan. Refleksi kemiskinan ini dapat dilakukan dengan metoda DKT atau DPT atau kombinasi keduanya.

Refleksi Kemiskinan ini pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk melakukan penjajagan sekaligus mengidentifikasi perkara-perkara (*issue*) kemiskinan di lokasi kelurahan sasaran berdasarkan persepsi dan aspirasi dari masyarakat, khususnya masyarakat miskin setempat. FGD Refleksi kemiskinan ini pada hakekatnya mengandung dua sisi; sisi pertama berorientasi pada upaya mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam merumuskan karakteristik dan persoalan kemiskinan yang dihadapinya, dan sisi kedua sebagai proses pembelajaran masyarakat untuk mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinannya serta peluang mengakses potensi untuk menanggulangi kemiskinan melalui P2KP. Refleksi kemiskinan sekaligus juga sebagai orientasi awal bagi masyarakat untuk memahami bahwa P2KP bertumpu pada kondisi

karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah sasaran. Hal ini mutlak perlu dilakukan mengingat seringkali terjadi berbagai proyek kemiskinan yang dilaksanakan tidak mampu menyentuh langsung lapisan kelompok masyarakat akar rumput, yakni masyarakat miskin dan termiskin (kelompok masyarakat rentan) yang pada dasarnya disebabkan oleh model pendekatan struktural dan formalitas, yang berasumsi bahwa tokoh-tokoh masyarakat formal dinilai telah merepresentasikan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin. Akibatnya akses informasi, keterlibatan dan kemanfaatan program-program kemiskinan tersebut lebih banyak didominasi oleh sekelompok kecil masyarakat di kelurahan tersebut.

Pada sisi lain, seringkali juga terjadi adanya proyek kemiskinan yang hanya menjadi kegiatan masyarakat miskin itu sendiri, tanpa atau kurangnya dukungan dari potensi segenap komponen masyarakat lainnya. Kedua kondisi demikian mengindikasikan masih lemahnya gerakan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Berdasarkan pengalaman tersebut maka P2KP menekankan perlunya Refleksi Kemiskinan sebelum kegiatan-kegiatan lainnya.

Refleksi Kemiskinan (RK) harus dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dari berbagai lapisan sosial dan ekonomi, dari rakyat jelata sampai dengan tokoh secara berkelompok melalui suatu diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*). Mengingat ini adalah suatu hasil refleksi masing-masing warga, maka dalam pelaksanaan Refleksi Kemiskinan ini harus mampu menerima berbagai pendapat yang berbeda. Artinya perbedaan jangan diartikan bertentangan tetapi justru saling melengkapi. Sebaiknya dimulai dengan kelompok-kelompok yang lebih homogen baru kemudian hasil kelompok homogen dibawa dalam kelompok yang lebih heterogen.

Tujuan Refleksi Kemiskinan adalah:

- Masyarakat mampu merumuskan tipologi dan karakteristik kemiskinan yang ada di wilayahnya;
- Masyarakat mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang ada di wilayahnya;
- Membuka akses bagi masyarakat miskin dan termiskin di kelurahan sasaran untuk terlibat dalam pelaksanaan P2KP sejak tahap awal;

- Mewujudkan "rasa memiliki" masyarakat miskin dan "kepedulian" masyarakat lainnya terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk P2KP;
- Mengidentifikasi aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, mengenai bagaimana sebaiknya P2KP dilaksanakan di kelurahannya;
- Tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari diri sendiri melalui perubahan mental dan perilaku serta kerja keras; dan
- Internalisasi kesadaran bahwa masyarakat berdaya dan mandiri adalah kunci utama penanggulangan kemiskinan.

#### **c. Pemetaan Swadaya (PS)**

Pemetaan swadaya adalah proses partisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapinya dan potensi yang dimiliki sehingga tumbuh kebutuhan nyata (*riii*) untuk menanggulangi berbagai persoalan tersebut utamanya kemiskinan, dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatif yang bersifat lokal, seperti persepsi dan pengetahuan tradisional masyarakat setempat. Intinya, masyarakat didorong untuk mampu mengidentifikasi "kebutuhan nyata", dan bukan hanya sekedar "daftar keinginan" mereka.

Pemetaan Swadaya dalam P2KP ditempatkan sebagai alat untuk mendorong 'perubahan sosial/transformasi sosial' agar masyarakat lebih mampu untuk menganalisis keadaannya sendiri (tidak terjebak hanya pada "daftar keinginan"), kemudian memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaannya serta mengembangkan potensi dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tegasnya, Pemetaan Swadaya berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat agar lebih kuat dan mandiri serta mengerti hak-hak dan kewajiban mereka.

Arah perubahan perilaku masyarakat dalam P2KP juga bermakna 'pembebasan diri' bagi masyarakat untuk mampu mengaktualisasikan dirinya dalam pemecahan-pemecahan masalah di sekelilingnya, atau Partisipasi Mandiri. Melalui partisipasi mandiri, akan memungkinkan masyarakat menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, dengan cara memotivasi dan menggerakkan mereka untuk menggenggam kehidupan dan harapan mereka ditangannya sendiri.

Agar pelaksanaan Pemetaan Swadaya benar-benar dapat dilakukan oleh masyarakat sehingga terjadi proses pembebasan



maka pada prinsipnya Pemetaan Swadaya harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bersifat praktis artinya mudah dilakukan atau mengandung unsur-unsur pekerjaan yang sudah biasa dilakukan
- Sederhana atau tidak rumit (*complicated*) dan bertele-tele
- Rancangan dan proses pelaksanaannya menggunakan banyak visualisasi yang mudah ditangkap
- Dilaksanakan di tingkat komunitas yang menghadapi persoalan yang sama seperti misalnya di tingkat kampung/kelurahan dengan sarana-sarana seadanya, dengan harapan bahwa masyarakat dapat memahaminya dan pada akhirnya dapat melakukan sendiri dengan dukungan "pihak luar" yang minimal.
- Keterlibatan masyarakat dalam Pemetaan Swadaya dimaksudkan untuk memungkinkan permasalahan yang dikaji didasarkan sudut pandang masyarakat sendiri, sehingga alternatif pemecahan masalahnya akan mempertimbangkan potensi, sumberdaya serta kepentingan-kepentingan lokal.
- Pendekatan Pemetaan Swadaya seperti di atas diharapkan lebih menjamin kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan terutama memungkinkan pengalihan/transfer ketrampilan pemetaan, analisa serta perencanaan kepada

masyarakat. Artinya, masyarakat mampu menjadi pelaku pengembangan alternatif pemecahan masalah dan bukan sekedar konsumen pemecahan masalah yang dikembangkan oleh pihak luar. Sehingga ketergantungan masyarakat kepada pihak "luar" dalam prakarsa dan pengambilan keputusan serta perumusan program, secara bertahap bisa dikurangi.

Pada prinsipnya tujuan utama dari Pemetaan Swadaya atau penjajagan kebutuhan nyata oleh masyarakat adalah memfasilitasi masyarakat untuk belajar agar mampu membudayakan perilaku kemandirian dan bertumpu pada potensi diri dalam menanggapi berbagai persoalan termasuk dalam menanggulangi kemiskinan.

Secara khusus, tujuan dari Pemetaan Swadaya adalah :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi
- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menemukan akar persoalan dari perkara yang dihadapi dan potensi yang dimiliki serta merumuskan kebutuhan nyata mereka;
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merumuskan dan mempertimbangkan pemilihan alternatif-alternatif pemecahan yang dianggap paling dapat menjawab persoalan

masyarakat, sesuai sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia yang dimiliki;

- Mendorong masyarakat merumuskan rencana penanggulangan kemiskinan dari, untuk dan oleh masyarakat dan pemanfaatan efektif P2KP berdasarkan prioritas persoalan, potensi dan kebutuhan nyata yang ada; dan
- Mendorong terwujudnya gerakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

**d. Pengembangan Masyarakat melalui Pembentukan BKM**

Pengorganisasian Masyarakat merupakan proses partisipatif warga masyarakat kelurahan sasaran untuk memilih dan memutuskan sendiri perlu tidaknya berorganisasi untuk menangani persoalan kemiskinan secara sistematis di kelurahan mereka. Bila masyarakat menganggap perlu berorganisasi agar dapat bertindak secara terorganisasi dan sistematis maka masyarakat kelurahan tersebut dapat membentuk organisasi masyarakat warga, baik dalam bentuk paguyuban atau perhimpunan dan memutuskan lembaga pimpinan kolektif yang akan memimpin organisasi masyarakat warga tersebut yang bertindak atas nama organisasi masyarakat warga tersebut terhadap pihak-pihak di dalam dan di luar komunitas tersebut.

Dalam kasus P2KP lembaga pimpinan kolektif ini secara generik diberi nama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Bila masyarakat menganggap perlu membangun organisasi sebagai wadah perjuangan, maka masyarakat dapat membentuk organisasi masyarakat warga.

Posisi organisasi masyarakat warga :

- Di luar institusi pemerintah
- Di luar institusi militer
- Di luar institusi agama
- Di luar institusi pekerjaan atau usaha
- Di luar institusi keluarga

Untuk memimpin organisasi masyarakat warga tersebut maka dibentuklah lembaga pimpinan kolektif terdiri dari 11 s/d 17 orang anggota yang dalam hal ini secara generik diberi nama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Anggota BKM ini dipilih secara rahasia, tanpa calon dan tanpa kampanye.

Sebagai lembaga pimpinan kolektif masyarakat, BKM hanya dapat dibangun dan dibubarkan atas kesepakatan serta keputusan dari segenap lapisan warga masyarakat di Kelurahan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar BKM benar-benar dimiliki oleh masyarakat, dan tidak dimiliki oleh sekelompok orang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakat atau bahkan pihak-

pihak di luar masyarakat. Kepada BKM tersebut, selanjutnya dipercaya mengendalikan pengelolaan dana abadi P2KP dan dana-dana lain yang dipercayakan kepada mereka secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembung warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun stimulan atas keswadayaan masyarakat (hibah) untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Keberadaan BKM ini merupakan prasyarat bagi pelaksanaan P2KP di kelurahan sasaran.

Kedudukan serta hubungan BKM dengan perangkat kelurahan dan organisasi masyarakat formal lainnya di tingkat kelurahan tidak bersifat struktural formal, melainkan hubungan yang bersifat koordinatif, fungsional dan komplementer atau saling melengkapi serta mendukung satu sama lain.

Tujuan pengembangan masyarakat melalui pembentukan BKM adalah :

- Masyarakat sadar perlunya berorganisasi dalam menanggulangi kemiskinan yang bersifat multi dimensi yang menjadi musuh bersama

- Masyarakat memahami dan mampu merumuskan kriteria, dan karakteristik organisasi masyarakat warga yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat
- Masyarakat mampu memilih pemimpin masyarakat secara rahasia, tanpa pencalonan dan kampanye untuk duduk sebagai anggota BKM;
- Lembaga pimpinan kolektif (BKM) organisasi masyarakat warga terbentuk
- Keberlanjutan (*sustainability*) P2KP di tingkat masyarakat, baik dari segi kelembagaan, kegiatan kegiatan, maupun dana terjadi.

#### **e. Perencanaan Partisipatif**

Perencanaan Partisipatif adalah suatu tata cara perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Dalam praktek, perencanaan partisipatif ini merupakan serangkaian kegiatan pertemuan atau rembuk warga yang intensif yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan rencana pembangunan. Untuk P2KP ini berarti rencana penanggulangan kemiskinan atau program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) atau juga sering disebut "*community development plan*" berdasarkan hasil

Pemetaan Swadaya, yakni penilaian kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Perencanaan Partisipatif (*Participatory Planning*) ini dilakukan sebagai alat pembelajaran masyarakat agar lebih mampu dalam menganalisis keadaan sendiri, mengidentifikasi potensi, merumuskan kebutuhan nyatanya, dan menyepakati rencana kegiatan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Perencanaan partisipatif ini merupakan satu rangkaian dengan pemetaan swadaya sehingga dalam melakukan perencanaan partisipatif harus juga memperhitungkan/ memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan
- Mengakomodasi berbagai kepentingan dan agenda yang berbeda.
- Mengakomodasi keterbatasan tiap unsur masyarakat dan perbedaan komitmen
- Menetapkan visi dan misi kelurahan/desa sebagai kesatuan arah dan alat pemersatu berbagai kepentingan dan agenda
- Ditetapkan batasan/cakupan kerja perencanaan yang realistis
- Tetap menjaga momentum agar partisipasi masyarakat dapat tetap digalang

- Fleksibel dalam tata cara pelaksanaan
- Menghargai budaya dan kearifan setempat
- Berangkat dari potensi masyarakat sendiri (keswadayaan)
- Menggunakan sumberdaya luar secara bijaksana dan hemat, termasuk dalam pemanfaatan tenaga ahli dan dana
- Dapat dibangun kelompok inti yang menjadi motor perencanaan itu sendiri terdiri dari Kader Masyarakat dan Tim Pemetaan Swadaya
- Dilakukan secara dinamis dan interaktif melalui serangkaian lokakarya dan kerja kelompok inti.

Semua hal tersebut dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai P2KP, yaitu dapat dipercaya, ikhlas, kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan dalam keberagaman. Dengan demikian, masyarakat di kelurahan sasaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan P2KP maupun penanggulangan kemiskinan, tidak sekedar didasarkan pada "daftar keinginan" sekelompok atau pihak tertentu, melainkan benar-benar berbasis kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat serta dengan strategi jelas dan terarah.

Perencanaan partisipatif ini memiliki tujuan ganda sebagai berikut :



- Masyarakat bersama-sama belajar merumuskan dan memutuskan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan untuk membangun komunitas mereka dan khususnya menanggulangi kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian besar warga (pemberdayaan).
- Menghasilkan suatu rencana pembangunan yang komprehensif yang merupakan hasil kesepakatan bersama

**f. Pengorganisasian Kelompok Melalui Pembentukan KSM**

Pengorganisasian kelompok pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan untuk membangun kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dilakukan oleh warga masyarakat dan di fasilitasi oleh Fasilitator. KSM atau kelompok swadaya masyarakat dapat dibangun atas dasar berbagai ikatan pemersatu antara lain sebagai berikut : kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan/usaha, kesamaan domisili, niat pembelajaran yang sama, dsb yang pada dasarnya mengarah kepada efisiensi, efektivitas serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kapital sosial. Dengan demikian maka keanggotaan KSM pada dasarnya adalah bersifat sukarela yang didorong oleh adanya ikatan pemersatu tersebut diatas.

Dalam kaitan P2KP, KSM didefinisikan secara lebih spesifik sebagai sekumpulan warga di kelurahan sasaran yang

memenuhi kriteria sebagai warga miskin yang ditetapkan masyarakat sendiri, dimana mereka mempunyai minat serta tujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang sama, baik yang menyangkut rumah dan lingkungan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, atau persoalan sosial yang lain maupun pengembangan usaha atau modal bagi para anggota dan KSM. KSM tersebut dapat saja merupakan kelompok masyarakat yang "sudah ada" (*existing groups*) dan atau kelompok-kelompok yang "dibangun baru" dalam rangka pelaksanaan P2KP, yang dapat memenuhi syarat-syarat sebagai kelompok masyarakat sebagaimana ditetapkan P2KP.

Falsafah dasar yang perlu diperhatikan tatkala membangun KSM adalah bahwa Warga miskin bukanlah *the have not* melainkan *the have little*. Artinya warga miskin itu bukannya tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Mereka mempunyai "sesuatu" (motivasi, modal, pengalaman dan lain-lain) tetapi belum optimal. Oleh karenanya, kalau mereka dihimpun dalam kelompok atau KSM dan difasilitasi, maka mereka akan mempunyai kemampuan untuk mengatasi persoalan mereka yang paling utama, yang berkaitan dengan peningkatan kehidupan dan penghidupan mereka.

Bentuk-bentuk KSM yang dapat dibangun antara lain adalah:

- Kelompok patungan usaha, dimana tiap anggota kelompok patungan modal untuk bersama-sama mengembangkan satu usaha milik bersama.
- Kelompok usaha bersama, dimana tiap anggota kelompok memiliki usaha masing-masing yang sama.
- Kelompok usaha terkait, dimana tiap anggota memiliki usaha masing-masing yang saling terkait.
- Kelompok serba usaha, dimana tiap anggota kelompok memiliki usaha masing-masing yang berbeda satu terhadap lainnya.
- Kelompok sosial, dimana tiap anggota tidak semata-mata ingin mengembangkan usaha tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan saling membantu, saling belajar, membangun pelayanan prasarana yang dibutuhkan bersama, dan lain-lain.

Proses Pembentukan KSM hendaknya benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah pendekatan dari bawah dan pertumbuhan secara alamiah atau organik, tanpa banyak dipengaruhi iming-iming yang membentuk motivasi yang berorientasi hanya untuk memperoleh "dana bantuan P2KP".

Pembentukan KSM-KSM bukan hanya sekedar formalitas, tetapi lebih merupakan himpunan antar pribadi yang saling berinteraksi dan memiliki keterikatan atau kesaling-bergantungan dan yang berakar pada kepentingan dan kebutuhan bersama.

Dasar pembentukan KSM dalam P2KP adalah kesadaran dan kebutuhan warga untuk berkelompok, sehingga "dinamika proses" pembentukan KSM sangatlah penting karena melalui dinamika proses tersebut akan terbangun kesadaran kritis masyarakat mengenai mengapa, untuk apa dan bagaimana berkelompok serta terbangun kesepakatan-kesepakatan dalam kelompok tersebut.

Pemahaman serta kesadaran kritis mengenai hakekat berkelompok dan kerelaan warga untuk menjadi anggota KSM merupakan pondasi untuk terbangunnya KSM tangguh dan mandiri, selain tentu saja aspek keswadayaan tiap anggotanya.

Proses pembentukan KSM diawali dengan FGD Dinamika Kelompok, sebagai proses penumbuhan kesadaran kritis masyarakat untuk berkelompok dan orientasi masyarakat, BKM, Kader Masyarakat maupun Fasilitator dalam proses Pembentukan KSM ini tidak untuk membentuk KSM sebanyak-banyaknya, melainkan didasarkan pada kebutuhan nyata dan kesiapan masyarakat sendiri. Akan lebih baik bila pada tahap awal

difokuskan hanya dengan membentuk beberapa KSM dari kelompok masyarakat yang telah siap dan didampingi secara intensif hingga mandiri. KSM-KSM mandiri inilah yang kemudian menjadi contoh yang baik (*Best Practice*) untuk direplikasikan atau dijadikan tolok ukur bagi masyarakat lainnya yang ingin membentuk KSM.

Dalam prakteknya, KSM ini dapat saja merupakan kelompok warga yang sudah terbentuk sebelum P2KP atau kelompok-kelompok yang dibentuk baru sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Meskipun demikian, tidak setiap kumpulan orang atau kelompok dapat disebut sebagai KSM.

Sekumpulan orang dapat disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam P2KP, bila memenuhi beberapa kriteria berikut :

- Memiliki tujuan, kepentingan dan cita-cita yang sama yang disepakati anggota;
- Saling mengenal dan memiliki ikatan pemersatu satu sama lain;
- Bersifat terbuka, mengakar, bertumpu pada anggota dan pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif;

- Memiliki pembagian kerja antar anggota, yaitu pembagian kewenangan, fungsi, peranan dan tugas yang jelas diantara anggota meskipun secara sederhana;
- Memiliki aturan kelompok yang disepakati dan ditaati oleh para anggotanya baik tertulis maupun belum/tidak tertulis; dan
- Terdapat kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan.

Tujuan kegiatan Pembentukan KSM adalah:

- Mendorong tumbuh dan berkembangnya kapital sosial
- Mendorong warga masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan;
- Mendorong proses pemberdayaan berjalan lebih efektif dan efisien;
- Mendukung terjadinya proses saling asah-saling asuh antar sesama anggota;
- Terjadi konsolidasi kekuatan bersama baik antar yang lemah maupun antar yang kuat dan lemah di dalam suatu KSM (konsep sapu lidi); dan
- Mengembangkan dan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antar anggota, wadah proses

belajar/interaksi antar anggota, menggerakkan keswadayaan dan modal, meningkatkan dan menertibkan angsuran pinjaman, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF PADA P2KP DI DESA PACUL KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL**

Perencanaan partisipatif menyusun Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) adalah serangkaian kegiatan musyawarah atau rembuk-rembug warga untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan tingkat Desa berdasarkan hasil pemetaan swadaya. Perencanaan partisipatif dalam P2KP dilakukan sebagai alat pembelajaran agar masyarakat lebih mampu dalam menganalisis keadaannya sendiri, mengidentifikasi potensinya, merumuskan kebutuhan riilnya dan menyepakati rencana-rencana kegiatan secara sistematis, strategis, jelas dan terarah untuk memperbaiki kehidupannya.

Pada hasil penelitian ini akan diuraikan keterkaitan antara program yaitu tahapan-tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif, pelaksana program yaitu BKM Mandiri Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dan sasaran program yaitu perempuan dan masyarakat miskin di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Tahapan-tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif mulai dari sosialisasi perencanaan partisipatif; review pemetaan swadaya untuk perumusan masalah, potensi dan kebutuhan tingkat RT/RW; rembuk warga



pembahasan masalah, potensi dan kebutuhan penanggulangan kemiskinan tingkat RT/RW; lokakarya PJM Pronangkis, dan penyebarluasan hasil lokakarya PJM Pronangkis.

Adapun waktu pelaksanaan keseluruhan tahapan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal mulai bulan September 2003 sampai dengan Nopember 2003 atau selama 3 (tiga) bulan, padahal alokasi waktu yang diberikan oleh pihak Konsultan P2KP untuk pelaksanaan perencanaan partisipatif adalah dimulai bulan September 2003 sampai dengan Oktper 2003 atau hanya 2 (dua) bulan saja. Adanya ketidaksesuaian waktu pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam penyusunan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis antara alokasi waktu konsultan dengan praktek pelaksanaannya di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, berdasarkan dokumen PJM Pronangkis BKM Mandiri antara lain disebabkan pada proses penyepakatan gagasan melalui forum rembug warga membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu selama 6 minggu atau 1½ bulan, sehingga mempengaruhi rangkaian pelaksanaan perencanaan partisipatif yang lain.

Pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal secara rinci sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan, dilihat dari dimensi-dimensi program yaitu pelaksanaan tahapan perencanaan partisipatif, dimensi pelaksana yaitu peranan BKM dan dimensi masyarakat, yaitu keterlibatan dari masyarakat sasaran program, sebagai berikut :

## 1. Sosialisasi Perencanaan Partisipatif

### a. Dimensi Program

Sosialisasi merupakan kegiatan awal yang perlu dilakukan di tingkat masyarakat dalam upaya memberikan informasi, pemahaman serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan partisipatif. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan dapat melibatkan sebanyak mungkin masyarakat Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Dalam buku pedoman teknis P2KP, sosialisasi diharapkan dilaksanakan melalui forum pertemuan di tingkat RT, RW, Desa, maupun forum pertemuan informal lainnya seperti Karang Taruna, Jamiyah Pengajian, Pertemuan PKK, Pertemuan Dasa Wisma dan lain-lain. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat mengetahui, memahami, peduli untuk terlibat dalam rangkaian tahapan perencanaan partisipatif, mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan.

Sosialisasi perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dilaksanakan tidak sesuai dengan Pedoman Teknis P2KP, dimana seharusnya dilaksanakan pada tiap-tiap RT atau RW dengan harapan akan banyak warga masyarakat miskin sebagai sasaran program yang terlibat dan mengetahui perencanaan partisipatif, tetapi sosialisasi perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dilaksanakan *cluster* hanya di 3 (tiga) tempat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1\***  
**Pelaksanaan Sosialisasi Perencanaan Partisipatif di Desa Pacul**

No	Sosialisasi	RW	Banyaknya RT	Banyaknya Sasaran
1	Pertemuan pertama, tempat rumah Bapak Buseri, tanggal 6 Oktober 2003	Gabungan RW 1, RW 2 dan RW 3	12 RT	107 KK miskin
2.	Pertemuan kedua, tempat rumah Ibu Nunung, tanggal 8 Oktober 2003	Gabungan RW 7 dan sebagian RW 6	10 RT	133 KK miskin
3.	Pertemuan ketiga, tempat rumah Bapak Sabarno, tanggal 9 Oktober 2003	Gabungan RW 4, RW 5 dan sebagian RW 6	10 RT	98 KK miskin

Sumber : BKM Mandiri Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif di tiga tempat tersebut jika dibandingkan dengan jumlah RT yang ada dan jumlah masyarakat sasaran program/KK miskin, maka dimungkinkan tujuan dan maksud dari sosialisasi perencanaan partisipatif akan sulit tercapai. Namun demikian pengambilan keputusan untuk melaksanakan sosialisasi secara *cluster* tentu ada pertimbangan lain dari BKM.

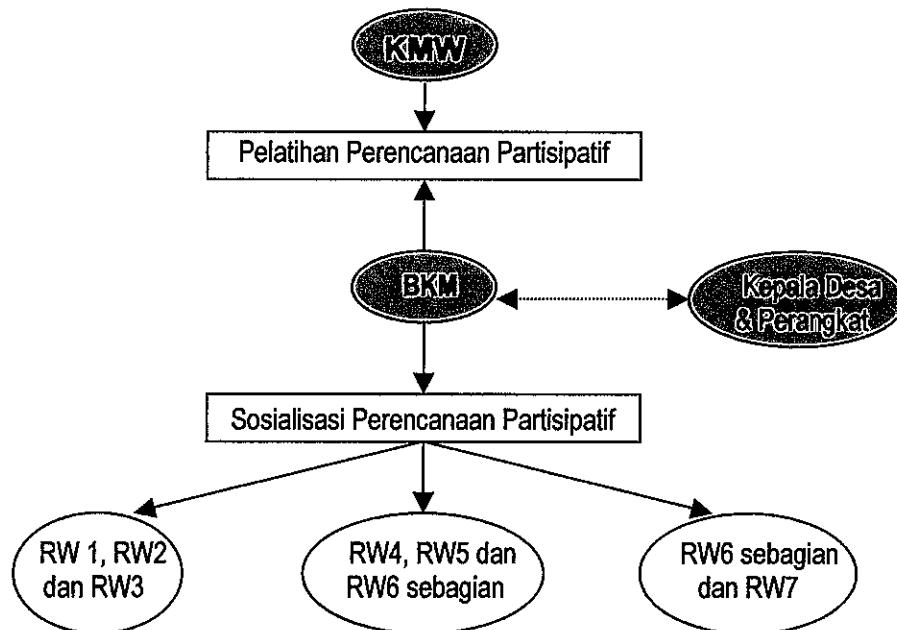
Pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif yang secara *cluster* hanya di tiga tempat tersebut menurut Bapak Darno, Ketua BKM Mandiri Desa Pacul dengan pertimbangan efisiensi dan waktu yang tersedia. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Darno sebagai berikut :

"pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif di Desa Pacul memang dilaksanakan hanya di tiga tempat, soalnya ngga ada dana dan waktu yang cukup. Kalo ngadain kumpul-kumpul di Desa kalo nda ada minum sama jajan, *saru* pak ! padahal kalo dilaksanain di tiap-tiap RT yang sebanyak 32 RT, siapa yang nanggung. Belum lagi waktu yang disediakan untuk sosialisasi sedikit, hanya 1 minggu, kan ngga *nyandak*, daripada dipaksakan nanti malah berantakan..." (wawancara, tanggal 18 Pebruari 2005)

Fasilitator Kelurahan (pihak Konsultan P2KP) Ibu Dewi Milasari, menyatakan bahwa untuk operasional rapat-rapat sosialisasi dan seluruh kegiatan P2KP di Desa ada biaya operasional yang diberikan kepada Kepala Desa untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan P2KP di Desa sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pertimbangan rangkaian kegiatan P2KP sangat banyak dan butuh waktu lama, setelah BKM berkoordinasi dengan Kepala Desa diputuskan untuk melaksanakan sosialisasi perencanaan partisipatif hanya di tiga tempat.

Adapun skema sosialisasi perencanaan partisipatif yang dilaksanakan di Desa Pacul adalah sebagai berikut :

**Skema 1 :**  
**Skema Sosialisasi Perencanaan Partisipatif**  
**di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal**



Sumber : Disusun dari hasil Wawancara dengan Informan

Dari skema di atas dapat dilihat dari dimensi program, pelaksanaan perencanaan partisipatif pada tahapan sosialisasi di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tidak sesuai dengan pedoman teknis P2KP yang ada, dengan pertimbangan efisiensi dan keterbatasan waktu yang ada. Dengan pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif secara *cluster* di tiga tempat dalam satu desa, maka maksud dan tujuan dari sosialisasi akan sulit tercapai mengingat jumlah masyarakat sasaran yang banyak dengan pertemuan yang sedikit maka dipastikan tingkat keterlibatan masyarakat rendah.

*b. Dimensi Pelaksana Program*

1) *Kemampuan Anggota BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari kemampuan Anggota BKM pada pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menurut Konsultan (Fasilitator Kelurahan) Ibu Dewi Milasari, secara formal tidak terlalu banyak berperan, namun secara informal anggota BKM melakukan sosialisasi, minimal terhadap warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelum rangkaian perencanaan partisipatif dilaksanakan, anggota BKM diikutsertakan pada beberapa pelatihan dasar, diharapkan memiliki

kemampuan yang memadai dalam memberikan materi sosialisasi kepada warga, seperti yang diungkapkan oleh Fasilitator Kelurahan sebagai berikut :

"sebelum pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif, tiga orang anggota BKM diikutsertakan pada pelatihan tentang Perencanaan Partisipatif yang dilaksanakan oleh KMW. Hal tersebut dengan harapan tiga orang Anggota BKM tersebut mampu mentransformasikan pengetahuannya kepada teman sesama anggota BKM dan mampu memberikan materi-materi perencanaan partisipatif di masyarakat" (wawancara tanggal 22 Pebruari 2005)

Dari pernyataan Fasilitator Kelurahan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada upaya dari KMW untuk memberikan pengetahuan, informasi dan pelatihan secara teknis kepada Anggota BKM agar mampu melaksanakan perencanaan partisipatif dalam penyusunan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian pada prakteknya di lapangan, kemampuan dari Anggota BKM untuk memberikan sosialisasi kepada warga tentang perencanaan partisipatif masih kurang. Hal ini dibuktikan pada fakta bahwa penyampai materi sosialisasi perencanaan partisipatif di tiga tempat di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah Fasilitator Kelurahan.

Kurangnya peranan anggota BKM dalam pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif tidak terlepas dari masih rendahnya kemampuan Anggota BKM dalam memahami tahapan-tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif dan P2KP secara

umum. Sebagaimana yang disampaikan salah Bapak Siswanto, seorang anggota BKM sebagai berikut :

"terus terang saja saya kurang menguasai dan kurang memahami P2KP secara umum, walaupun tema acaranya sosialisasi perencanaan partisipatif, tapi warga masyarakat pertanyaannya lebih banyak ke materi lain tentang P2KP, menurut saya yang lebih mampu ya.. Ibu Faskelnya ..."  
(wawancara tanggal 19 Pebruari 2005)

Peranan anggota BKM pada saat sosialisasi perencanaan partisipatif adalah sebagai moderator acara, sedangkan materi sosialisasi disampaikan oleh Fasilitator Kelurahan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh anggota BKM yang mengikuti pelatihan perencanaan partisipatif, Ibu Amalah menyatakan sebagai berikut :

"saya memang ikut pelatihan, tapi materi yang disampaikan pada saat pelatihan banyak sekali justru materi teknis perencanaan partisipatif sedikit, sehingga saya ngga berani menyampaikan kepada warga karena Ibu Faskel kan ada..., Dia lebih mampu menyampaikan dan bisa menjawab pertanyaan warga. Saya cukup jadi moderator saja.."  
(wawancara tanggal 25 Pebruari 2005)

Peranan Anggota BKM yang hanya sebagai moderator acara pada pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif tidak terlepas dari masih kurangnya pengalaman warga masyarakat di Desa dalam kegiatan sosialisasi program-program pemerintah yang lain yang dilaksanakan di Desa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Darno, Ketua BKM Mandiri Desa Pacul sebagai berikut :

"selama ini sosialisasi program-program pemerintah yang ada dilaksanakan di Desa, kami-kami ini hanya sebagai peserta yang mendengarkan. Materi yang menyampaikan dari orang-orang Kecamatan atau Kabupaten atau Mantri-mantri Pertanian atau Kesehatan. Jadi kami memang kurang pengalaman memberikan materi sosialisasi tapi berpengalaman sebagai peserta saja" (wawancara tanggal 18 Pebruari 2005)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan Anggota BKM dalam melaksanakan sosialisasi perencanaan partisipatif masih kurang, disebabkan materi yang harus disampaikan merupakan hal kurang dipahami dengan baik dan juga karena Anggota BKM belum berpengalaman melaksanakan dan memberikan materi sosialisasi kepada warga masyarakat.

## 2) *Sikap Anggota BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari sikap Anggota BKM pada pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, menurut Konsultan (Fasilitator Kelurahan) Ibu Dewi Milasari, secara umum tingkat kehadiran Anggota BKM dalam acara sosialisasi cukup baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Fasilitator Kelurahan sebagai berikut :

"kehadiran Anggota BKM pada acara sosialisasi cukup baik, menurut pendapat saya, hal ini disebabkan semangat mereka pada saat itu sedang tinggi karena baru saja dilantik menjadi Anggota BKM melalui proses pemilihan yang panjang" (wawancara tanggal 22 Pebruari 2005)



Pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif, menurut Anggota BKM merupakan hal yang penting, karena masyarakat akan mengerti bahwa masyarakat akan terlibat dalam penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa. Sikap Anggota BKM yang mendukung pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif sebagaimana yang disampaikan Bapak Darno Ketua BKM Mandiri Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagai berikut :

"Menurut pendapat saya, pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif kepada masyarakat, akan membuat masyarakat tahu bahwa mereka akan dilibatkan pada saat membuat perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Balai Desa" (wawancara tanggal 18 Pebruari 2005)

Walaupun secara substansi Anggota BKM mendukung pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif, namun demikian pada prakteknya penyelenggaraan sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan pada setiap RW, BKM memutuskan dilaksanakan secara *cluster* di tiga lokasi, beberapa RW digabung. Keputusan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa BKM mengambil kebijakan yang berbeda dengan pedoman teknis P2KP yang semestinya harus dijadikan acuan, dengan alasan keterbatasan waktu dan dana.

### 3) *Koordinasi BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari pelaksanaan koordinasi Anggota BKM pada pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif

dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, menurut Konsultan (Fasilitator Kelurahan) Ibu Dewi Milasari, secara umum tingkat koordinasi BKM dalam acara sosialisasi cukup baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Fasilitator Kelurahan sebagai berikut :

"dalam pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif, BKM membagi tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi dari 11 Anggota BKM semua mendapatkan tugas pada saat acara sosialisasi di tiga tempat tersebut. Pembagian tugasnya antara lain ada yang ditunjuk untuk menjadi mempersiapkan terlaksananya acara, mengundang warga, menyiapkan lokasi dan konsumsi acara, menjadi moderator dan ada yang menjadi penyampai materi. Tapi pada prakteknya penyampai materi hanya Fasilitator Kelurahan, Anggota BKM yang ditunjuk hanya mendampingi." (wawancara tanggal 25 Pebruari 2005)

Dari pernyataan Fasilitator Kelurahan di atas, maka dapat dilihat bahwa pembagian tugas dalam pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif di Desa Pacul oleh Anggota BKM telah dilakukan dengan baik. Untuk tempat acara sosialisasi, Anggota BKM yang mendapat tugas melakukan pembicaraan dengan beberapa warga untuk memohon kesediaan ketempatan acara. Dalam pemilihan dan penunjukkan tempat acara sosialisasi Anggota BKM berkoordinasi dengan Perangkat Desa yang juga berkedudukan sebagai Ketua RW, sebagaimana yang disampaikan Bapak Siswanto sebagai berikut :

"warga sini sebenarnya gampang Pak kalo diminta untuk ketempatan acara P2KP, tetapi kita omong-omong dulu sama Perangkat Desa, kebetulan Perangkat Desa di Desa Pacul ini merangkap jadi Ketua RW. Nanti Ketua RW ini menunjukkan kepada kita kira-kira siapa-siapa warga yang berkenan ketempatan. Setelah itu kita datangi orang-orang yang disarankan Ketua RW itu, selama ini ngga ada masalah, pasti maunya Pak, tetapi tentu kita menyediakan dana untuk konsumsinya." (wawancara tanggal 19 Pebruari 2005)

Dalam pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif tidak timbul konflik, baik antar Anggota BKM maupun dengan pihak lain. Kerja sama yang dibangun baik antar Anggota BKM maupun dengan pihak lain seperti Perangkat Desa, Tim Pemetaan Swadaya dan Kader berjalan dengan baik. Intensitas pertemuan antar Anggota BKM cukup sering, sehingga berbagai permasalahan dan kendala yang timbul dapat diatasi dalam tiap-tiap pertemuan.

**Gambar 10**  
**Foto Suasana Rapat BKM**



Sumber : Arsip Foto-foto Kegiatan BKM Mandiri Desa Pacul

Pada Gambar di atas terlihat kegiatan rapat BKM di rumah Ibu Amalah, salah satu anggota BKM, dalam persiapan pelaksanaan berbagai kegiatan P2KP yang menjadi tanggungjawab BKM. Sebelum diberikan satu ruangan di Balai Desa oleh Kepala Desa Pacul, kegiatan rapat-rapat BKM dilaksanakan berpindah-pindah di rumah anggota BKM.

Kepala Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif dengan memberikan ruangan tersendiri bagi BKM untuk dijadikan tempat rapat-rapat BKM dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan partisipatif penyusunan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Desa Pacul sebagai berikut :

“untuk persiapan dan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam menyusun Pronangkis Desa Pacul, tentu BKM membutuhkan sarana tempat untuk melakukan koordinasi dan rapat-rapat. Kebetulan di Balai Desa ada satu ruang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk tempat BKM mengadakan rapat-rapat, sehingga tidak perlu rapat berpindah-pindah di rumah-rumah Anggota BKM” (wawancara tanggal 2 Maret 2005)

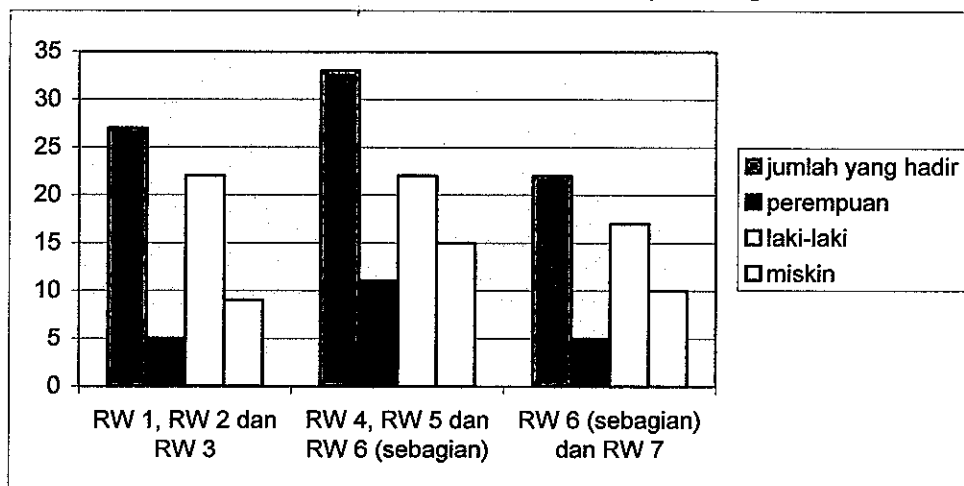
Dari pernyataan Kepala Desa di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan penuh diberikan kepada BKM dalam mempersiapkan dan melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Sarana tempat merupakan modal penting dalam pelaksanaan berbagai kegiatan

P2KP yang menjadi tanggungjawab BKM. Adanya dukungan dari Kepala Desa tentunya disebabkan koordinasi berjalan dengan baik antara BKM dengan pihak Pemerintah Desa.

*c. Dimensi Masyarakat Sasaran Program*

Dimensi masyarakat sasaran program dilihat dari keterlibatan dan pemahaman masyarakat sasaran pada acara sosialisasi perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang diselenggarakan oleh BKM. Pada Gambar berikut terlihat tingkat kehadiran warga sasaran program yaitu perempuan dan Kepala Keluarga Miskin pada tiap-tiap acara sosialisasi di tiga tempat di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal :

Diagram 1  
Tingkat Kehadiran Sasaran Program pada Sosialisasi Perencanaan Partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal



Sumber : Notulensi Sosialisasi Perencanaan Partisipatif milik Fasilitator Kelurahan

Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa tingkat kehadiran warga masyarakat yang menjadi sasaran program P2KP yaitu perempuan dan Kepala Keluarga Miskin pada acara sosialisasi perencanaan partisipatif di tiga tempat di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal masih relatif rendah. Hal itu bisa ditunjukkan dari data bahwa kehadiran perempuan di tempat Gabungan RW 1, RW 2 dan RW 3 hanya sebanyak 5 orang sedangkan laki-laki sebanyak 22 orang dan KK Miskin hanya sebanyak 9 orang dari seluruh peserta yang hadir sebanyak 27 orang. Kemudian di tempat Gabungan RW 4, RW 5 dan sebagian RW 6 kehadiran perempuan hanya sebanyak 11 orang sedangkan laki-laki sebanyak 22 orang dan KK Miskin hanya sebanyak 15 orang dari seluruh peserta yang hadir sebanyak 33 orang. Selanjutnya di tempat Gabungan RW 6 sebagian dan RW 7 kehadiran perempuan 5 orang sedangkan laki-laki 17 orang dan KK miskin hanya sebanyak 10 orang dari seluruh yang hadir sebanyak 22 orang.

Tingkat kehadiran masyarakat sasaran program yang rendah menurut Fasilitator Kelurahan disebabkan pelaksanaan sosialisasi pada malam hari, sehingga perempuan di Desa Pacul banyak yang tidak hadir pada acara tersebut. Sedangkan ketidakhadiran warga miskin disebabkan tidak terbiasanya mereka dilibatkan dalam acara-acara yang bersifat formil. Seperti yang disampaikan Fasilitator Kelurahan mengenai tingkat kehadiran sasaran program pada acara sosialisasi perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagai berikut :

"pertemuan sosialisasi perencanaan partisipatif di Desa Pacul biasanya dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, sehingga bagi perempuan di Desa Pacul kegiatan malam hari tersebut membuat mereka malas untuk hadir. Sedangkan warga miskin yang tidak hadir akibat mereka tidak terbiasa menghadiri acara formil seperti sosialisasi ini, selama ini mereka hanya dilibatkan sebagai obyek sasaran yang mendapatkan bantuan, sedangkan P2KP mengajak mereka untuk terlibat langsung sebagai subyek perencana dan pengambil keputusan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa mereka."

Rendahnya tingkat kehadiran perempuan dan warga miskin pada acara sosialisasi perencanaan partisipatif menurut salah seorang warga yang merupakan salah satu Kepala Keluarga Miskin di Desa Pacul, yaitu Ibu Munah warga RT 24 RW 6 yang memiliki 6 orang anggota keluarga yang menjadi tanggungannya menyatakan sebagai berikut :

*"wong wadon nang kene gelem metu bengi adong ana pengajian bae, seliane kuwe ya pada males, mending ning umah bae. Apa maning acarane sing deweke ora ngerti maksude apa... (perempuan di sini hanya mau keluar malam hari kalau acara pengajian saja, selain acara itu malas, lebih baik dirumah saja. Apalagi kalo acaranya mereka tidak tahu untuk apa..)"*

Sasaran program P2KP, yaitu perempuan dan masyarakat miskin yang hadir pada acara sosialisasi perencanaan partisipatif, menurut Fasilitator Kelurahan tingkat pemahamannya sangat beragam dan sangat relatif, maksudnya ada yang memahami dengan benar, ada yang salah paham dan ada yang tidak mengerti sama sekali, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Faskel sebagai berikut :

"perempuan dan warga miskin yang hadir dalam sosialisasi memahami acara tersebut sangat beragam, ada yang memahami dengan benar, jadi mereka mengerti bahwa ini merupakan

rangkaian dari program P2KP yang bertujuan untuk melibatkan secara aktif kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam menentukan kebijakan. Namun demikian ada yang salah memahami acara sosialisasi, yaitu ada yang mengira bahwa malam hari itu akan dibagikan bantuan uang. Serta ada yang sama sekali tidak mengerti maksud dari sosialisasi perencanaan partisipatif." (wawancara tanggal 2 Maret 2005)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif relatif kurang tercapai, karena tingkat kehadiran yang rendah dari perempuan dan warga miskin dan tingkat pemahaman yang juga rendah tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi.

## **2. Review Pemetaan Swadaya**

### *a. Dimensi Program*

Review pemetaan swadaya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BKM dalam rangka menindaklanjuti hasil kerja dari Tim Pemetaan Swadaya. Keluaran dari hasil kerja Tim Pemetaan Swadaya adalah :

- Peta dan profil keluarga miskin
- Peta dan profil relawan serta sumber daya manusia
- Peta dan profil masalah serta potensi wilayah
- Prioritas masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat

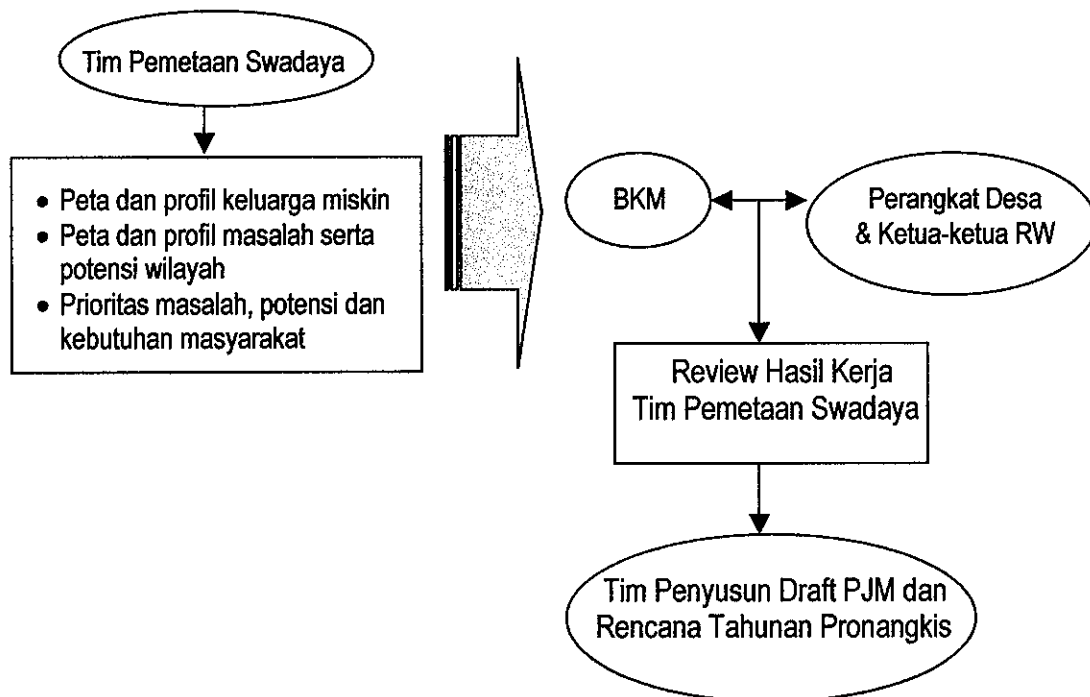
Tim Pemetaan Swadaya Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ditetapkan dalam Kegiatan Pemilihan Tim Pemetaan Swadaya pada tanggal 16 Maret 2003 di Balai Desa Pacul. Terpilih 28 orang yang



merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang ada di Desa Pacul. Setiap RW menempatkan 4 orang wakilnya dalam Tim Pemetaan Swadaya. Adanya perwakilan dari tiap RW karena tugas yang harus dilaksanakan adalah memetakan dan membuat profil tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wilayah tempat tinggalnya, seperti potensi, permasalahan, jumlah dan data warga miskin dan lain-lain.

Adapun skema pelaksanaan review pemetaan swadaya yang dilaksanakan oleh BKM Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

**Skema 2 :**  
**Skema Review Pemetaan Swadaya**



Sumber : Disusun dari hasil Wawancara dengan Informan

Dari gambar skema di atas, terlihat bahwa hasil kerja Tim Pemetaan Swadaya ditindaklanjuti oleh BKM yang bekerja sama dengan Perangkat Desa dan Ketua-ketua RW di Desa Pacul untuk melakukan review pemetaan swadaya. Kemudian dibentuk Tim Penyusun Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis dimana hasil review pemetaan swadaya dijadikan pedoman dalam proses penyusunan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil kerja dari Tim Pemetaan Swadaya Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal di bawah ini ditampilkan 2 macam contoh keluaran yaitu Profil Keluarga Miskin di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dan Prioritas Masalah, Potensi dan Kebutuhan Masyarakat di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagai berikut :

- Contoh Hasil Kerja Tim Pemetaan Swadaya tentang Profil Karakteristik Keluarga Miskin di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

No	Nama-nama Keluarga Pra KS dan KS I	Lokasi Tempat Tinggal (Dusun)	Profil Karakteristik keluarga pra KS dan KS I					Jus tifi kasi
			Jumlah Tangg Keluarga	Pekerjaan Kepala RT dan Pendamping	Penddk	Kondisi Rumah Tinggal	Keterlibatan Pen. Manfaat Prog Sejnjs Sebelumnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sisur	RT15/ 04	2	Buruh		Semi Permanen	Raskin	
2	Tarsuddin	RT15/ 04	4	Lain-lain		Semi Permanen	Raskin	
3	Amad	RT15/ 04	4	Lain-lain		Semi Permanen	Raskin	
4	Yanto	RT15/ 04	4	Buruh		Semi Permanen	Raskin	
5	Muhrodi	RT15/ 04	4	Buruh		Semi Permanen	Raskin	
...	.....	....	.....	....	..	....	....	
...	.....	....	.....	....	..	....	....	
336	warsina	RT 10/03	2	Buruh		Semi Permanen	Raskin/IDT	
337	casmi	RT16/ 04	1	Buruh		Menumpang	Raskin	
338	topik	RT16/ 04	3	Lain-lain		Semi Permanen	Raskin	

- Contoh Hasil Kerja Tim Pemetaan Swadaya tentang Prioritas Masalah, Potensi Dan Kebutuhan Masyarakat di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

No	Lokasi RT/RW	Jenis Kebutuhan ( Pemukiman, Perumahan, Ekonomi, Sosial Kesehatan dll )	Uraian Prioritas Masyarakat			Jangkauan Keterlibatan dan Kemanfaatan Bagi Masyarakat miskin
			Masalah	Potensi	Kebutuhan	
1	RT 07/02	Saluran Air	serius	tinggi	mendesak	tinggi
2	RT 07/02	Permodalan	tidak serius	tinggi	tdk mendesak	tinggi
3	RT 08/02	Permodalan	tidak serius	tinggi	tdk mendesak	tinggi
4	RT 09/02	Perumahan	serius	tinggi	tdk mendesak	tinggi
5	RT 09/02	Saluran Air	serius	tinggi	tdk mendesak	tinggi
..	...	....	....	...	.....	....
82	RT 20/05	Perumahan	serius	tinggi	mendesak	tinggi

Pada pelaksanaan tahapan review hasil pemetaan swadaya, ada tiga hal penting yang harus dilakukan oleh BKM yaitu :

1. Melakukan review terhadap identifikasi masalah, potensi dan kebutuhan di tingkat RT/RW;
2. Melakukan penentuan prioritas tingkat RT/RW; dan
3. Membentuk Tim Penyusun Draft PJM Pronangkis dan menyerahkan hasil review.

Review terhadap identifikasi masalah, potensi dan kebutuhan tingkat RT/RW yang telah dihimpun dan disusun oleh Tim Pemetaan Swadaya ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan lingkungan Desa secara menyeluruh sampai tingkat RT/RW. Informasi yang teridentifikasi meliputi berbagai masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial serta prasarana dan sarana

lingkungan. Kriteria pemilihan dan penentuan masalah/kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut antara lain :

- merupakan kebutuhan mendasar
- masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak
- dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat terutama masyarakat miskin.
- tersedia potensi/sumber daya.

Menurut Bapak Darno Ketua BKM Mandiri Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal pelaksanaan review pemetaan swadaya telah sesuai dengan pedoman teknis P2KP, dimana proses review sudah sesuai kriteria yang ditentukan. Pernyataan Bapak Darno tentang pelaksanaan review pemetaan swadaya sebagai berikut :

"review pemetaan swadaya yang dilakukan BKM Desa Pacul sudah sesuai pedoman teknis P2KP, kita kan selalu dibimbing oleh Ibu Faskel. Waktu kita review, BKM dengan Ketua RW dan Perangkat Desa rapat bersama membahas satu persatu, terus *dicocok-na* kriteria sesuai apa *ora*, di Desa Pacul hubungan antar warga termasuknya dekat Pak., jadi kita tahu kondisi masing-masing warga dan wilayahnya, kan ada Ketua RW dan Perangkat Desa, jadi kalo kita dari BKM *ora paham* ya tanya Ketua RW-*ne...* Misalnya hasil Tim Pemetaan Swadaya menyatakan kebutuhan saluran air di RT 23/RW 6 masalah yang serius tetapi tidak mendesak, kemudian oleh kami ditanyakan langsung kepada Ketua RW 6 apa betul ngga mendesak ? lalu dia bilang mendesak, ya kami rubah menjadi kebutuhan yang mendesak..."(wawancara tanggal 23 Maret 2005)

Telah sesuai pelaksanaannya review pemetaan swadaya di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan pedoman teknis P2KP,

dibenarkan oleh Fasilitator Kelurahan, Ibu Dewi Milasari, sebagaimana pernyataannya :

"Pada saat mengidentifikasi masalah, potensi dan kebutuhan di tingkat RT/RW, BKM dengan Ketua RW dan Perangkat Desa melakukan *cek and re-cek* terhadap hasil pemetaan swadaya yang dilaksanakan oleh Tim Pemetaan Swadaya. Mereka sangat mengenal warga yang diidentifikasi sebagai miskin dan mereka sangat mengetahui kondisi lingkungan Desanya, sehingga pada saat review dapat dilakukan secara teliti satu per satu.... " (wawancara tanggal 4 April 2005)

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan review terhadap identifikasi masalah, potensi dan kebutuhan di tingkat RT/RW di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal telah sesuai dengan Pedoman Teknis P2KP serta berjalan dengan sangat baik karena BKM, Ketua RW dan Perangkat Desa sangat mengenal warga dan mengetahui dengan baik kondisi lingkungan wilayahnya.

Setelah melakukan review terhadap identifikasi masalah, potensi dan kebutuhan di tingkat RT/RW, kemudian dilaksanakan tahapan penentuan prioritas tingkat RT/RW. Penentuan prioritas menurut Pedoman Teknis P2KP harus dilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masalah melalui pembobotan/*ranking* dan pengelompokan masalah/kebutuhan. Penentuan prioritas di tingkat RT/RW didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Penerima manfaat, semakin besar manfaat bagi masyarakat miskin, semakin besar menjadi prioritas.
- Prinsip Gawat-Mendesak-Penyebaran (GMP), dengan pengertian sebagai berikut :

- Gawat, jika suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan korban jiwa atau materi, semakin besar dan banyak korban yang mungkin ditimbulkan akan semakin gawat.
- Mendesak, seberapa lama suatu masalah dapat ditunda penyelesaiannya semakin tidak dapat ditunda, semakin mendesak.
- Penyebaran, bila suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan masalah baru; semakin banyak masalah baru yang akan ditimbulkan semakin tinggi tingkat penyebarannya.
- Cakupan biaya, yaitu efisiensi penggunaan dana dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang menerima manfaat. Untuk setia nilai uang yang digunakan, semakin banyak warga masyarakat, terutama masyarakat miskin yang akan menerima manfaat akan mempunyai bobot yang tinggi.
- Keterkaitan, semakin banyak keterkaitan suatu masalah dengan masalah/kebutuhan lain, semakin besar peluang untuk menjadi prioritas.

Pada pelaksanaan penentuan prioritas oleh BKM dengan Ketua RW dan Perangkat Desa di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal , kriteria-kriteria di atas digunakan sebagai alat ukur. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Wahidin, salah seorang Anggota BKM sebagai berikut:

"kriteria pembobotan digunakan pada waktu penentuan prioritas, jadi sebelumnya kita, anggota BKM, Ketua RW dan Perangkat Desa diberi penjelasan oleh Ibu Faskel mengenai cara-cara melakukan pembobotan, dijelaskan bagaimana menentukan prioritas berdasarkan kriteria-kriterai gawat mendesak, biaya dan lain-lain saya sudah lupa Mas...terus kita ranking hasil dari Tim Pemetaan Swadaya sesuai dengan nilai bobotnya masing-masing.." (wawancara tanggal 28 Maret 2005)

Ketua BKM Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Bapak Darno memberikan ilustrasi pada saat pembobotan atau penilaian untuk membuat skala prioritas dimana masing-masing pembobotan diberi nilai 1 (rendah) sampai dengan 5 (tinggi), contoh penilaian diuraikannya dengan memperlihatkan lembaran penyusunan skala prioritas dan pembobotan sebagai berikut :

"misalnya hasil pemetaan swadaya menyatakan RT 25 RW 6 membutuhkan perbaikan jalan dengan kategori masalah serius, potensi tinggi dan kebutuhan mendesak, terus kita bahas dalam rapat menentukan prioritas, hasilnya penerima manfaat dinilai 5, GMP dinilai 3, cakupan biaya dinilai 4, keterkaitan dinilai 2 swadaya dinilai 4 dan SDM pelaksana dinilai 4, sehingga total nilai 22 dan rangking 2..."

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dapat dilihat contoh hasil penyusunan skala prioritas dan pembobotan yang dilakukan oleh BKM dengan Ketua RW dan Perangkat Desa di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**Skala Prioritas dan Pembobotan**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Penilaian						Total Nilai	Ran king
			Penerima Manfaat	GMP	Cakup Biaya	Keter kaitan	Swa daya	SDM Pelaksn		
1	Jalan	Rt 25	5	3	4	2	4	4	22	2
2	MCK	Rt 02	2	4	3	2	3	4	18	1
3	Saluran	Rt 09	3	4	2	2	2	4	17	7
4	IPAL	Rt 01	1	3	3	2	4	3	16	5
5	Lamp Jalan	Rt 13	4	4	4	2	4	4	22	1
6	Jembatan	Rt 12	3	3	3	2	3	4	18	5
7	Pemukimn	Rt 25	2	4	3	2	3	4	18	1
8	Pendidikan	Rt 19	2	5	2	2	2	2	15	1
9	Santunan	Rt 23	5	3	2	2	2	2	17	1
10	Prmodalan	Rt 15	2	2	3	3	2	3	15	3

Sumber : Hasil Skala Prioritas dan Pembobotan BKM Mandiri

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa ada 10 jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM pada memanfaatkan dana P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Pada masing-masing jenis kegiatan dibuat ranking dari beberapa usulan yang masuk, misalnya untuk pembuatan MCK ada 3 usulan dari Rt 01, Rt 02 dan Rt 03, kemudian dibuat pembobotan nilai, yang dihsaikan Rt 02 memiliki nilai 18, Rt 01 memiliki nilai 17 dan Rt 03 memiliki nilai 14, sehingga ranking prioritas untuk pembuatan MCK adalah di Rt 02 sebanyak 1 unit.

Demikian halnya untuk kesembilan jenis kegiatan lainnya, di jumlah nilai totalnya, kemudian di ranking, dimana pada tabel di atas untuk perbaikan jalan, RT 25 menempati ranking 2 dari 17 usulan perbaikan jalan, untuk saluran, pada tabel terlihat Rt 09 usulannya menempati ranking 7 dari 11 usulan perbaikan/pembuatan saluran yang masuk. Kemudian untuk IPAL, Rt 01 menempati ranking 5, dari 6 usulan perbaikan/pembuatan IPAL.

Untuk lebih jelas dalam memberikan gambaran penentuan prioritas, berikut diuraikan contoh hasil diskusi, dimana pada saat membahas usulan perbaikan pemukiman dari Rt 25, didapat nilai total 18 dan mendapat ranking 1 dari 9 usulan perbaikan pemukiman sebagai hasil pemetaan swadaya. Usulan-usulan perbaikan pemukiman yang lain juga mendapatkan nilai total yang sama yaitu 18 sehingga semua mendapat ranking 1. Kemudian dalam menentukan siapa dahulu yang mendapatkan bantuan



perbaikan pemukiman dari dana P2KP, para anggota BKM, bersama Ketua RW yang bersangkutan meninjau langsung semua kondisi rumah yang diusulkan mendapatkan bantuan, setelah peninjauan ke lapangan, mereka kembali melakukan diskusi baru kemudian menentukan skala prioritas.

**Gambar 11**  
**Foto Rumah Bapak Sumarno (Sasaran Program)**



Sumber : Arsip Foto-foto Kegiatan BKM Mandiri Desa Pacul

Pada gambar foto di atas, tampak rumah Bp. Sumarno yang berlokasi di RT 25 Rw 6 Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Bapak Sumarno dinilai kondisinya "tidak layak" sehingga perlu mendapat prioritas bantuan dengan segera. Demikian seterusnya pelaksanaan penilaian dan pembobotan serta pembuatan ranking untuk prioritas pemberian bantuan, pada masing-masing jenis kegiatan dan lokasi, yang dilaksanakan oleh BKM beserta Ketua RW dan Perangkat Desa.

Langkah ketiga dalam tahapan review pemetaan swadaya adalah pembentukan Tim Penyusun Draft PJM Pronangkis dan pemberian hasil review untuk disusun PJM Pronangkis sementara. Hal-hal yang dilakukan oleh Tim Penyusun Draft adalah :

- Perumusan Visi dan Misi
- Merumuskan tujuan Pronangkis
- Merumuskan masalah kemiskinan di wilayah Desa
- Merumuskan kegiatan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa khususnya warga miskin
- Penetapan skala prioritas
- Penyusunan Pronangkis sementara

Tim Penyusun Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dibentuk pada tanggal 6 Oktober 2003. Jadi pelaksanaan tugas Tim Penyusun Draft bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif dengan maksud untuk efektifitas kerja dan efisiensi serta menghemat waktu. Pembentukan Tim Penyusun Draft juga dimaksudkan untuk mempermudah proses penyusunan sehingga tidak berbelit-belit dan lebih fokus. Tim Penyusun Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal terdiri dari 5 orang yaitu :

- Ketua : Bp. Makmur (Tokoh Masyarakat)
- Sekretaris : Ibu Amalah (Anggota BKM)

- Anggota : Bp. Wahidin (Anggota BKM)
- Anggota : Bp. Kasnari (Ketua RW 6)
- Anggota : Bp. Surip (Perangkat Desa)

Kelima orang tersebut, melaksanakan tugas penyusunan Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis, dengan dibantu dan didampingi oleh Fasilitator Kelurahan. Pada prakteknya pembahasan dan penyusunan draft dilaksanakan oleh Tim Penyusun dan hampir seluruh anggota BKM dengan didampingi atau berdiskusi bersama Ketua RW dan Perangkat Desa, sebagaimana yang disampaikan Ibu Dewi Milasari, Fasilitator Kelurahan P2KP Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagai berikut :

"pada saat penyusunan draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul, selain Anggota Tim Penyusun Draft, sebanyak 8 orang Anggota BKM terlibat dan Ketua RW serta Perangkat Desa dilibatkan. Penyusunan draft merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan review identifikasi masalah dan penentuan skala prioritas, sehingga pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kalo tidak salah hampir setiap malam selama 1 minggu pada pertengahan Oktober 2003 itu, kita kumpul berdiskusi membahas penyusunan draft PJM Pronangkis." (wawancara tanggal 2 April 2005)

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai salah satu hasil penyusunan draf PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, dalam kotak di bawah ini terdapat hasil rumusan tentang visi dan misi dari PJM Pronangkis BKM Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagai berikut :

**Visi :** Seluruh warga desa Pacul dapat hidup berdampingan tanpa membedakan status sosial, sekaligus dapat membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan.

**Misi :**

1. Meningkatkan kepedulian dan solidaritas antar warga
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat lapis bawah melalui pelatihan dan penyertaan modal usaha
3. Memperbaiki sarana dasar dan prasarana lingkungan
4. Meningkatkan rasa solidaritas antar warga

Tim Penyusun Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul berhasil melaksanakan tugasnya pada tanggal 19 Oktober 2003. Kemudian draft atau rancangan sementara PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal diserahkan kepada BKM untuk disebarluaskan kepada masing-masing RW dengan tujuan agar dijadikan bahan rembug bersama warga masyarakat di masing-masing RW.

***b. Dimensi Pelaksana Program***

**1) Kemampuan Anggota BKM**

Dimensi pelaksana program dilihat dari kemampuan Anggota BKM pada pelaksanaan tahapan review pemetaan swadaya dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka peranan Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) menurut Konsultan (Fasilitator Kelurahan) Ibu Dewi Milasari, sangat besar karena mereka sangat mengenal masing-masing warga di lingkungannya dan memahami serta mengetahui kondisi lingkungan wilayahnya dengan sangat baik, seperti yang diungkapkan oleh Fasilitator Kelurahan sebagai berikut :

“secara umum para Anggota BKM mempunyai kemampuan yang baik pada saat melakukan review pemetaan swadaya, mereka hampir mengenal nama-nama sasaran program yang teridentifikasi oleh Tim Pemetaan Swadaya, mereka juga mengetahui secara persis lokasi-lokasi atau wilayah di lingkungannya yang dinilai membutuhkan bantuan untuk perbaikan. Kemampuan yang baik dari Anggota BKM ini sangat membantu validitas pelaksanaan review pemetaan swadaya. Disini terlihat sekali keeratan hubungan antar warga di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ...”

Kemampuan anggota BKM dalam mengenal warga dan mengetahui kondisi lingkungan dibenarkan oleh Ketua BKM, Bapak Darno, sebagaimana yang dikatakannya sebagai berikut :

“ya... kita banyak kenal dan tahu persis lingkungan, lha wong sehari-hari kita hidup disini, paling tidak semua warga di RW lingkungan saya, saya tahu persis, begitu juga anggota BKM yang lain pasti sama dengan saya...”

Hal senada disampaikan Bapak Siswanto, anggota BKM :

“kalo untuk mengenal ya pasti kital kenal, malah kita tahu persis warga itu kerjaannya apa..., anaknya berapa..., rumahnya bagaimana..., lha saya kan kerjanya di sawah yang ada di Desa ini juga, jadinya bolak balik ya aktifitas saya di sini..”

Kemampuan anggota BKM dalam melakukan tugas review tidak terlepas dari peranan Fasilitator yang memberikan pelatihan

singkat kepada Anggota BKM agar memahami teknis proses review pemetaan swadaya. Anggota BKM mengakui baru kali ini mereka melakukan tugas-tugas review pemetaan swadaya, penentuan prioritas dan sebagainya, mereka tidak pernah mempunyai pengalaman kegiatan serupa pada program-program lain yang pernah dilaksanakan di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Darno, Ketua BKM sebagai berikut :

"saya rasa baru di P2KP ini saya betul-betul sibuk tiap malam, rapat terus, *ngasih* nilai-nilai dan menentukan prioritas ..."

Demikian juga komentar dari Bapak Siswanto, anggota BKM :

"program-program lain seperti IDT, Raskin dan lain-lain saya pernah terlibat, tapi nda pernah melakukan kegiatan rapat tiap malam untuk memberi penilaian dan pembobotan.."

Sedangkan Ibu Amalah, menyatakan sebagai berikut :

"cukup menyenangkan ada kegiatan penilaian, pembobotan dan penentuan prioritas atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan, ini belum pernah saya alami ..."

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota BKM belum mempunyai pengalaman dalam melakukan review, penilaian, pembobotan dan penentuan prioritas pada program-program pemerintah sejenis yang dilaksanakan di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Namun demikian walaupun belum berpengalaman, anggota-anggota BKM banyak yang

menikmati tugas mereka sehingga pekerjaan yang melelahkan tersebut dapat selesai dalam waktu 1 minggu.

## 2) *Sikap Anggota BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari sikap Anggota BKM pada pelaksanaan tahapan review pemetaan swadaya dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dinilai oleh Fasilitator Kelurahan baik. Penilaian baik tersebut dilihat dari keaktifan Anggota BKM dalam rapat-rapat review pemetaan swadaya. Selama 1 minggu lebih, mulai tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober 2003 hampir setiap malam ada kegiatan di Kantor BKM untuk membahas dan berdiskusi tentang review pemetaan swadaya, penentuan prioritas dan penyusunan PJM Pronangkis sementara/draft.

Anggota BKM mengikuti dengan benar langkah-langkah dan prosedur review, identifikasi masalah, pembobotan dan penentuan prioritas sesuai dengan pedoman teknis P2KP dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Fasilitator. Tidak ditemui sikap menolak ataupun menentang prosedur review pemetaan swadaya yang ada pada pedoman teknis P2KP, sebagaimana yang disampaikan oleh Fasilitator Kelurahan sebagai berikut :

"anggota BKM mematuhi semua prosedur dalam pelaksanaan review pemetaan swadaya, tidak ada yang menentang atau

menolak langkah-langkah pembobotan dan penentuan prioritas yang sebenarnya cukup rumit untuk dilaksanakan..” (wawancara tanggal 2 April 2003)

Sikap anggota BKM yang melaksanakan review pemetaan swadaya sesuai dengan prosedur dan petunjuk Fasilitator Kelurahan, menurut beberapa Anggota BKM disebabkan kegiatan review, pembobotan, penentuan prioritas dan penyusunan draft PJM Pronangkis merupakan hal yang sama sekali baru untuk mereka. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Wahidin, Anggota BKM sebagai berikut :

“walaupun hampir setiap malam kita rapat, menilai dan memberi pembobotan, tapi saya merasakan kegiatan ini sangat menarik dan menyenangkan, belum pernah selama ini saya mengikuti kegiatan di masyarakat atau di Desa yang semacam ini, jadi ini bisa saya jadikan pengalaman yang berharga...”

Demikian pula pernyataan dari Ibu Amalah, anggota BKM :

“bukannya saya sok idealis, tapi memang lho kegiatan rapat dan diskusi pemberian nilai dan pembobotan serta penyusunan PJM Pronangkis sementara merupakan kegiatan yang baru pertama saya ikuti, dan menurut saya ini pengalaman yang baik ..”

Namun demikian, walaupun secara umum anggota BKM aktif dalam kegiatan review pemetaan swadaya, ada 2 orang Anggota BKM yang tidak pernah hadir dalam rapat-rapat review pemetaan swadaya selama 1 minggu tersebut. Ketidakhadiran dua orang anggota BKM tersebut dengan alasan adanya kesibukan pekerjaan, seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Darno, Ketua BKM :



"memang sih Pak, dari 11 anggota BKM *mboten* semua aktif hadir di rapat-rapat yang tiap malem itu, paling tidak ada 2 orang yang tidak pernah hadir, alasannya sibuk Pak..., saya sih bisa ngerti, lha wong di BKM kan nda dibayar tho..., kalo nda ada kesadaran sendiri, demi masyarakat yaa males berangkat Pak..., mending *kelon..* he he he ..." (wawancara tanggal 23 Maret 2003)

Dari pernyataan Ketua BKM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua anggota BKM mengikuti dan patuh terhadap prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Ketidapatuhan disebabkan proses pelaksanaan tahapan P2KP sangat panjang, dimulai dari bulan Desember 2002, berbagai kegiatan P2KP mulai dari Rembug Kesiapan Warga sampai dengan Pembentukan BKM membutuhkan waktu selama 10 bulan lebih. Jadi dimungkinka ada kejenuhan dari 2 orang Anggota BKM tersebut, sehingga pada saat pelaksanaan perencanaan partisipatif, khususnya review pemetaan swadaya, mereka tidak aktif dan tidak hadir dalam rapat-rapat.

### 3) *Koordinasi BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari pelaksanaan koordinasi BKM pada pelaksanaan tahapan review pemetaan swadaya dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dinilai sudah baik. Penilaian baik tersebut dilihat dari adanya kerjasama yang baik antara BKM

dengan Ketua RW dan Perangkat Desa dalam melaksanakan rapat-rapat review pemetaan swadaya.

Pembagian tugas antar Anggota BKM tidak dilakukan secara tegas dalam pelaksanaan review pemetaan swadaya ini. Anggota BKM sangat memahami karakteristik warga, permasalahan dan kondisi di lingkungan RW-nya masing-masing. Sehingga setiap kali membahas salah satu wilayah, maka Anggota BKM yang tinggal di wilayah tersebut memberikan informasi yang akurat. Selama melaksanakan review pemetaan swadaya, tidak timbul konflik, baik antar anggota BKM maupun dengan Ketua RW atau Perangkat Desa.

Sarana koordinasi sudah memadai, karena telah disediakan sebuah ruangan di Balai Desa untuk tempat BKM melakukan rapat-rapat dalam pelaksanaan review pemetaan swadaya. Gambar di bawah ini adalah salah satu ruangan di Balai Desa yang digunakan sebagai tempat rapat review pemetaan swadaya :

**Gambar 12**  
**Foto Salah Satu Ruangan di Balai Desa yang Digunakan Untuk Kegiatan BKM**



Sumber : Dokumentasi Peneliti, April 2005

*c. Dimensi Masyarakat Sasaran Program*

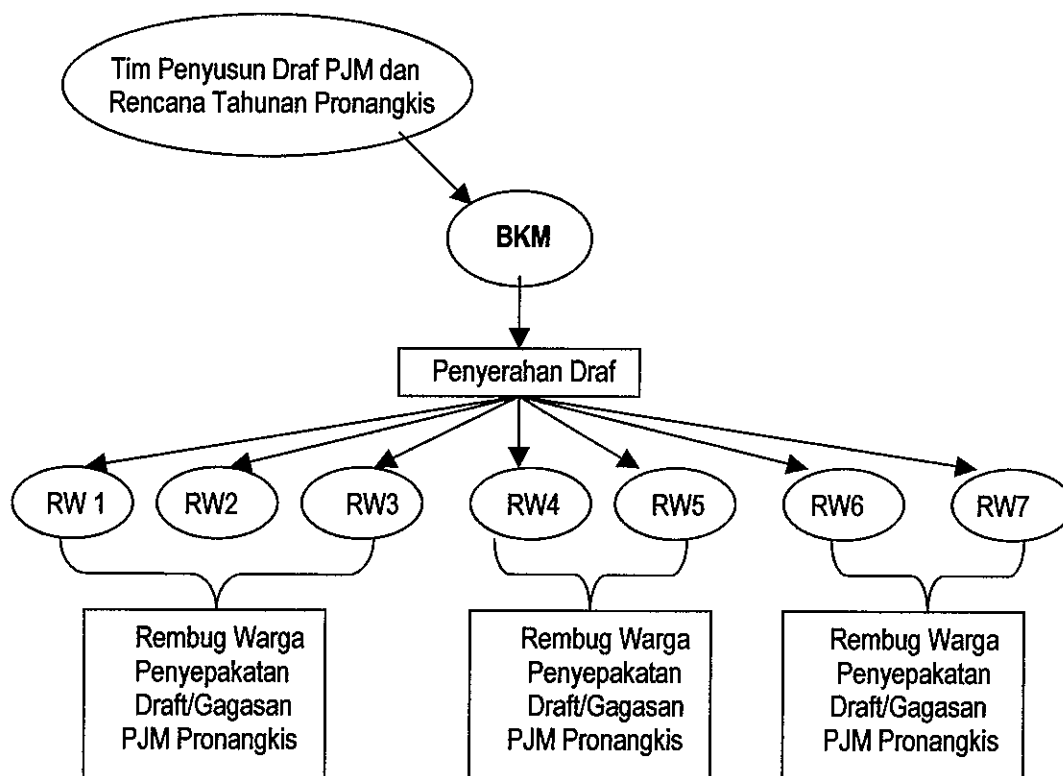
Dimensi masyarakat sasaran program dilihat dari keterlibatan dan pemahaman masyarakat sasaran pada tahapan review pemetaan swadaya, bisa dikatakan kecil sekali. Karena pelaksanaan tahapan review pemetaan swadaya lebih banyak dilaksanakan oleh BKM, Ketua RW dan Perangkat Desa serta Tim Penyusun Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Keterlibatan masyarakat sasaran program justru pada saat pelaksanaan pemetaan swadaya oleh Tim Pemetaan Swadaya, dimana informasi tentang masalah dan kebutuhan dalam penanggulangan kemiskinan didapat dari masyarakat sasaran program.

Peranan masyarakat sasaran program dalam pelaksanaan review pemetaan swadaya adalah apabila dibutuhkan informasi ulang untuk melihat kebenaran data dan fakta di lapangan. BKM dan Ketua RW serta Perangkat Desa akan menanyai langsung kepada warga miskin jika diperlukan informasi tambahan atau untuk mencari kebenaran data yang ada. Misalnya data tentang jumlah tanggungan, seringkali harus ditanyakan kembali kepada yang bersangkutan karena yang tercatat hanya jumlah anak-anaknya, padahal banyak yang memiliki tanggungan keponakan atau juga orangtua (kakek/nenek).

### 3. Rembug Warga

Tahapan selanjutnya dari pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah Rembug Warga membahas masalah, potensi dan kebutuhan penanggulangan kemiskinan Tingkat RT/RW dan melakukan koreksi atas Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Adapun skema Rembug Warga yang merupakan salah satu tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

**Skema 3 :**  
**Skema Rembug Warga Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal**



Sumber : Disusun dari hasil Wawancara dengan Informan

Dari gambar skema di atas dapat terlihat bahwa Rembug Warga merupakan rangkaian lanjutan dari Hasil Review Pemetaan Swadaya yang dilakukan BKM. Review pemetaan swadaya yang menghasilkan list masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat Tingkat RT/RW serta Draft PJM dan Rencana Tahunan yang disusun oleh Tim Penyusun bentukan BKM kemudian diserahkan kepada masing-masing RW untuk dilakukan pembahasan oleh warganya melalui Forum Rembug Warga.

Melalui Rembug Warga ini diharapkan adanya kesepakatan atas gagasan/draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis dalam bentuk koreksi atas list masalah, potensi, kebutuhan dan rencana kegiatan Tingkat RT/RW di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Pada Pedoman Teknis P2KP, Rembug Warga dalam rangkaian pelaksanaan perencanaan partisipatif merupakan salah satu tahapan yang penting karena melibatkan secara langsung warga masyarakat khususnya perempuan dan warga miskin untuk memberikan masukan, saran ataupun koreksi atas perencanaan penanggulangan kemiskinan yang draftnya telah disusun oleh BKM.

Rembug Warga dalam rangkaian tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dilaksanakan tidak sesuai dengan Pedoman Teknis P2KP, dimana seharusnya dilaksanakan pada tiap-tiap RT atau RW dengan harapan akan banyak warga masyarakat miskin sebagai sasaran program yang terlibat dan memberikan masukan serta koreksi atas list masalah, potensi, kebutuhan dan kegiatan

yang ada pada Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, namun Rembug Warga dilaksanakan *cluster* hanya di 3 (tiga) tempat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 20**  
**Pelaksanaan Rembug Warga di Desa Pacul**

No	Sosialisasi	RW	Banyaknya RT	Banyaknya Sasaran
1	Pertemuan pertama, tempat rumah Bapak Surip, tanggal 21 Oktober 2003	Gabungan RW 1, RW 2 dan RW 3	12 RT	107 KK miskin
2.	Pertemuan kedua, tempat rumah Bapak Siswanto, tanggal 25 Oktober 2003	Gabungan RW 4 dan RW 5	9 RT	112 KK miskin
3.	Pertemuan ketiga, tempat rumah Bapak Wahidin, tanggal 29 Oktober 2003	Gabungan RW 6 dan RW 7	11 RT	119 KK miskin

Sumber : BKM Mandiri Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pelaksanaan Rembug Warga dalam rangkaian tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif di tiga tempat tersebut jika dibandingkan dengan jumlah RT yang ada dan jumlah masyarakat sasaran program/KK miskin, maka dimungkinkan tujuan dari rembug warga akan sulit tercapai. Namun demikian pengambilan keputusan untuk melaksanakan sosialisasi secara *cluster* tentu ada pertimbangan lain dari BKM.

Pelaksanaan rembug warga yang secara *cluster* hanya di tiga tempat tersebut menurut Bapak Darno, Ketua BKM Mandiri Desa Pacul mempunyai pertimbangan yang sama dengan pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif yang juga secara *cluster* itu, yaitu dengan

pertimbangan efisiensi dan waktu yang tersedia. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Darno sebagai berikut :

"pelaksanaan rembug warga kita laksanakan sama dengan pelaksanaan sosialisasi perencanaan partisipatif di Desa Pacul, memang dilaksanakan hanya di tiga tempat, alasannya sama juga, ngga ada dana dan waktu yang cukup. Tapi waktu sosialisasi untuk RW 6 kita bagi di dua tempat, khusus untuk rembug warga ini kita jadikan satu dan digabung dengan RW 7 di Rumah Pak Wahidin. ..." (wawancara, tanggal 4 Maret 2005)

Pelaksanaan secara *cluster*, hanya di tiga tempat tentu menyalahi Pedoman Teknis P2KP, karena harapan untuk keterlibatan warga sasaran yang lebih banyak tentu tidak akan tercapai. Mengenai hal ini Fasilitator Kelurahan (pihak Konsultan P2KP) Ibu Dewi Milasari, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan saran untuk pelaksanaan di tiap RW, tetapi dari pihak BKM dan Kepala Desa keberatan, sehingga akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan Rembug Warga secara cluster dengan syarat undangan diperbanyak, dan ada wakil perempuan serta warga miskin dalam jumlah yang signifikan dari masing-masing RT, sebagaimana yang disampaikan oleh Fasilitator Kelurahan :

"pada awalnya saya menolak pelaksanaan rembug warga secara *cluster* hanya di tiga tempat, tetapi kemudian saya menyetujui dengan syarat BKM dan Perangkat Desa bisa menghadirkan warga sasaran dan perempuan pada tiap-tiap rembug dalam jumlah yang banyak dan mewakili tiap-tiap RT yang ada. Karena menurut hemat saya, yang terpenting adalah keterlibatan warga sasaran dalam rembug, walau dilaksanakan pada tiap Rw tapi jika yang hadir warga sasaran sedikit, maka tujuan tidak tercapai, demikian juga sebaliknya" (wawancara tanggal 5 April 2005)

Rembug warga yang dilaksanakan, hasilnya dapat dijelaskan melalui contoh adanya kesepakatan gagasan atas PJM dan Rencana Tahunan sementara, misalnya di RT 2 RW 1 ada usulan pembuatan MCK sebanyak 1 unit dengan biaya diperkirakan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat bantuan dari P2KP Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga diharapkan ada swadaya dari masyarakat Rt 2 RW 1 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada saat rembug warga yang dilaksanakan di rumah Bapak Surip, perwakilan dari RT 2 RW 1 menyatakan siap untuk menyediakan swadaya dari masyarakat sebesar yang diminta, maka diputuskan untuk menyepakati draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis dari jenis kegiatan perbaikan sarana dan prasarana.

*b. Dimensi Pelaksana Program*

1) *Kemampuan Anggota BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari kemampuan Anggota BKM pada pelaksanaan rembug warga pada rangkaian pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menurut Konsultan (Fasilitator Kelurahan) Ibu Dewi Milasari, cukup besar peranannya. Sebelum rangkaian perencanaan partisipatif dilaksanakan, anggota BKM diikutsertakan pada beberapa pelatihan



dasar, diharapkan memiliki kemampuan yang memadai dalam memimpin diskusi atau rapat, adapun materi yang diberikan pada saat pelatihan antara lain kepemimpinan, teknik pengambilan keputusan, manajemen konflik dan teknik berdiskusi.

Peranan dari Anggota BKM dalam setiap rembug warga yang paling menonjol adalah sebagai moderator diskusi atau rembug. Dari ketiga rembug warga yang dilaksanakan, semuanya dimoderatori oleh Anggota BKM. Mengenai kemampuan anggota BKM menjadi moderator acara rembug warga, dikemukakan oleh Bapak Wahidin, anggota BKM sebagai berikut :

"kebetulan acara rembug warga itu kan membahas PJM Pronangkis sementara yang selama 1 minggu lebih sudah kita bahas dan diskusikan bersama di BKM dengan Ketua RW dan Perangkat Desa, jadinya waktu rembug dengan warga, kami menguasai sekali materi-materi yang dibahas.." (wawancara tanggal 23 Maret 2005)

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Amalah :

"kita nglembur tiap malam, rapat mereview pemetaan swadaya dan menyusun PJM Pronangkis sementara membuat kita ngerti apa isinya, sehingga waktu rembug warga, saya berani menjadi moderator, lain pada saat sosialisasi dulu ..."

Dari kedua pernyataan anggota BKM di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan pemahaman materi yang baik timbul keberanian dan kemampuan untuk menjadi moderator pada saat rembug warga. Jika dilihat dari pengalaman menjadi pemimpin diskusi atau rapat atau rembug, rata-rata anggota BKM memang

sudah mempunyai pengalaman dalam berdiskusi atau rapat RT/RW. Kemampuan memandu rembug dipengaruhi tingkat pemahaman materi yang dibahas.

Sedangkan penilaian Fasilitator Kelurahan, Ibu Dewi Milasari tentang kemampuan anggota BKM menjadi moderator rembug desa jika dilihat dari pemahaman terhadap materi rembug sudah baik, tetapi jika dilihat dari cara memimpin diskusi atau rembug masih ada beberapa yang kurang baik, sebagaimana yang disampaikan kepada peneliti sebagai berikut :

"dalam memimpin diskusi pada rembug warga ada beberapa catatan dari saya, misalnya ada yang hanya membacakan Draft PJM Pronangkis kemudian "memaksakan" dalam tanda petik kepada peserta untuk menyetujui hal-hal yang dianggap sepele, tanpa meminta pendapat dahulu dengan alasan untuk mempersingkat waktu. Memang kebetulan rembug baru dilaksanakan pukul 20.00 malam, tapi peran aktif dan keterlibatan warga sasaran yang menjadi tujuan perencanaan partisipatif menjadi kurang maksimal.." (wawancara tanggal 5 April 2005)

Pendapat dari Fasilitator Kelurahan tersebut, secara tidak langsung dibenarkan oleh Bapak Siswanto, anggota BKM yang menjadi tuan rumah rembug warga gabungan RW 4 dan RW 5 yang juga menjadi moderator, beliau menyatakan sebagai berikut :

"jadi waktu rembug di rumah saya, memang saya memimpin rembug, nah supaya acaranya *ora kesuwen, mengko kebengen* (tidak kelamaan, nanti kemalaman) saya minta pendapat warga yang hadir pada masalah-masalah yang penting-penting saja, seperti kesanggupan warga ngumpulin dana swadaya untuk perbaikan jalan, jadi kalo visi, misi dan lain-lain yang begitu-begitu nda usah dibahas.."

## 2) Sikap Anggota BKM

Dimensi pelaksana program dilihat dari sikap Anggota BKM pada pelaksanaan rembug warga yang merupakan rangkaian dari perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, menurut Konsultan (Fasilitator Kelurahan) Ibu Dewi Milasari, secara umum jika dilihat dari tingkat kehadiran Anggota BKM dalam acara rembug warga cukup baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Fasilitator Kelurahan sebagai berikut :

"kehadiran Anggota BKM pada acara rembug warga cukup baik, selain hadir, mereka juga ikut aktif menjadi moderator dan memfasilitasi acara. Memang ada 2 orang yang tidak aktif selama pelaksanaan perencanaan partisipatif, mulai dari sosialisasi sampai dengan rembug warga tidak hadir, dengan alasan kesibukan " (wawancara tanggal 5 April 2005)

Sikap Anggota BKM antusias dan mendukung pelaksanaan rembug warga sebagaimana yang disampaikan Bapak Darno Ketua BKM Mandiri Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagai berikut :

"pelaksanaan rembug warga untuk memberi masukan tentang PJM Pronangkis sementara itu penting sekali, karena merek yang tahu betul kondisi lingkungannya dan hapal betul orang-orang yang akan mendapat bantuan sosial dari P2KP, jadi saya pikir kegiatan rembug warga itu perlu, tapi kerana pertimbangan keuangan dan waktu itu, maka cuma dilaksanakan di 3 tempat saja, nda apa-apa yang penting dilaksanakan ya tho..." (wawancara tanggal 2 April 2005)

Sama dengan pelaksanaan sosialisasi, walaupun secara substansi Anggota BKM antusias dan mendukung pelaksanaan rebug warga, namun demikian pada prakteknya penyelenggaraan rebug warga yang seharusnya dilaksanakan pada setiap RW, BKM memutuskan dilaksanakan secara *cluster* di tiga lokasi, beberapa RW digabung. Keputusan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa BKM mengambil kebijakan yang berbeda dengan pedoman teknis P2KP yang semestinya harus dijadikan acuan, dengan alasan keterbatasan waktu dan dana.

### 3) *Koordinasi BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari koordinasi Anggota BKM pada pelaksanaan rebug warga yang merupakan rangkaian tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, menurut Konsultan (Fasilitator Kelurahan) Ibu Dewi Milasari, secara umum tingkat koordinasi BKM dalam sudah baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Fasilitator Kelurahan sebagai berikut :

"dalam pelaksanaan rebug warga pembagian tugas sama dengan pada saat sosialisasi perencanaan partisipatif, BKM membagi tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi dari 11 Anggota BKM semua mendapatkan tugas pada saat acara sosialisasi di tiga tempat tersebut. Pembagian tugasnya antara lain ada yang ditunjuk

untuk menjadi mempersiapkan terlaksananya acara, mengundang warga, menyiapkan lokasi dan konsumsi acara, dan ada yang menjadi moderator." (wawancara tanggal 5 April 2005)

Dari pernyataan Fasilitator Kelurahan di atas, maka dapat dilihat bahwa pembagian tugas dalam pelaksanaan rembug warga di Desa Pacul oleh Anggota BKM telah dilakukan dengan baik. Sedangkan dalam hal kerjasama baik antar anggota BKM maupun dengan Ketua RW dan Perangkat Desa atas terselenggaranya kegiatan rembug warga juga dinilai baik, karena dalam mempersiapkan selalu ada pembicaraan mengenai rangkaian acara, tempat, peserta rembug dan materi rembug. Intensitas pertemuan antara Anggota BKM dengan Perangkat Desa cukup tinggi, karena sarana tempat koordinasi berada di lingkungan Balai Desa.

Penyediaan salah satu ruangan di Balai Desa menjadi Sekretariat BKM merupakan kebijakan Kepala Desa yang dinilai sangat positif oleh BKM, karena sarana tempat merupakan modal utama dalam berkoordinasi, baik antar anggota BKM maupun dengan pihak lain, terutama Perangkat Desa demi terselenggaranya berbagai tahapan pelaksanaan kegiatan P2KP. Jadi sebelum rangkaian rembug warga dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan rapat persiapan oleh BKM yang dihadiri oleh Fasilitator Kelurahan, Perangkat Desa dan Ketua RW. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua BKM, Bapak Darno sebagai berikut :

"setiap kita mau melakukan kegiatan apa *bae*, mesti kita rapat persiapan terlebih dahulu, begitu juga waktu kita mau *ngadakan* rembug-rembug di tingkat RW, biasanya kita jadwalkan beberapa hari sebelumnya untuk kumpul-kumpul di Balai Desa di ruangan BKM menyiapkan ya.. yang perlu disiapkan apa-apa saja..." (wawancara tanggal 4 April 2005)

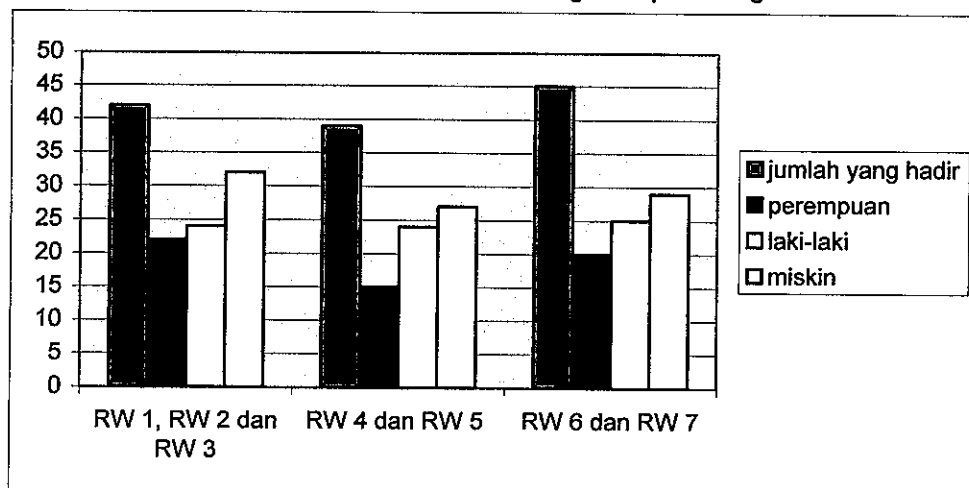
Dari uraian Ketua BKM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi sudah berjalan dengan baik, karena selalu ada persiapan dan pembicaraan diantara BKM dengan Perangkat Desa, selain itu sarana tempat yang ada memungkinkan terjalinnya komunikasi yang baik antara BKM dengan Perangkat Desa.

### *c. Dimensi Masyarakat Sasaran Program*

Dimensi masyarakat sasaran program dilihat dari keterlibatan dan pemahaman masyarakat sasaran pada rembug warga yang merupakan rangkaian perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang diselenggarakan oleh BKM. Tingkat kehadiran warga sasaran program yaitu perempuan dan Kepala Keluarga Miskin merupakan salah satu indikator keberhasilan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Selain kehadiran, pemahaman warga atas materi yang didiskusikan atau menjadi pembicaraan dalam rembug juga menjadi tolok ukur dari keberhasilan pelaksanaan perencanaan partisipatif.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kehadiran sasaran program pada rembug warga yang dilaksanakan di tiga tempat di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka berikut data kehadiran sasaran program, yaitu perempuan dan KK Miskin sebagai berikut :

**Diagram 2**  
**Tingkat Kehadiran Sasaran Program pada Rembug Warga**  
**di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal**



Sumber : Notulensi Rembug Warga milik Fasilitator Kelurahan

Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa tingkat kehadiran warga masyarakat yang menjadi sasaran program P2KP yaitu perempuan dan Kepala Keluarga Miskin pada acara rembug warga relatif lebih banyak dibandingkan pada acara sosialisasi perencanaan partisipatif. Demikian pula dari jumlah keseluruhan yang hadir, ada peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan saat acara sosialisasi perencanaan partisipatif. Hal itu bisa ditunjukkan dari data bahwa kehadiran perempuan di tempat Gabungan RW 1, RW 2 dan RW 3 pada saat rembug warga sebanyak 22 orang

sedangkan pada acara sosialisasi hanya sebanyak 5 orang, kehadiran laki-laki pada rembug warga sebanyak 24 orang, hampir sama karena pada saat sosialisasi yang hadir sebanyak 22 orang. Adapun kehadiran KK Miskin pada rembug warga sebanyak 32 orang dari seluruh yang hadir 42 orang, sedangkan pada saat sosialisasi hanya sebanyak 9 orang dari seluruh peserta yang hadir sebanyak 27 orang. Hal ini dapat diartikan mayoritas yang hadir adalah sasaran program.

Peningkatan jumlah kehadiran warga sasaran program juga tercatat pada dua tempat rembug warga yang lain, yaitu di gabungan RW 4 dan RW 5 serta gabungan RW 6 dan RW 7. Di tempat Gabungan RW 4 dan RW 5 yang menghadiri seluruhnya sebanyak 39 orang dibandingkan pada saat sosialisasi hanya 33 orang. Kehadiran perempuan sebanyak 15 orang sedangkan laki-laki sebanyak 24 orang dan KK Miskin sebanyak 27 orang dari seluruh peserta yang hadir sebanyak 39 orang. Selanjutnya di tempat Gabungan RW 6 dan RW 7 warga yang hadir seluruhnya sebanyak 45 orang, kehadiran perempuan 20 orang sedangkan laki-laki 25 orang dan KK miskin sebanyak 29 orang.

Tingkat kehadiran masyarakat sasaran program pada rembug warga yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan pada sosialisasi perencanaan partisipatif menurut Fasilitator Kelurahan disebabkan adanya kesadaran dari BKM untuk lebih meningkatkan pelibatan warga sasaran untuk hadir dalam rembug warga, sebagai kompensasi dari keputusan



untuk menyelenggarakan rembug warga secara *cluster* hanya di tiga tempat, sebagaimana yang dikemukakan :

"ketika BKM memutuskan untuk menyelenggarakan secara *cluster* seperti pada saat sosialisasi, saya kurang sependapat karena dipastikan jangkauan keterlibatan warga sasaran akan rendah, oleh karena itu saya meminta agar keterlibatan warga sasaran program dalam bentuk kehadiran perlu mendapat perhatian khusus, karena itu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan. Solusinya saya minta BKM untuk mengutamakan warga sasaran program hadir dalam acara rembug, hasilnya memang cukup kelihatan..."

Mengenai adanya peningkatan kehadiran warga sasaran dalam acara rembug warga, menurut Ketua BKM Bapak Darno disebabkan pada saat menyampaikan pemberitahuan acara rembug warga kepada sasaran program, disampaikan pula bahwa ada materi rembug yang membahas tentang program atau kegiatan sosial yang berkaitan langsung mereka. Program sosial dalam Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis dalam bentuk pemberian santunan, dimana pada setiap RT ada 2 sampai 12 orang yang mendapat bantuan. Berikut yang disampaikan Bapak Darno mengenai hal tersebut :

"saya memang minta kepada yang bertugas mengundang atau memberitahu warga sasaran untuk datang pada rembug warga karena nama-nama mereka akan dibahas, mungkin karena itu yaa *dadi akeh sing teka* (jadi banyak yang datang)" (wawancara tanggal 4 April 2005)

Salah satu tujuan diadakannya rembug adalah adanya koreksi atas Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis. Pada saat pelaksanaan rembug di tiga tempat di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tersebut pada umumnya antusias masyarakat yang hadir cukup baik,

banyak komentar, masukan dan koreksi yang disampaikan peserta rembug, karena memang materi rembug menyangkut lingkungan mereka sendiri. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peranan warga pada saat rembug dapat dilihat pada contoh adanya pengisian kolom permasalahan, sebagai berikut :

**Tabel 21**  
**Contoh Masalah Yang Dibahas Dalam Rembug Warga**

	Daftar Kebutuhan hasil Pemetaan Swadaya ( PS – 5 )	Lokasi		Masalah yang ditemui	Faktor Penyebab	Kendala utama	Pandangan Keinginan Masyarakat
		RW	RT				
I	<b>KOMPONEN YANG BERKAITAN DENGAN SARANA DAN PRASARANA</b>						
1.	Pengerasan Jalan	01	01	Transportasi lintas RT kurang lancar	Jalan Kampung sepanjang 100 M pada saat hujan becek	Biaya yang dikumpulkan warga relatif kecil	Segera diperkeras agar tidak becek lagi sehingga memperlancar transportasi
		01	02	Transportasi lintas RT kurang lancar	Jalan Kampung sepanjang 50 M pada saat hujan becek	Biaya yang dikumpulkan warga relatif kecil	Segera diperbaiki baik lewat P2KP maupun DPDK
...	....	...	...	...	...	...	...

Sumber : BKM Mandiri Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Pada isian tabel di atas dapat terlihat komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di RT 01 dan RT 02 RW 1, dari hasil daftar kebutuhan hasil pemetaan swadaya diperlukan pengerasan jalan dengan masalah yang ditemui adalah lalu lintas RT kurang lancar, namun demikian ada kendala utama yaitu biaya yang dikumpulkan warga relatif kecil. Warga yang hadir dalam rembug berkeinginan agar segera dilakukan perbaikan atau diperkeras agar tidak becek lagi sehingga memperlancar transportasi antar RT.

Pembahasan mengenai komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana merupakan materi yang membuat banyak peserta rembug tertarik untuk memberikan masukan dan komentar, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wahidin, anggota BKM yang menjadi tuan rumah rembug warga gabungan RW 6 dan RW 7 dan sekaligus sebagai moderator acara, sebagai berikut :

"warga yang hadir dalam rembug banyak memberikan komentar dan saran waktu kita membahas masalah perbaikan fisik lingkungan Pak., misalnya di RW 6 dan RW 7 ini masalah saluran air menjadi masalah yang penting sekali, lha disini kalo hujan sedikit air sudah *ngembeng* (luber) ke jalan, jadi masyarakat banyak minta supaya masalah saluran air didahulukan pekerjaannya, selain itu rembug juga ramai waktu kita membahas masalah pembiayaan kegiatan fisik..."

Setelah permasalahan dibahas dan warga mempunyai keinginan yang kuat untuk segera dilakukan perbaikan sarana dan prasarana, masih ada kendala lain yaitu biaya untuk kegiatan tersebut. Pada saat rembug juga dibahas mengenai jalan keluar atas biaya dibutuhkan untuk perbaikan, karena dana bantuan dari P2KP hakekatnya hanya sebagai dana stimulan sedangkan swadaya masyarakat merupakan sumber utama, sekaligus sebagai ukuran dari besar kecilnya partisipasi aktif warga terhadap pembangunan di lingkungannya.

Dalam pembahasan masalah pembiayaan kegiatan, warga berrembug mulai dari besarnya volume pekerjaan, besarnya biaya keseluruhan, kemampuan swadaya masyarakat dan permintaan alokasi dana bantuan P2KP. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai

hasil rembuk warga dalam membahas masalah pembiayaan kegiatan, di bawah ini tabel tentang perencanaan biaya komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, sebagai contoh usulan kegiatan komponen sarana dan prasarana dari RW 6 dan RW 7 sebagai berikut :

**Tabel 22**  
**Hasil Rembug Warga RW 6 dan RW 7**  
**Tentang Biaya Kegiatan Komponen Sarana dan Prasarana**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya		
				Swadaya	Usulan Bantuan	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jalan	RT22/RW6	300 m	3.500.000	2.500.000	6.000.000
		RT23/RW6	250 m	3.000.000	3.250.000	6.250.000
		RT24/RW6	200 m	2.000.000	2.000.000	4.000.000
		RT25/RW6	200 m	3.000.000	3.000.000	6.000.000
		RT26/RW6	100 m	500.000	1.000.000	1.500.000
		RT27/RW6	100 m	1.000.000	1.500.000	2.500.000
2.	Saluran	RT23/RW6	22,5 m	350.000	325.000	675.000
		RT25/RW6	45 m	450.000	450.000	900.000
		RT26/RW6	11, 25 m	200.000	150.000	350.000
		RT29/RW7	45 m	450.000	450.000	900.000
		RT30/RW7	33,75 m	400.000	600.000	1.000.000
		RT31/RW7	45 m	450.000	450.000	900.000
		RT32/RW7	45 m	450.000	450.000	900.000
3.	Lampu jalan	RT23/RW6	2 unit	500.000	500.000	1.000.000
		RT25/RW6	1 unit	100.000	250.000	350.000
4.	Jembatan	RT24/RW6	2 m	200.000	300.000	500.000
		RT27/RW6	2 m	200.000	300.000	500.000

Sumber : BKM Mandiri Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Dari tabel di atas, dapat terlihat gambaran tentang hasil rembuk warga di RW 6 dan RW 7 yang antara lain membahas tentang perhitungan biaya kegiatan komponen sarana dan prasarana. Sedangkan dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan komponen sosial dan

permodalan, warga diajak untuk ikut aktif mendata ulang warga di RW 6 dan RW 7 yang dinilai merupakan sasaran dari P2KP dan berhak untuk mendapatkan bantuan, baik dalam komponen sosial maupun permodalan. Kemudian dihasilkan data terbaru yang merupakan hasil rembug di RW 6 dan RW 7 tentang jumlah sasaran program di masing-masing RT baik yang akan mendapatkan bantuan sosial maupun bantuan permodalan, sebagaimana data pada tabel berikut ini :

**Tabel 23**  
**Hasil Rembug Warga RW 6 dan RW 7**  
**Tentang Jumlah Sasaran Komponen Sosial dan Permodalan**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Jumlah Sasaran
<b>Komponen Yang Berkaitan Dengan Rencana Pengembangan Sosial</b>			
1.	Santunan	RT 22 / RW 6	5 orang
		RT 23 / RW 6	12 orang
		RT 24 / RW 6	9 orang
		RT 25 / RW 6	6 orang
		RT 26 / RW 6	9 orang
		RT 27 / RW 6	8 orang
		RT 28 / RW 7	10 orang
		RT 29 / RW 7	6 orang
<b>Komponen Yang Berkaitan Pengembangan Usaha Produktif</b>			
2.	Permodalan	RT 22 / RW 6	15 orang
		RT 23 / RW 6	2 orang
		RT 24 / RW 6	2 orang
		RT 25 / RW 6	7 orang
		RT 26 / RW 6	2 orang
		RT 27 / RW 6	3 orang
		RT 28 / RW 7	6 orang
		RT 29 / RW 7	3 orang
		RT 30 / RW 7	2 orang
		RT 31 / RW 7	7 orang
		RT 32 / RW 7	4 orang

Sumber : BKM Mandiri Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Dengan adanya ilustrasi tentang hasil rembuk warga di RW 6 dan RW 7 yang membahas Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tega, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan warga dalam rembuk dinilai sudah baik dengan adanya masukan, usul dan koreksi dari warga sasaran terhadap list masalah, potensi, kebutuhan, dan Draft PJM Pronangkis.

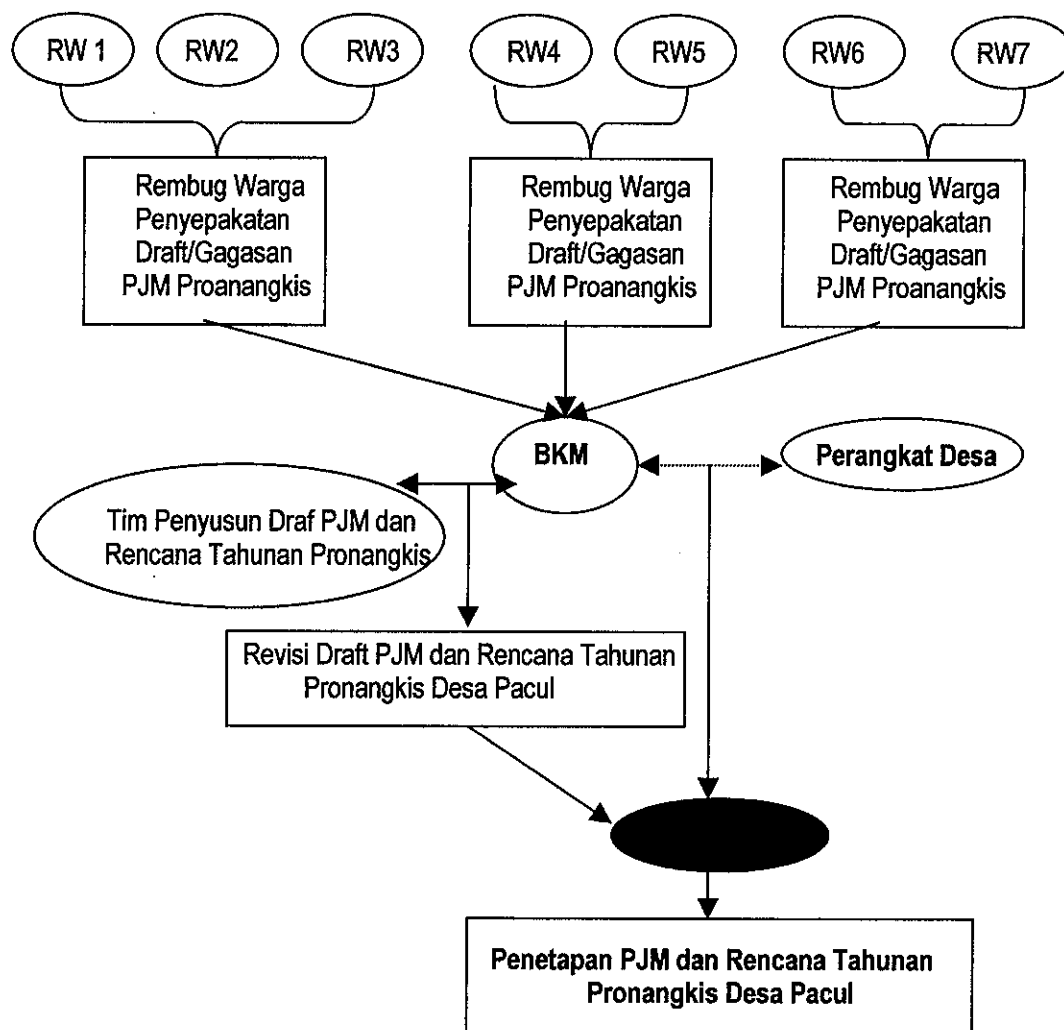
#### **4. Lokakarya PJM Pronangkis Tingkat Desa**

##### *a. Dimensi Program*

Tahapan selanjutnya dari pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah pelaksanaan Lokakarya PJM Pronangkis Tingkat Desa yaitu merupakan proses yang dilakukan seluruh unsur masyarakat Desa untuk menghasilkan kesepakatan warga atas Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis yang telah dibahas oleh masing-masing RW dalam kegiatan Rembug Warga. Melalui forum Lokakarya PJM Pronangkis Tingkat Desa ini diidentifikasi pemecahan masalah dan pemanfaatan produksi secara terpadu dan sistematis.

Adapun skema Lokakarya yang merupakan salah satu tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

Skema 4 :  
Skema Lokakarya PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis



Sumber : Disusun dari hasil Wawancara dengan Informan

Dari gambar skema di atas, dapat dijelaskan bahwa setelah dilaksanakan rebug warga di masing-masing RW dimana dihasilkan penyepakatan Tingkat RW oleh warga tentang Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis yang berkaitan dengan wilayah masing-masing. Kemudian hasil rebug tersebut diserahkan kepada BKM untuk

disempurnakan bersama dengan Tim Penyusun Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Tingkat Desa Pacul. Hasil masukan dan koreksi dari rembug-rembug warga dijadikan acuan oleh Tim Penyusun untuk melakukan revisi atas Draf PJM Peronangkis.

Hasil revisian PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul kemudian disusun dan disiapkan oleh BKM untuk dijadikan materi utama pada Lokakarya Tingkat Desa dengan tujuan mendapatkan kesepakatan secara luas oleh warga masyarakat di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Pada saat yang bersamaan BKM berkoordinasi dengan Perangkat Desa mempersiapkan pelaksanaan lokakarya PJM Pronangkis Tingkat Desa.

Lokakarya PJM Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dilaksanakan pada tanggal 6 Nopember 2003 yang dihadiri oleh 36 orang warga yaitu 29 orang laki-laki dan 7 orang perempuan yang merupakan utusan dari masing-masing RW. Pada pelaksanaan lokakarya ini akhirnya disepakati PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

*b. Dimensi Pelaksana Program*

*1) Kemampuan Anggota BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari kemampuan Anggota BKM pada pelaksanaan Lokakarya PJM dan Rencana Tahunan



Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menurut Konsultan (Fasilitator Kelurahan) Ibu Dewi Milasari, cukup baik, hal ini terlihat dari persiapan lokakarya sampai dengan acara berlangsung.

Pada saat berlangsungnya acara, yang menjadi Pimpinan Acara adalah Ketua BKM yang didampingi oleh Fasilitator Kelurahan dan salah seorang Anggota BKM yang bertugas mempresentasikan Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis. Berikut foto pelaksanaan tugas pada saat Lokakarya PJM Pronangkis, dimana pada gambar terlihat Ketua BKM Bapak Darno, Fasilitator Kelurahan Ibu Dewi Milasari dan Ibu Amalah, Anggota BKM yang bertugas mempresentasikan Draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal :

**Gambar 13**  
**Kemampuan BKM Memimpin Rapat Lokakarya PJM Pronangkis**  
**Di Balai Desa Pacul Pada Tanggal 6 Nopember 2003**



Sumber : Arsip Foto-foto Kegiatan BKM Mandiri Desa Pacul

Penilaian baik terhadap kemampuan anggota BKM dalam melaksanakan kegiatan Lokakarya PJM Pronangkis Tingkat Desa didasarkan pada kemampuan BKM berinteraksi dengan Perangkat Desa dan Masyarakat Sasaran Program sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan lokakarya itu sendiri. Kemampuan yang cukup terlihat pada anggota BKM pada saat pelaksanaan lokakarya adalah dalam hal mempresentasikan PJM dan Rencana tahunan Pronangkis dan kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta lokakarya. Hal tersebut dikemukakan Fasilitator Kelurahan, Ibu Dewi Milasari sebagai berikut

"saya menilai anggota BKM mampu mempresentasikan PJM Pronangkis dengan baik, selain itu juga anggota yang lain ikut membantu apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut wilayah tempat mereka ikut rebug warga yang menyepakati Draft PJM Pronangkis..."

Sedangkan jika dilihat dari pengalaman, hampir semua anggota BKM tidak mempunyai pengalaman yang cukup dalam menyelenggarakan event semacam lokakarya, selama ini mereka hanya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Musbangdes atau Rapat-rapat Tingkat Desa tanpa pernah dilibatkan dalam kepanitian atau ikut mempersiapkan apalagi menyelenggarakan kegiatan.

Jika dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam Lokakarya PJM Pronangkis yang hanya 36 orang, dinilai masih sedikit mengingat

jumlah RT di Desa Pacul ada sebanyak 32 RT, tidak semua RT mengirimkan wakil-wakilnya. Kondisi ini merupakan salah satu kekurangan yang paling menonjol dari kemampuan BKM dalam menyelenggarakan Lokakarya. BKM tidak mampu membuat masyarakat tertarik untuk hadir dalam kegiatan ini. Alasan yang dikemukakan oleh Ketua BKM, Bapak Darno adalah :

"kalo menurut saya, masyarakat sudah capek..., kegiatan P2KP sering sekali dan dana *ora mudun-mudun*, selain itu juga masyarakat banyak yang merasa sudah ikut waktu rembug dulu, terus ini kan cuma untuk ngesahin hasil rembug, jadi Pak RT saja yang datang... (wawancara tanggal 4 April 2005)

Dari pernyataan Ketua BKM tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa BKM memang kurang berusaha untuk mengikutsertakan masyarakat sasaran untuk terlibat dan hadir pada lokakarya, yang dipentingkan adanya perwakilan dari masing-masing RT dan ternyata tidak semua RT mengirimkan perwakilannya. Adanya anggapan bahwa kehadiran warga sasaran program kurang penting juga merupakan indikator dari kurangnya kemampuan BKM dalam memahami tujuan dari pelaksanaan perencanaan partisipatif, yang mana partisipasi aktif masyarakat sasaran program sangat penting dalam semua tahapan kegiatan, termasuk lokakarya.

## 2) Sikap Anggota BKM

Dimensi pelaksana program dilihat dari sikap Anggota BKM pada pelaksanaan lokakarya yang merupakan rangkaian dari perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, menurut Konsultan (Fasilitator Kelurahan) Ibu Dewi Milasari, secara umum jika dilihat dari tingkat kehadiran Anggota BKM dalam acara lokakarya sudah baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Fasilitator Kelurahan sebagai berikut :

"kehadiran Anggota BKM pada acara lokakarya sudah baik, dari 11 Anggota, hanya 2 orang yang tidak hadir, dan 2 orang tersebut memang sudah tidak aktif dalam beberapa rangkaian kegiatan yang lain, sedangkan yang hadir, mereka juga ikut aktif mempersiapkan acara, menjadi pimpinan pertemuan dan mempresentasikan PJM Pronangkis." (wawancara tanggal 5 April 2005)

Mengenai ketidakhadiran 2 orang anggota BKM dalam kegiatan lokakarya ini, menurut salah satu anggota BKM, Bapak Siswanto disebabkan tidak adanya kebijakan insentif bagi BKM mempengaruhi semangat kerja dari beberapa anggota BKM, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut :

"kegiatan BKM itu banyak sekali, hampir setiap malam kita kumpul, rapat terus, kegiatan yang harus dilaksanakan banyak sekali, tanggung jawab kami juga besar karena berkaitan langsung dengan masyarakat, tapi dari P2KP tidak ada kebijakan insentif untuk kami, ada beberapa teman yang sempat *rasan-rasan* (berbicara dari hati ke hati) mengenai insentif..., barangkali dimungkinkan untuk bisa dapat, paling

tidak ngganti transport lah ... (wawancara tanggal 2 April 2005)

Berkaitan dengan adanya keinginan dari beberapa anggota BKM untuk mendapatkan uang transport atau insentif, Fasilitator Kelurahan menyatakan sebagai berikut :

"memang pada saat pelaksanaan lokakarya, ada anggota BKM yang merasakan bahwa pekerjaan mereka telah selesai sampai dengan tersusunnya PJM Pronangkis, mereka merasa lelah karena hampir 6 minggu, tenaga, pikiran dan mungkin juga dana keluar demi melaksanakan tugas sebagai anggota BKM. Tetapi kebijakan P2KP memang tidak memberikan insentif bagi BKM, karena menurut P2KP anggota BKM yang terpilih itu merupakan orang-orang terpilih yang memiliki jiwa sukarelawan yang tinggi dan merupakan pejuang-pejuang nilai-nilai luhur yang bersedia berkorban tenaga, pikiran dan mungkin dana untuk masyarakat miskin di lingkungannya..." (wawancara tanggal 5 April 2005)

Jadi permasalahan tentang keinginan untuk mendapatkan insentif baru muncul setelah selesainya acara lokakarya, beberapa Anggota BKM seperti merasakan pelaksanaan tugas BKM selama ini begitu berat, sehingga pantas kiranya untuk mendapatkan kompensasi. Kondisi ini cukup mempengaruhi kinerja BKM pada tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya.

### 3) *Koordinasi BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari koordinasi BKM pada pelaksanaan lokakarya yang merupakan rangkaian tahapan

pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal diukur dari adanya pembagian tugas antar anggota BKM, adanya semangat kerjasama, tersedianya fasilitas tempat dalam mempersiapkan acara dan penyelenggaraan lokakarya.

Menurut Ketua BKM, Bapak Darno, BKM Desa Pacul menyepakati untuk membagi tugas baik dalam persiapan maupun pada saat penyelenggaraan lokakarya. Pada saat persiapan acara lokakarya, ada anggota BKM yang bertugas menjalin komunikasi dengan Kepala Desa dan Perangkatnya untuk membahas masalah tempat lokakarya yang ditetapkan diselenggarakan di Ruang Pertemuan Balai Desa Pacul. Ada juga anggota BKM yang bertanggungjawab terhadap undangan peserta lokakarya, selain itu juga ada yang menyiapkan materi PJM Pronangkis yang akan dibahas pada saat lokakarya.

Adanya pembagian tugas ini dibenarkan oleh Fasilitator Kelurahan sebagai berikut :

“beberapa hari sebelum pelaksanaan, kami mengadakan rapat dengan BKM untuk menyiapkan lokakarya, pada rapat tersebut diputuskan pembagian tugas masing-masing anggota BKM, Pembagian tugasnya antara lain ada yang ditunjuk untuk mempersiapkan acara dan ada yang bertugas penuh pada saat pelaksanaan lokakarya.” (wawancara tanggal 5 April 2005)

Dari pernyataan Fasilitator Kelurahan di atas, maka dapat dilihat bahwa pembagian tugas dalam pelaksanaan lokakarya di Desa Pacul oleh Anggota BKM telah dilakukan dengan baik.

Sedangkan dalam hal kerjasama antara anggota BKM dengan Ketua RW dan Perangkat Desa atas terselenggaranya kegiatan lokakarya dinilai kurang baik. Komunikasi antara anggota BKM yang bertanggungjawab terhadap urusan undangan dengan Ketua RW dan Perangkat Desa ternyata tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari tingkat kehadiran perwakilan RT di lokakarya ternyata rendah, target yang ditentukan oleh BKM adalah ada minimal 4 wakil dari masing-masing RT, tapi kenyataannya hanya 36 orang saja yang hadir.

### *c. Dimensi Masyarakat Sasaran Program*

Dimensi masyarakat sasaran program dilihat dari keterlibatan dan pemahaman masyarakat sasaran pada kegiatan lokakarya yang merupakan rangkaian perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang diselenggarakan oleh BKM. Tingkat kehadiran warga sasaran program yaitu perempuan dan Kepala Keluarga Miskin merupakan salah satu indikator keberhasilan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Selain kehadiran, pemahaman warga

atas materi PJM Pronangkis yang dipresentasikan menjadi tolok ukur dari keberhasilan pelaksanaan perencanaan partisipatif.

Jika dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat sasaran program pada acara lokakarya tentu sangat rendah sekali, karena yang hadir kebanyakan tokoh masyarakat atau pengurus RT sebagai perwakilan dari RT. Dari 36 orang yang hadir dimana jumlah perempuan hanya 7 orang juga merupakan sebuah indikator dari kurang berhasilnya pelibatan sasaran program dalam kegiatan lokakarya tersebut.

Keterlibatan warga sasaran dan masyarakat yang hadir pada Lokakarya terlihat saat dipresentasikan prioritas Rencana Program Tahun Pertama, Kedua dan Ketiga. Ada masukan, kritikan dan protes yang disampaikan oleh perwakilan RT yang wilayahnya tidak mendapat prioritas pada tahun pertama. Sebagai contoh permasalahan yang sempat menjadi pertanyaan dan protes saat penentuan prioritas, yang tidak dilaksanakan pada tahun pertama adalah rencana program pembangunan MCK di RT 01 dan RT 02 / RW 1. Jika dilihat dari permasalahan yang ada dan tingkat kebutuhan masyarakat sekitar RT 01 dan RT 02 / RW 1, kebutuhan MCK merupakan hal yang mendesak, tetapi karena sumber dana untuk pembuatan MCK bukan hanya dari P2KP, tetapi juga swadaya masyarakat, maka besar kecilnya nilai dana swadaya masyarakat dijadikan pedoman untuk menentukan prioritas kegiatan tahun pertama, kedua dan ketiga.



Gambar foto di bawah ini merupakan rencana tempat dibangun MCK yang berada di RW 1 Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal :

**Gambar 14**  
**Foto Rencana Tempat Pembangunan MCK di RW 1**



Sumber : Dokumentasi Peneliti, April 2005

Masyarakat miskin di RW 1 pada umumnya tidak memiliki WC di rumahnya, sehingga selama ini tempat tersebut digunakan terutama pada pagi dan malam hari. Ketika dipresentasikan oleh BKM bahwa rencana pembangunan MCK di tempat tersebut tidak dilaksanakan pada tahun pertama, perwakilan dari RW 1 protes dan meminta agar diprioritaskan dengan pertimbangan kebutuhan yang tinggi dari masyarakat sasaran program P2KP. Namun demikian nilai dana swadaya dari masyarakat ternyata kecil, hal tersebut dijadikan alasan utama oleh BKM dalam menentukan prioritas sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BKM, Bapak Darno sebagai berikut :

"yang saya ingat pada lokakarya itu memang ada beberapa protes dari warga yang hadir mengenai prioritas pembangunan fisik tahun pertama, terutama protes dari RW 1 yang meminta pembangunan MCK diprioritaskan, tetapi mereka tidak bisa menyediakan dana swadaya yang mencukupi, akhirnya kami memutuskan pembangunan MCK tidak prioritas tahun pertama, lha kalo dipaksakan nanti dana pembangunan kurang, malah terbengkalai, kan kita juga dari BKM yang repot dan nanti disalahkan warga, jadi kita putuskan wilayah yang dana swadayanya juga siap, sehingga pembangunan fisik lancar..." (wawancara tanggal 4 April 2005)

Jadi pada saat pelaksanaan lokakarya, keterlibatan warga yang hadir dalam bentuk memberikan saran, masukan dan koreksi serta bahkan protes atas PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis. Hal tersebut merupakan dinamika yang sehat dan menjadi pengalaman yang baik bagi warga masyarakat karena mereka menentukan sendiri rencana-rencana kegiatan mulai dari pendanaan sampai pada pelaksanaan.

Sedangkan apabila dilihat dari tingkat pemahaman warga sasaran program pada saat lokakarya, hanya sebagian kecil masyarakat sasaran program yang memahami manfaat dan tujuan dari pelaksanaan lokakarya PJM Pronangkis. Menurut Ketua BKM, Bapak Darno warga sasaran merasa sudah cukup berpartisipasi pada saat rembuk warga, sedangkan lokakarya menjadi tanggung jawab dari pengurus RT atau RW yang pada saat rembuk juga hadir, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut :

"pada waktu dilaksanakan rembuk warga, sebenarnya kami sudah *nyampekn* (menyampaikan) kepada warga yang hadir untuk mempersilakan ikut hadir lagi pada lokakarya, tapi kebanyakan warga bilang, biar itu urusannya Pak RT *karo* Pak RW *bae...*" (wawancara tanggal 4 April 2005)

Dari pernyataan tersebut, dapat diambil garis merah mengenai pemahaman masyarakat sasaran program tentang pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, dimana sebagian besar warga sebenarnya kurang memahami proses dan tahapan penyusunan PJM Pronangkis. Kehadiran warga sasaran pada saat sosialisasi, rebug dan kemudian lokakarya di Desa Pacul cukup rendah, sehingga dapat dipastikan pemahaman mereka terhadap proses dan tahapan kegiatan perencanaan partisipatif juga rendah. Masyarakat kurang memahami arti penting dari keterlibatan mereka dalam penyusunan PJM Pronangkis, mereka masih merasa sebagai kalangan yang tidak penting.

## **5. Penyebarluasan Hasil Lokakarya**

### ***a. Dimensi Program***

Tahapan selanjutnya dari pelaksanaan perencanaan partisipatif setelah dilaksanakan Lokakarya di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah penyebarluasan hasil Lokakarya PJM Pronangkis Tingkat Desa ke seluruh komponen masyarakat di Desa untuk mendapatkan umpan balik. Tujuan dari penyebarluasan hasil lokakarya adalah agar semua pihak memahami dan peduli pada Pronangkis yang telah disusun serta agar ada masukan dan penyempurnaan dari masyarakat setempat.

Pada pedoman teknis P2KP, penyebaran hasil lokakarya dilaksanakan menggunakan berbagai media dan diinformasikan kepada

seluruh lapisan masyarakat di Desa. Sedangkan pada pelaksanaannya di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, BKM dalam menyebarluaskan hasil lokakarya hanya memberikan foto copian hasil lokakarya kepada setiap RW untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga melalui pertemuan-pertemuan rutin warga. BKM Desa Pacul tidak menyebarluaskan secara khusus, atau memperbanyak serta menempel di papan pengumuman yang ada di sekitar Desa. Mengenai hal ini, Ketua BKM, Bapak Darno menyatakan sebagai berikut :

"pada saat itu kami tidak ada dana untuk memperbanyak PJM Pronangkis hasil lokakarya, jadi kami hanya menyampaikan foto copian hasil lokakarya kepada Ketua RW, karena di RT-RT kan setiap bulan ada kumpulan, kami harapkan informasi Pronangkis dapat disampaikan pada kumpulan tersebut..., kami juga nda menempel di papan pengumuman mengenai hasil lokakarya "

Tidak dilaksanakannya dengan baik penyebarluasan hasil lokakarya menyebabkan tidak adanya umpan balik dari warga sasaran selama masa tenggang, sehingga kesepakatan pada lokakarya tersebut akhirnya ditetapkan sebagai PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya hasil lokakarya berupa PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis adalah dilakukannya rembug-rembug warga di lokasi atau RT/RW yang mendapatkan prioritas bantuan P2KP pada tahun pertama.

*b. Dimensi Pelaksana Program*

*1) Kemampuan Anggota BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari kemampuan Anggota BKM pada pelaksanaan penyebarluasan hasil Lokakarya PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menurut Konsultan (Fasilitator Kelurahan) Ibu Dewi Milasari, kurang baik, hal ini terlihat dari kurangnya inisiatif dari BKM untuk menyebarluaskan hasil lokakarya menggunakan media yang ada di Desa, seperti ditempel pada papan pengumuman yang ada di beberapa lokasi di Desa. BKM hanya menyampaikan hasil lokakarya kepada Ketua RW dan mengharapkan adanya tindak lanjut penyebarluasan kepada warga melalui pertemuan-pertemuan rutin yang dilaksanakan tiap-tiap RT/RW.

Penyebarluasan hasil lokakarya PJM pronangkis yang kurang baik di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal memberikan indikasi rendahnya kemampuan BKM dalam memahami tujuan dari pelaksanaan perencanaan partisipatif, karena dengan kondisi yang demikian semakin sedikit warga masyarakat yang mengetahui apalagi memahami Pronangkis. BKM juga tidak mempunyai pengalaman yang cukup dalam penyebarluasan informasi,

## 2) *Sikap Anggota BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari sikap Anggota BKM pada penyebaran hasil lokakarya yang merupakan rangkaian dari perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, menurut Konsultan (Fasilitator Kelurahan) Ibu Dewi Milasari, secara umum aktivitas dan semangatnya menurun, jika dibandingkan dengan tahapan kegiatan sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Fasilitator Kelurahan sebagai berikut :

“seperti ada anggapan bahwa tugas utama BKM dalam menyusun PJM Pronangkis sudah selesai, sehingga pada tahapan penyebarluasan hasil lokakarya justru kurang mendapat perhatian dari BKM, kelihatan semangat kerjanya sudah menurun, dan mulai ada wacana “insentif” dari beberapa orang anggota BKM”  
(wawancara tanggal 5 April 2005)

Adanya wacana “insentif” dikalangan anggota BKM merupakan dampak dari beban tugas dan tanggung jawab serta banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh BKM. Tidak adanya “insentif” dimungkinkan menyebabkan semangat kerja dari BKM turun. Kemudian tahapan penyebaran hasil lokakarya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis P2KP merupakan salah satu indikasi dari adanya sikap yang kurang mendukung kebijakan atau program.

### 3) *Koordinasi BKM*

Dimensi pelaksana program dilihat dari koordinasi BKM pada pelaksanaan penyebaran hasil lokakarya yang merupakan rangkaian tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal jika diukur dari adanya pembagian tugas antar anggota BKM, maka tidak ada pembagia tugas yang jelas pada saat penyebaran hasil lokakarya.

Pada saat penyebaran hasil lokakarya, kerjasama BKM dengan Ketua RW dijadikan modal utama dalam pelaksanaan tahapan ini. BKM menyerahkan hasil lokakarya kepada Ketua RW dan diharapkan ada tindaklanjutnya dalam bentuk rembug-rembug warga yang untuk mempersiapkan kegiatan prioritas tahun pertama.

Komunikasi antara anggota BKM pada saat tahapan penyebaran hasil lokakarya dirasakan kurang, karena berbeda dengan tahapan sebelumnya yang selalu membicarakan rencana pelaksanaan tugas tetapi pada saat penyebarluasan hasil lokakarya tidak ada rapat khusus.

*c. Dimensi Masyarakat Sasaran Program*

Dimensi masyarakat sasaran program dilihat dari keterlibatan dan pemahaman masyarakat sasaran terhadap hasil lokakarya berupa PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang diselenggarakan oleh BKM. Pada tahapan ini, penyebaran hasil lokakarya tidak dilakukan secara baik oleh BKM karena hanya mengandalkan peranan Ketua RW untuk menyampaikan kepada warganya masing-masing. Jadi keterlibatan dari masyarakat baru terlihat ketika dilakukan rembuk warga untuk menindaklanjuti hasil lokakarya dalam bentuk kegiatan atau program komponen fisik / perbaikan lingkungan, sosial maupun ekonomi yang menyangkut wilayahnya masing-masing.

Sedangkan mengenai pemahaman warga masyarakat sasaran terhadap hasil lokakarya PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal hanya sedikit warga yang mengetahui dan dipastikan lebih sedikit lagi yang memahaminya. Warga sasaran lebih mengetahui dan memahami keputusan hasil rembuk yang mereka ikuti, tetapi tidak banyak mengetahui dan memahami apabila ada perubahan pada saat lokakarya.



Sebagai ringkasan dari uraian hasil penelitian pelaksanaan perencanaan partisipatif dari seluruh tahapan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, dilihat dari Dimensi Program, Dimensi Pelaksana Program dan Dimensi Masyarakat Sasaran Program, di bawah ini penulis sarikan dalam bentuk tabel mengenai bentuk partisipasi dan hambatan yang ditemukan dalam setiap tahapan sebagai berikut :

**Tabel 24**  
**Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif**

Tahapan 1	Bentuk Partisipasi 2	Hambatan 3
Sosialisasi Perencanaan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehadiran masyarakat diharapkan tinggi dengan tujuan dapat memahami proses dan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif</li> <li>• Tetapi kenyataannya masyarakat sasaran yaitu KK Miskin dan Kaum Perempuan yang hadir sedikit.</li> <li>• Masyarakat sasaran kurang memahami materi sosialisasi, lebih banyak menanyakan hal lain tentang P2KP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan secara <i>cluster</i> di tiga tempat</li> <li>• Acara malam hari, perempuan di Desa Pacul hadir pada kegiatan di malam hari hanya pada pengajian</li> </ul>
Review Pemetaan Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan swadaya dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat dari masing-masing RT yang menjadi anggota Tim Pemetaan Swadaya</li> <li>• Masyarakat sasaran dimintai keterangan, informasi dan data tambahan untuk kelengkapan dan pengecekan kebenaran hasil pemetaan swadaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membutuhkan ketelitian dan kecermatan dari BKM dalam melakukan review, padahal materi yang harus direview cukup banyak..</li> <li>• Pedoman untuk melakukan penilaian dan pembobotan sulit dipahami dengan baik oleh BKM</li> </ul>

1	2	3
Rembug Warga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehadiran masyarakat sasaran sudah lebih banyak jika dibandingkan pada saat kegiatan sosialisasi</li> <li>• Masyarakat cukup antusias dalam pembahasan komponen perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, banyak yang memberikan masukan, saran dan koreksi atas Draft PJM Pronangkis</li> <li>• Masyarakat sasaran memberikan koreksi dan informasi pada saat membicarakan komponen bantuan sosial dan permodalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rembug warga secara <i>cluster</i> di tiga tempat, kehadiran masyarakat walau sudah lebih baik dibandingkan pada saat sosialisasi tetapi tetap masih rendah.</li> </ul>
Lokakarya PJM Pronangkis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga masyarakat yang hadir menyepakati PJM Pronangkis, yang merupakan hasil koreksi dan keputusan warga pada kegiatan rembug warga</li> <li>• Warga yang hadir merupakan perwakilan dari RT-RT yang ada di Desa Pacul, namun tidak semua wakil RT hadir pada acara Lokakarya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga sasaran program yang hadir sangat sedikit, karena undangan merupakan perwakilan RT, sehingga peserta Lokakarya didominasi Tokoh Masyarakat.</li> </ul>
Penyebaran Hasil Lokakarya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil lokakarya diserahkan Ketua RT/RW masing-masing dengan tujuan agar disampaikan kepada warganya pada saat rembug atau pertemuan-pertemuan warga.</li> <li>• Warga masyarakat tidak memberikan umpan balik atas kesepakatan PJM Pronangkis.</li> <li>• Warga masyarakat yang wilayahnya mendapatkan prioritas perbaikan sarana dan prasarana fisik, menindaklanjuti rembug warga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semangat kerja BKM sudah mulai menurun, hasil kesepakatan Lokakarya tidak tersebarluaskan melalui media-media atau papan pengumuman yang ada di Desa Pacul</li> </ul>

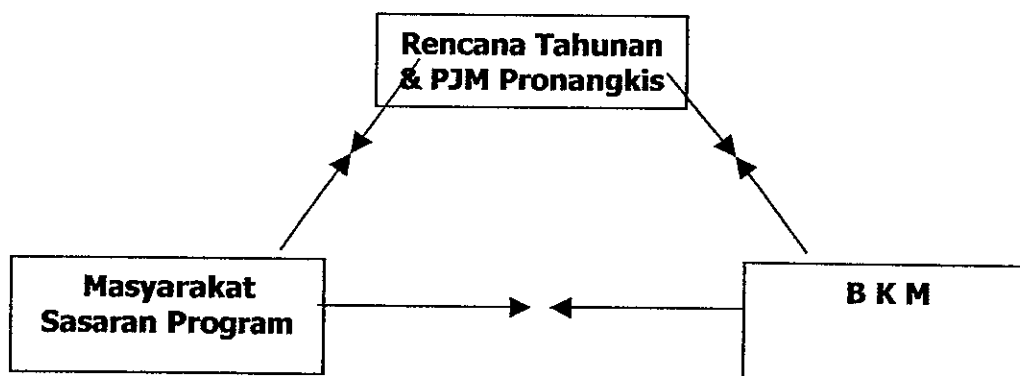
## **B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF PADA P2KP DI DESA PACUL KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL**

Pada hasil penelitian telah dideskripsikan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal mulai tahapan sosialisasi sampai dengan penyebaran hasil lokakarya. Pada sub Bab V ini akan dilihat apakah faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan, analisis terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal akan dilihat dari faktor program itu sendiri, faktor pelaksana program dan faktor masyarakat sasaran program

Untuk menganalisis faktor-faktor tersebut mempengaruhi pelaksanaan perencanaan partisipatif, digunakan pendapat dari David C. Korten (1984;181) sebagai acuan analisis yang mengemukakan teori pelebagaan program dengan menganalisis keberhasilan suatu program dari tiap elemen untuk meningkatkan adaptabilitas dan akseptabilitas program. Daya kerja suatu program dikemukakannya sebagai fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu dengan kemanfaatan yang dirasakan (*beneficiaries*), program itu sendiri dan organisasi yang melaksanakan program.

Berdasarkan pendapat David C. Korten, pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam menyusun PJM dan rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagai salah satu elemen kaitannya dengan elemen organisasi pelaksana yaitu BKM dan elemen masyarakat sasaran program, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 15**  
Kesesuaian Program, Pelaksana dan Sasaran



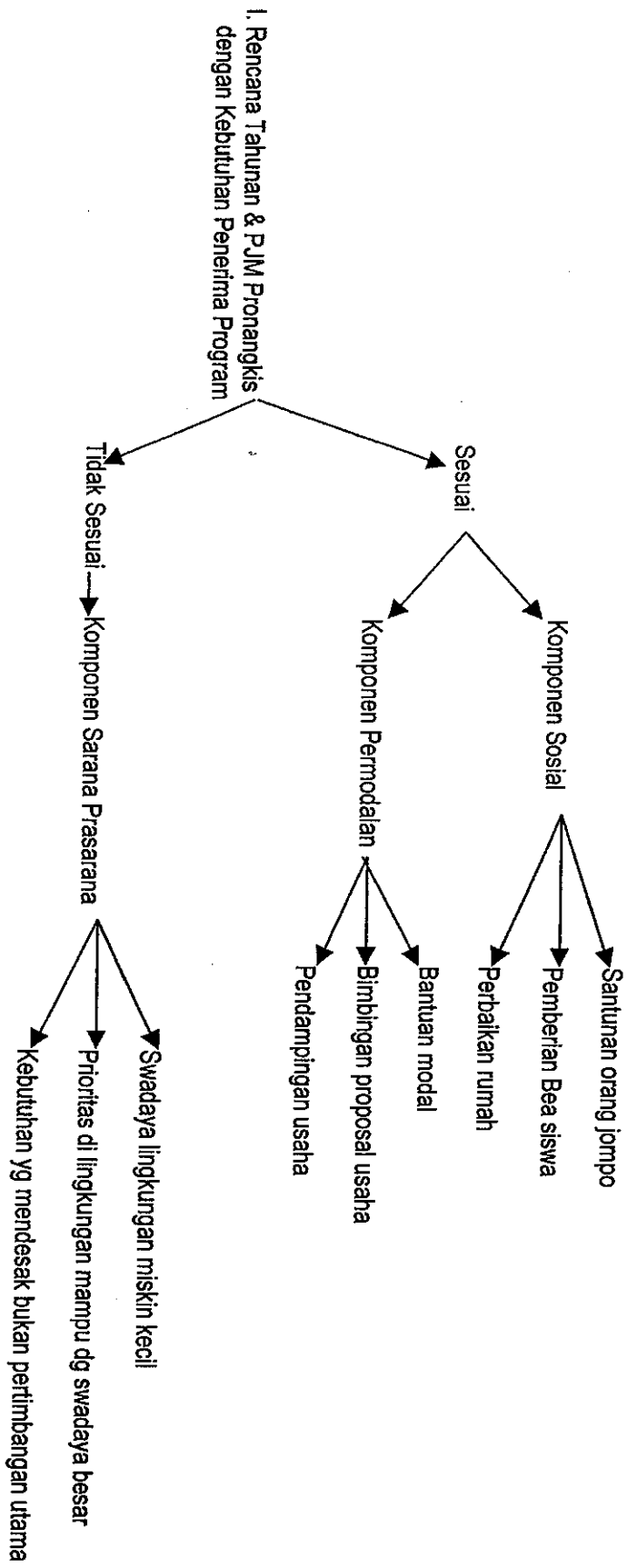
Sumber : Diadaptasi dari Korten (1984;181)

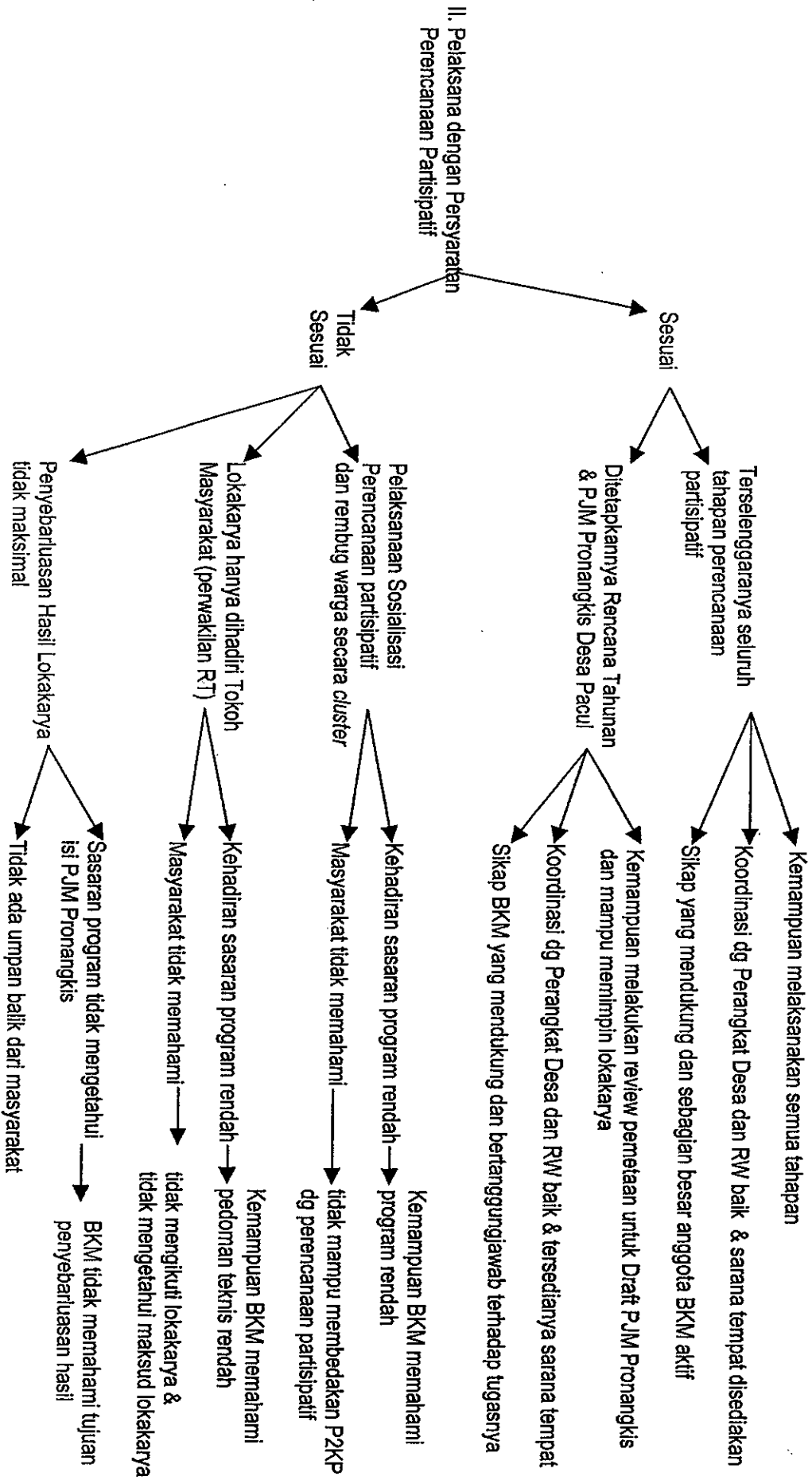
Menurut Korten (1984;181), pelaksanaan suatu program akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang ditentukan, apabila tidak ada hubungan erat/sinergis antara :

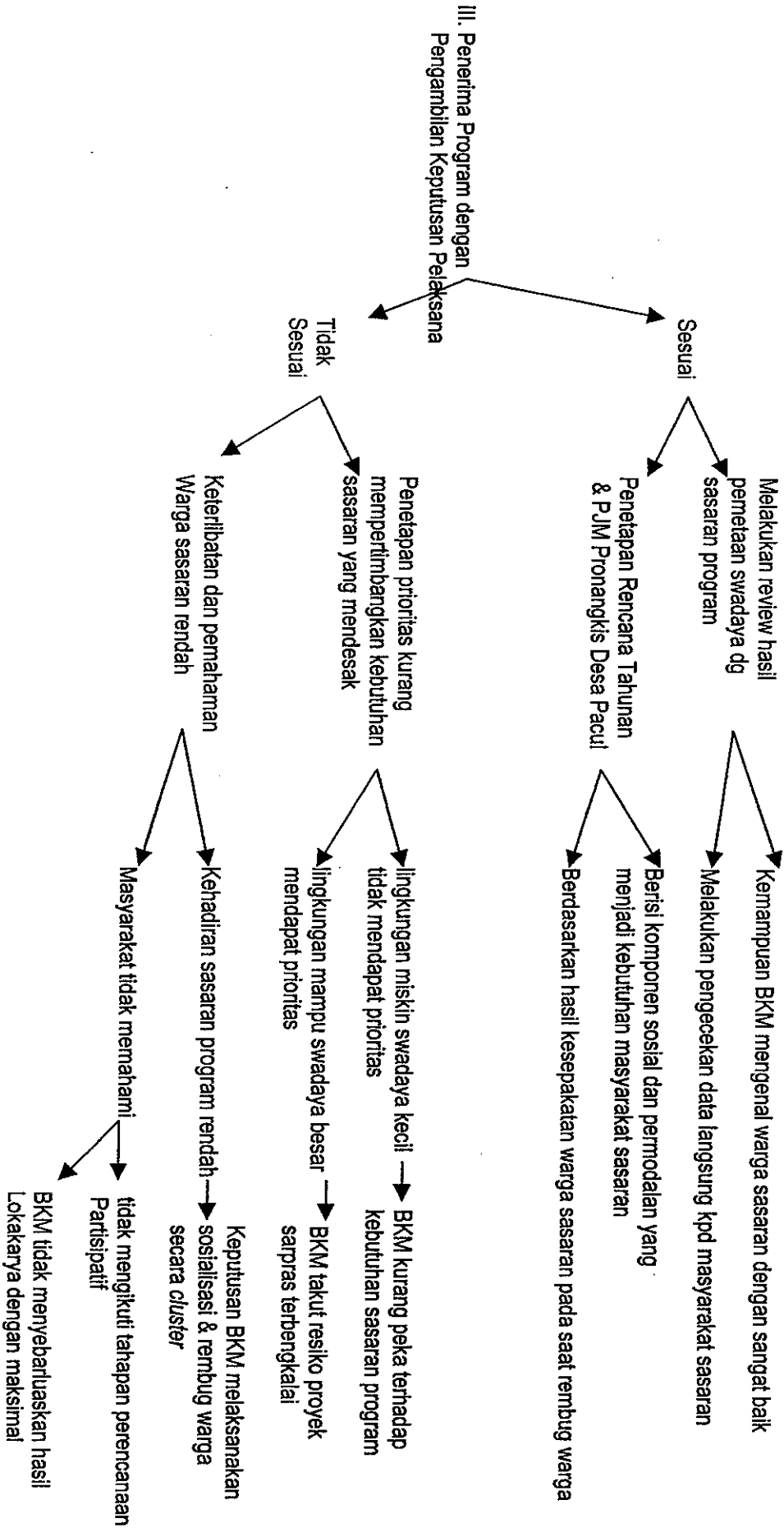
1. Kebutuhan pihak penerima dengan hasil-hasil program.
2. Persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana
3. Kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan dengan proses pengambilan keputusan oleh organisasi pelaksana.

Berikut dibawah ini analisis taksonomi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan partisipatif :

ANALISIS TAKSONOMI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN DAN PJM PRONANGKIS  
DESA PACUL KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL







Dari analisis taksonomi di atas, diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun Rencana Tahunan dan PJM Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Berikut uraian sesuai dengan analisis taksonomi di atas, untuk menjelaskan pelaksanaan perencanaan partisipatif dilihat dari tiga prasyarat yaitu :

**Pertama** adanya kesesuaian antara kebutuhan sasaran yaitu masyarakat miskin dengan hasil ketetapan perencanaan partisipatif :

Pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP dilakukan dalam rangka menyusun Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa. Tujuan dari kegiatan perencanaan partisipatif itu sendiri adalah :

1. Menentukan arah dan tujuan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat.
2. Teridentifikasinya jenis-jenis usulan dan rencana kegiatan berdasarkan pada kekuatan dan potensi yang ada serta kebutuhan riil masyarakat.
3. Teridentifikasinya rencana program masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Pada pelaksanaannya di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan rencana Tahunan Pronangkis, dimulai dari tahapan sosialisasi perencanaan partisipatif, review pemetaan swadaya, rembug warga, lokakarya dan penyebarluasan hasil



lokakarya. Masyarakat sasaran program diharapkan terlibat dan memahami seluruh rangkaian dari tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Sosialisasi dilakukan dengan harapan masyarakat sasaran program mengetahui dan memahami bahwa keterlibatan atau partisipasi mereka merupakan hal yang penting dalam konteks penyusunan strategi atau membuat sebuah rencana tindak dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh sasaran program. Tahapan sosialisasi menjadi langkah pertama yang penting dalam melibatkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat sasaran program bahwa output dari perencanaan partisipatif ini adalah solusi atau jalan keluar bagi penanggulangan masalah kemiskinan yang mereka alami. Masyarakat sasaran di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal kurang mendapat sosialisasi yang baik tentang proses, maksud dan tujuan dari perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis.

PJM Pronangkis berisikan visi, misi, tujuan pronangkis Desa, identifikasi permasalahan, kebutuhan dan potensi serta rencana tindak untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Masyarakat sasaran program lebih tertarik untuk terlibat dan mencari solusi atas permasalahan yang menyangkut kepentingan mereka. Pada rencana tindak terdapat tiga komponen yaitu komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana; komponen yang berkaitan dengan usaha produktif dan komponen yang berkaitan dengan pengembangan sosial.

Keterlibatan masyarakat sasaran pada saat rembuk warga terlihat ketika dibahas tiga komponen tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena banyak informasi dan masukan yang dibutuhkan dari masyarakat sasaran program untuk memberikan koreksi atas usulan kegiatan pada draft PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis.

Dalam komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, pada penelitian ini ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan sasaran program dengan keputusan yang dihasilkan dalam PJM Pronangkis, yaitu menetapkan usulan kegiatan pembangunan MCK di RW 1 yang tidak ditempatkan sebagai prioritas tahun pertama, padahal merupakan kebutuhan yang dinilai sudah mendesak. Pembangunan MCK tidak mendapat prioritas karena nilai dana swadaya dari masyarakat masih rendah. Rendahnya swadaya tersebut disebabkan banyak masyarakat sasaran yaitu keluarga miskin yang tinggal lingkungan RW 1, sehingga untuk mendapatkan nilai dana swadaya yang memadai tentu membutuhkan waktu. Dari kondisi ini terlihat adanya ketidaksesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat sasaran program karena adanya aturan atau pedoman yang mengharuskan tingginya nilai dana swadaya dari masyarakat.

Pada komponen yang berkaitan dengan usaha produktif dan komponen yang berkaitan dengan pengembangan sosial, pada hasil akhirnya dalam PJM Pronangkis tidak ditemui permasalahan. Masyarakat sasaran program telah teridentifikasi dan tercatat dengan baik, karena mereka merupakan sasaran dari pengembangan usaha produktif dan sosial. Pengembangan usaha produktif

diberikan kepada masyarakat sasaran yang sudah memiliki ataupun yang mempunyai rencana usaha dalam bentuk bantuan modal. Sedangkan dalam pengembangan sosial, masyarakat sasaran yang telah tercatat dan teridentifikasi sebagai hasil dari pemetaan swadaya dan hasil koreksi pada saat rebug warga diberikan bantuan berupa santunan orang jompo, santunan pemberian bea siswa dan santunan perbaikan rumah.

Pada tabel berikut ini dapat terlihat permasalahan pada komponen yang berkaitan dengan pengembangan sosial yang merupakan salah satu bagian dari isi PJM Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, dimana masyarakat sasaran program benar-benar merasakan secara langsung bantuan dari P2KP :

**Tabel 25**  
**Komponen yang Berkaitan dengan Rencana Pengembangan Sosial**

	Daftar Kebutuhan hasil Pemetaan Swadaya ( PS - 5 )	Lokasi		Masalah yang ditemui	Faktor Penyebab	Kendala utama	Pandangan Keinginan Masyarakat
		RW	RT				
III	<b>KOMPONEN YANG BERKAITAN DENGAN RENCANA PENGEMBANGAN SOSIAL</b>						
1	Santunan Orang jompo			Janda dan jompo sejumlah 150 Orang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari	Kurang perhatian dari keluarganya atau hidup sebatang kara	Rasa gengsinya relatif tinggi	Segera diberi santunan yang bersifat mendidik
2	Pemberian Bia siswa			Adanya anak usia sekolah yang tidak mampu membayar SPP sebanyak 10 orang	Kurang mampu membayar sumbangan pendidikan	Pendanaan	Segera diberi santunan agar mereka dapat melanjutkan sekolah
3	Santunan Perbaikan pemukiman			Adanya rumah yang kurang layak huni 11 unit	Penghasilan rendah mempunyai tanggungan jiwa lebih dari 4 jiwa	Dana P2KP yang diruntukan perbaikan perumahan relatif sangat kecil	Segera di perbaiki agar mereka bisa hidup layak dan sehat

Sumber : PJM Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Dari tabel di atas dapat terlihat kebutuhan masyarakat sasaran di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal teridentifikasi dalam bentuk bantuan santunan orang jompo, bea siswa dan perbaikan pemukiman. Tercatat pula seberapa banyak jumlah sasaran program yang berhak untuk menerimanya. Pada gambar di bawah ini dapat terlihat foto tentang pelaksanaan penyampaian bantuan santunan kepada orang jompo yang diserahkan secara formal oleh Kepala Desa Pacul, Bapak Ahmad Zaini.

**Gambar 16**  
**Foto Penyampaian Santunan dari P2KP**



Sumber : Arsip Foto Kegiatan BKM Mandiri Desa Pacul

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan perencanaan partisipatif yang menghasilkan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal terdapat kesesuaian antara kebutuhan sasaran yaitu masyarakat miskin dengan PJM dan Rencana Tahunan yang ditetapkan pada komponen yang berkaitan dengan permodalan dan sosial. Sedangkan pada komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat sasaran dengan hasil

PJM Pronangkis yang ditetapkan sehingga masih diperlukan perbaikan sistem atau prosedur khusus yang dapat menjembatani antara pemenuhan kebutuhan sasaran program dengan keputusan yang diambil.

**Kedua** adanya kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan kemampuan khusus organisasi dan petugas pelaksana yaitu anggota BKM.

Perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis merupakan tanggungjawab dari BKM untuk melaksanakannya sesuai dengan Pedoman Teknis P2KP 1 Tahap II. Dalam pedoman teknis disebutkan bahwa perencanaan partisipatif dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi perencanaan partisipatif, review pemetaan swadaya, rembug warga, lokakarya dan penyebarluasan hasil lokakarya. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian hanyalah 5 (lima) tahapan kegiatan perencanaan partisipatif, dimana BKM dituntut mempunyai kemampuan dalam memahami dan menjalankan seluruh proses dengan baik, karena hal tersebut merupakan syarat keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, BKM beberapakali mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan pedoman teknis, seperti pelaksanaan sosialisasi dan rembug secara *cluster*, yaitu hanya di 3 (tiga) lokasi, kebijakan hanya utusan RT/RW yang menghadiri lokakarya dan penyebaran hasil lokakarya yang tidak maksimal.

Akibat dari tidak sesuainya pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan pedoman teknis adalah tidak tercapainya harapan atas keterlibatan sebanyak-banyaknya masyarakat sasaran dalam semua tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif. Rendahnya keterlibatan warga sasaran merupakan salah satu indikator dari tidak berhasilnya pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat sasaran memahami perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM Pronangkis, apabila masyarakat sasaran tersebut tidak terlibat dalam tahapan-tahapan kegiatan.

Sedangkan jika penilaian pelaksanaan perencanaan partisipatif hanya dilihat dari terselenggaranya seluruh tahapan dan menghasilkan PJM Pronangkis yang disepakati melalui forum warga (Lokakarya), maka kinerja BKM dapat dikatakan berhasil. BKM dinilai memiliki kemampuan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, rembuk warga dan lokakarya. Melalui koordinasi yang baik dengan Perangkat Desa, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat, berbagai tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM Pronangkis dapat diselenggarakan dengan baik.

Jadi ada 2 (dua) kesimpulan pada analisis kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan kemampuan khusus organisasi dan petugas pelaksana yaitu anggota BKM, yang pertama disimpulkan bahwa ada kesesuaian jika dilihat dari terselenggaranya seluruh tahapan kegiatan perencanaan partisipatif dan menghasilkan PJM Pronangkis Desa Pacul

Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Kesimpulan kedua adalah ada ketidaksesuaian antara persyaratan pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan kemampuan khusus organisasi dan petugas pelaksana yaitu anggota BKM dilihat dari kurangnya keterlibatan warga sasaran dalam berbagai tahapan kegiatan perencanaan partisipatif.

**Ketiga** kesesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana.

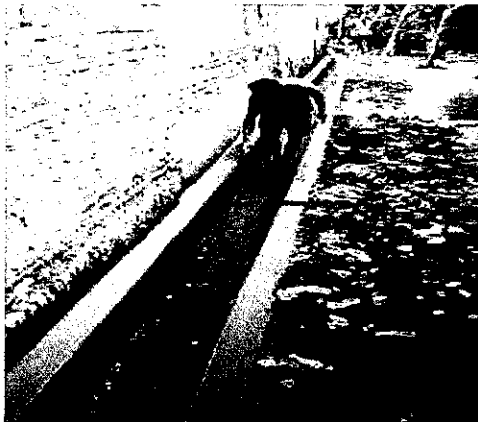
Keluaran dari perencanaan partisipatif adalah PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis. Di dalam PJM Pronangkis telah teridentifikasi berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat sasaran program. Juga teridentifikasi kendala yang ada selama ini sehingga permasalahan kemiskinan di masyarakat belum dapat diatasi. Masyarakat sasaran juga diminta untuk ikut memberikan saran tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan serta menunjukkan potensi apa yang dimiliki sehingga perencanaan penanggulangan kemiskinan dapat ditetapkan sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri.

Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, proses pengambilan keputusan yang dilakukan BKM secara formal telah dilakukan dengan benar karena melalui berbagai tahapan yang telah ditentukan dalam pedoman teknis P2KP. Hasil kesepakatan berupa PJM Pronangkis juga pada umumnya dapat diterima masyarakat sasaran program

terutama pada komponen yang berkaitan dengan usaha produktif dan sosial. Sedangkan tentang komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, ditemukan satu permasalahan dalam penelitian ini, yaitu usulan pembangunan MCK dari masyarakat sasaran program yang tinggal di RW 1 Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Ketidaksesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan BKM pada pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal hanya terdapat di RW 1 tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai adanya kesesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan BKM, gambar foto berikut ini merupakan salah satu pelaksanaan komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yaitu perbaikan saluran air di RW 6 Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal :

**Gambar 17**  
**Foto Hasil Perbaikan Saluran Air di RW 6**



Sumber : Arsip Foto BKM Mandiri Desa Pacul



### C. DISKUSI

Perencanaan partisipatif pada P2KP yang menghasilkan PJM dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa adalah satu tahap proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahap kajian keadaan pedesaan secara partisipatif yang didapat dari informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan pemetaan swadaya yang dilakukan oleh tim Pemetaan Swadaya. Perencanaan partisipatif bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program mereka dan juga untuk mengukur keberhasilan kegiatan atau program tersebut (monitoring dan evaluasi). Kalau masyarakat sendiri berpartisipasi dalam melaksanakan proses perencanaan secara partisipatif, maka kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan atas kemauan masyarakat sendiri sehingga akan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaannya.

Diana Conyers (1994;154) menyebutkan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting, demikian pula kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka penyusunan PJM Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, yaitu :

Alasan pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya, program-program pembangunan akan gagal. Pada saat dilaksanakan pemetaan swadaya oleh Tim Pemetaan Swadaya yang beranggotakan warga masyarakat setempat, dimana anggota Tim pemetaan

yang berasal dari seluruh RT di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Ikutsertanya warga masyarakat dalam Tim Pemetaan Swadaya merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat dalam rangka mencari, mengumpulkan dan mendata masalah, kebutuhan dan potensi yang ada di Desa yang berkaitan dengan masalah utama penanggulangan kemiskinan.

Alasan kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal masyarakat sasaran akan mengetahui program pada kegiatan sosialisasi, rembuk dan lokakarya PJM Pronangkis Tingkat Desa. Pelaksanaan forum-forum tersebut merupakan upaya melibatkan masyarakat dalam merencanakan, mencari pemecahan bersama dan melakukan tindakan yang nyata untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Alasan ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Masyarakat mempunyai hak untuk turut *urun rembuk* (memberi saran) dalam menentukan dan merencanakan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, hak masyarakat untuk ikut urun rembuk diberikan secara luas pada semua tahapan kegiatan perencanaan partisipatif, seperti pada saat adanya permintaan

informasi untuk review pemetaan swadaya, memberikan saran dan koreksi pada saat rembug warga dan juga memberikan saran dan masukan pada saat pelaksanaan lokakarya. Bahkan masyarakat sasaran di P2KP diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik apabila dirasakan ada perencanaan yang kurang atau tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, setelah hasil lokakarya disebarluaskan kepada masyarakat.

Menurut Alexander Abe (2005;90) pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan akan membawa tiga dampak penting, yaitu :

- a. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat.
- b. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.
- c. Meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Tiga dampak penting di atas dimungkinkan terjadi pada pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Permasalahan yang terjadi di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah kurangnya kehadiran warga sasaran dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan perencanaan partisipatif. Prinsip dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan 'melibatkan kepentingan masyarakat' hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak awal,

proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar.

Alexander Abe (2005;91-92) menyatakan bahwa ada dua bentuk perencanaan partisipatif, yaitu :

Pertama, perencanaan yang langsung disusun bersama masyarakat, perencanaan ini bisa merupakan :

- a. perencanaan lokasi – setempat, yakni perencanaan yang menyangkut daerah dimana masyarakat berada;
- b. perencanaan wilayah yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara perwakilan.

Kedua, perencanaan yang disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal formal), seperti parlemen. Untuk yang kedua ini, masyarakat sebaiknya masih tetap terbuka dalam memberikan masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Jika dilihat dari proses pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka perencanaan partisipatif yang dilaksanakan merupakan bentuk pertama, dimana perencanaan disusun langsung bersama masyarakat.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP ditujukan dalam rangka menyusun Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Sosialisasi Perencanaan Partisipatif

Pelaksanaan secara *cluster* di tiga tempat berbeda dengan pedoman teknis yang mengharuskan dilaksanakan pada setiap RT atau RW. BKM dinilai mempunyai kemampuan yang rendah karena hanya memfasilitasi tidak memberikan materi sosialisasi, sikap anggota mendukung kegiatan dan kordinasi berjalan dengan baik. Kehadiran masyarakat sasaran program , yaitu perempuan dan kepala keluarga miskin rendah.

b. Review Pemetaan Swadaya

Dilaksanakan dengan baik oleh BKM bekerjasama dengan Tim Pemetaan Swadaya, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa. Sarana tempat koordinasi disediakan oleh Kepala Desa di salah satu ruangan di Balai Desa Pacul. Keterlibatan masyarakat sasaran pada saat adanya permintaan data ulang untuk mereview data hasil pemetaan swadaya.

c. Rembug Warga

Rembug warga dilaksanakan secara *cluster* hanya di tiga tempat, gabungan pertama, RW 1, RW 2 dan RW 3; gabungan kedua RW 4 dan RW 5; dan gabungan ketiga RW 6 dan RW 7. BKM mampu menyelenggarakan dan memfasilitasi serta melakukan presentasi Draft PJM Pronangkis di depan acara rembug warga. Kehadiran masyarakat sasaran lebih tinggi dibandingkan pada saat kegiatan sosialisasi. Keterlibatan masyarakat dalam rembug juga dinilai baik, karena banyak memberikan informasi tambahan, saran serta koreksi terhadap draft PJM Pronangkis.

d. Lokakarya PJM Pronangkis

Loakakarya dilaksanakan di Balai Desa dengan dihadiri masyarakat yang merupakan perwakilan RT-RT yang ada di Desa Pacul. Tingkat kehadiran rendah, karena ada perwakilan RT yang tidak hadir. BKM mampu menyelenggarakan dan menghasilkan kesepakatan PJM Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

e. Penyebarluasan Hasil Lokakarya

Pada tahapan ini penyebarluasan hasil lokakarya tidak terlaksana dengan baik, karena tidak menggunakan media ataupun memanfaatkan papan-papan pengumuman yang ada. Tidak ada umpan balik dari masyarakat sasaran terhadap hasil lokakarya. Namun demikian ada tindak lanjut dari masyarakat yang mendapatkan prioritas tahun pertama dari P2KP

2. Pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP dalam rangka menyusun PJM Pronangkis dan Rencana Tahunan Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal keberhasilannya dipengaruhi oleh kesesuaian tiga faktor, yaitu faktor program itu sendiri atau pedoman perencanaan partisipatif, organisasi pelaksana program, yaitu BKM dan masyarakat sasaran program. Dari hasil analisis hasil penelitian di dapat kesimpulan sebagai berikut :
  - a. Terdapat kesesuaian antara kebutuhan sasaran yaitu masyarakat miskin dengan PJM dan Rencana Tahunan yang ditetapkan pada komponen yang berkaitan dengan pengembangan usaha produktif dan pengembangan sosial. Sedangkan pada komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat sasaran dengan hasil PJM Pronangkis yang ditetapkan sehingga masih diperlukan perbaikan sistem atau prosedur khusus yang dapat menjembatani antara pemenuhan kebutuhan sasaran program dengan keputusan yang diambil.
  - b. Terdapat 2 (dua) kesimpulan pada analisis kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan kemampuan khusus organisasi dan petugas pelaksana yaitu anggota BKM, yang pertama disimpulkan bahwa ada kesesuaian jika dilihat dari terselenggaranya seluruh tahapan kegiatan perencanaan partisipatif dan menghasilkan PJM Pronangkis Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Kesimpulan

kedua adalah ada ketidaksesuaian antara persyaratan pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan kemampuan khusus organisasi dan petugas pelaksana yaitu anggota BKM dilihat dari kurangnya keterlibatan warga sasaran dalam berbagai tahapan kegiatan perencanaan partisipatif, padahal hal tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan pelaksanaan perencanaan partisipatif.

- c. Hasil kesepakatan berupa PJM Pronangkis juga pada umumnya dapat diterima masyarakat sasaran program terutama pada komponen yang berkaitan dengan usaha produktif dan sosial. Sedangkan tentang komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, ditemukan satu permasalahan dalam penelitian ini, yaitu usulan pembangunan MCK dari masyarakat sasaran program yang tinggal di RW 1 Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Ketidaksesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan BKM pada pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal hanya terdapat di RW 1 tersebut.
3. Dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif dalam rangka menyusun Rencana Tahunan dan PJM Pronangkis di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dindikasikan belum dilaksanakan secara baik, hal ini dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :



- a. Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat sasaran program dalam berbagai kegiatan atau tahapan perencanaan partisipatif.
- b. Masih rendahnya atau sedikit masyarakat sasaran program yang mengetahui, peduli dan memahami Pronangkis.
- c. Pelaksana program (BKM) melaksanakan tahapan perencanaan partisipatif tidak sesuai dengan Pedoman Teknis P2KP.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini disampaikan rekomendasi dari penulis kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan partisipatif pada P2KP di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, masing-masing ditinjau dari dimensi program, organisasi pelaksana program dan masyarakat sasaran program :

### Dimensi program :

1. Perlu dilakukan penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simple dan mudah dipahami baik oleh organisasi pelaksana maupun masyarakat sasaran program dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip perencanaan partisipatif. Penyempurnaan tahapan tersebut menurut peneliti sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi dilaksanakan tidak secara khusus yang merupakan satu tahapan, tetapi dilaksanakan secara terus menerus dalam berbagai kesempatan atau media yang berkaitan dengan masyarakat banyak di Desa.
  - b. Tahapan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun Rencana Tahunan dan PJM Pronangkis merupakan satu kesatuan tahapan dengan Pelaksanaan Pemetaan Swadaya, sehingga pelaksanaannya menjadi :
    - 1) Hasil Tim Pemetaan Swadaya sudah merupakan hasil rembug warga
    - 2) Review Hasil Tim Pemetaan Swadaya/Rembug Warga
    - 3) Lokakarya

2. Perlu ada peninjauan kebijakan non-insentif bagi BKM, karena pada prakteknya di lapangan sangat mempengaruhi sikap dari pelaksana program dalam melaksanakan tugas-tugas yang nilai tanggungjawabnya cukup besar.

Dimensi Organisasi Pelaksana Program (BKM) :

1. Perlu ada peningkatan kapasitas BKM dalam bentuk pelatihan atau penambahan wawasan, terutama setiap akan melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan yang penting. Dengan demikian diharapkan mempunyai kemampuan yang memadai pada saat melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan perencanaan partisipatif dan juga agar timbul inisiatif dalam mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan tugas.
2. Perlu terus dilakukan penyadaran terhadap BKM tentang norma-norma dan prinsip-prinsip P2KP yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, sehingga timbul sikap kesukarelawanan dan keikhlasan dari para anggota BKM demi tercapainya tujuan penanggulangan kemiskinan di Desa.
3. Perlu terus dijalin dan dipelihara komunikasi yang baik antara BKM dengan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat lain yang ada di Desa, agar pelaksanaan tugas dalam merealisasikan hasil kesepakatan Loakakarya dapat berjalan dengan baik.

Dimensi Masyarakat Sasaran Program :

1. Pemberian informasi dan sosialisasi tentang PJM dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, harus terus dilaksanakan dalam berbagai kesempatan kepada masyarakat agar terus terlibat, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasannya, yaitu antara lain melalui kegiatan-kegiatan secara rutin dilaksanakan dan banyak diikuti warga desa seperti pengajian, pertemuan PKK, pertemuan warga, perkumpulan petani, kegiatan seni, dan lain-lain.
2. Kehadiran sebanyak-banyaknya masyarakat sasaran program dalam berbagai kegiatan P2KP atau kegiatan pembangunan lain yang ada di Desa harus dijadikan target utama oleh BKM atau Pemerintah Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ibrahim Indrawijaya, 1989, *Perilaku Organisasi*, Bandung, Sinar Baru.
- Alexander Abe, 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta
- Ambar TS., 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta
- Budi Winarno, 1998, *Teori Kebijakan Publik*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Dann Sugandha, 1988, *Koordinasi Alat Pemersatu Era Administrasi*, Intermedia, Jakarta
- Perencanaan Partisipatif pada Tingkat Lapangan*, [www.deliveri.org/Guidelines/how/hm\\_9/hm\\_9\\_1i.htm](http://www.deliveri.org/Guidelines/how/hm_9/hm_9_1i.htm) - 8k, diakses pada tanggal 2 Maret 2005
- Diana Conyers, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*, Gadjah Mada UP, Yogyakarta
- George C Edwards III, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press., Washington DC
- Gibson, Ivanisevick and Donnelly, 1995, *Organization Behavior, Structure, Process*, Richard D Irwin Inc., USA
- Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidesendo, Jakarta
- Grindle, Merilee, 1980, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, Neew Jersey
- Hasibuan, Malayu, 1993, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, Penerbit CV Haji Masagung, Jakarta
- Handyaningrat, Soewarno, 1982, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta

- Hetifah Sj Sumarto, 2004, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Hoogerwerf, 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta
- Irfan Islamy, 1988, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara
- , 1994, *Prinsip-prinsip Kebijakan Publik*, Jakarta, Bina Aksara.
- Kae H. Chung and Leon C. Meggrisson, 1981, *Organization Behavior Development Managerial Skill*, Harper and Row Publisher, New York
- KMW-SWK VI, 2003, *Materi pelatihan Dasar BKM dan Perencanaan Partisipatif*, Semarang.
- Koentjaraningrat, 1981, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta
- Korten, David C., 1984, *People Centered Development, Contributions toward Theory and Planning Frameworks*, Kumarian Press, Connecticut
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan pengendalian Program Pembangunan*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Lexy. Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Maslow, A.H., 1992, *Motivasi dan Perilaku*, Semarang, PT Dahara Prize.
- Masri Singarimbun dan Soffian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta
- Miftah Toha, 1993, *Prinsip-prinsip Administrasi Publik*, Rajawali press, Jakarta
- Moebyarto, 1994, *Keswadayaan Masuarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yogyakarta
- Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moch Nazir, 1986, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Nasution, S., 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- , 1996, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Nawawi Hadari, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Ndraha, T., 1987, *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Panglaykim dan Hanzil, 1982, *Manajemen Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prijono dan Pranarka, 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta
- Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Said Zainal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik*, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Samodra Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Samsura, DA Adriansyah, 2003, *Participatory Planning, Good Governance dan Civil Society*, Makalah, Ragam Warta-Participatory Planning
- Siagian, S. P. 1983, *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 1990, *Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- , 1999, *Reformasi Pelayanan Publik; Kajian dari Perspektif Teori Governance*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya di Malang 30 Oktober 1999.
- Strauss and Corbin, 1990, *Basic of Qualitative*, Sage Publication, London
- Surakhmad, 1994, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung
- Sutarto, 1987 *Dasar-Dasar Organisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta

- Van Meter and Van Horn, 1975, *The Policy Impelementation Process, A Conceptual Framework*, Administration and Society 6
- Wahyudi K., 1992, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, Rina, 2001, *Forum Pengambilan Keputusan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM, Yogyakarta
- William Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Zaenal Hidayat, 2002, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Kualitatif*, Semarang, Program Pasca Sarjana MAP Undip.